



TOPONIMI DI JANTUNG KOTA YOGYAKARTA

dari Perspektif Kebahasaan
hingga Psikologi Sosial



Fajar Erikha dan Multamia R.M.T. Lauder

TOPONIMI DI JANTUNG KOTA YOGYAKARTA

dari Perspektif Kebahasaan
hingga Psikologi Sosial



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

TOPONIMI DI JANTUNG KOTA YOGYAKARTA

dari Perspektif Kebahasaan
hingga Psikologi Sosial



Fajar Erikha dan Multamia R.M.T. Lauder

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2022 Fajar Erikha dan Multamia R.M.T Lauder

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Toponimi di Jantung Kota Yogyakarta dari perspektif kebahasaan hingga psikologi sosial/ Fajar Erikha dan Multamia R.M.T. Lauder–Jakarta: LIPI Press, 2022.

xvi hlm. + 144 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-496-289-0 (cetak)
978-602-496-290-6 (e-book)

910.141

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pengubahan nama jalan | 2. Toponimi |
| 3. Sosio-onomastika | 4. Yogyakarta |

Copy editor : Noviasuti Putri Indrasari dan Heru Yulistiyani
Proofreader : Tantrina Dwi Aprianita dan Sonny Heru Kusuma
Penata isi : Vidia Cahyani dan Meita Safitri
Desainer sampul : Meita Safitri

Cetakan pertama : Januari 2022



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id



Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah, Badan Riset dan Inovasi Nasional.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Isi



Daftar Gambar.....	vii
Pengantar Penerbit.....	ix
Kata Pengantar	xi
Prakata	xiii
Ucapan Terima Kasih.....	xv
BAB I Selayang Pandang Nama dan Penamaan Tempat.....	1
A. Selayang Pandang Mengenai Toponimi.....	1
B. Toponimi di Yogyakarta dan Dinamikanya	6
C. Penelusuran Toponimi.....	9
BAB II Toponimi dan Masyarakat.....	11
A. Nama dan Tanda	11
B. Onomastika dan Sosio-onomastika	14
C. Lanskap Linguistik	18
D. Kelekatan Toponimik.....	20
E. Onomastika Setempat.....	22
BAB III Filosofi Sangkan <i>Paraning Dumadi</i>.....	27
A. Panggung Krapyak	33
B. Jalan D.I. Panjaitan	35

C. Keraton Yogyakarta	36
D. Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora)	48
E. Jalan Margo Mulyo (d.h Jalan Ahmad Yani)	48
F. Jalan Malioboro.....	48
G. Jalan Margo Utomo (d.h Jalan Pangeran Mangkubumi) ..	48
H. Tugu Pal Putih.....	48
BAB IV Anasir Kebahasaan dan Psikologi Sosial Toponimi.....	53
A. Rajamarga dan Masyarakatnya.....	53
B. Psikologi Sosial Nama: Sikap, Persepsi, dan Preferensi ...	101
C. Persinggungan Antarkonsep Sosio-onomastika	108
BAB V Harapan hingga Kebijakan Pemerintah Daerah dan Keraton.....	113
BAB VI Pengujung	117
A. Rekonstruksi	117
B. Rekomendasi	120
Daftar Pustaka	123
Indeks.....	137
Biografi Penulis.....	141

Daftar Gambar



Gambar 1.	Teori Segitiga Semiotika.....	12
Gambar 2.	Teori Konsep Linguistik Setempat dan Onomastika Setempat.....	23
Gambar 3.	Ilustrasi filosofi <i>sangkan paraning dumadi</i>	32
Gambar 4.	Panggung Krapyak dari Arah Barat Laut.....	34
Gambar 5.	Penulisan <i>Krapjak</i> dan <i>Midjen</i>	35
Gambar 6.	Ilustrasi Perbandingan Tugu Golong Gilig (kiri) dan Tugu Pal Putih (kanan).....	50
Gambar 7.	Plang Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora).....	54
Gambar 8.	Jalan Trikora.....	55
Gambar 9.	Bangsai Pangurakan dilihat dari selatan Keraton Yogyakarta.....	60
Gambar 10.	Gerbang Pangurakan, Lukisan Karya Johannes Rach (1760–1780).....	60
Gambar 11.	Dua dari Tiga Gapura yang Tersisa di Jalan Pangurakan	61
Gambar 12.	<i>Kadasterstraat</i> (dalam Elips) dan <i>Kaoemandoengan Gladakan</i> (dalam Segi Empat).....	61
Gambar 13.	Nama Jalan Ganda: Trikora dan Pangurakan.....	62
Gambar 14.	<i>Residentielaan</i>	69
Gambar 15.	Plang Nama Gereja Margo Mulyo (Tertulis Marga Mulya)	70

Gambar 16. Plang Jalan Margo Mulyo.....	71
Gambar 17. Nama Ganda pada Papan Reklame.....	72
Gambar 18. Pemakaian Tiga Nama Jalan.....	73
Gambar 19. Variasi Pemakaian Nama Jalan.....	74
Gambar 20. Penulisan Jalan Malioboro (elips sisi kiri) ditaruh pada ruas Jalan Margo Mulyo (elips sisi kanan)	75
Gambar 21. Nama Malioboro (Elips Panjang) dan Petjinan (Garis Lurus)	80
Gambar 22. Plang Jalan Malioboro	86
Gambar 23. Nama <i>Toegoe</i> , <i>Toegoe Wetan</i> , dan <i>Toegoe Koelon</i>	88
Gambar 24. Plang Nama Ganda: Jalan Pangeran Mangkubumi dan Jalan A.M Sangaji	90
Gambar 25. Plang Jalan Margo Utomo.....	90
Gambar 26. Lokasi Jalan Margo Utomo	95
Gambar 27. Grafik Sikap Masyarakat terhadap Pengubahan Nama....	103
Gambar 28. Grafik Persepsi Masyarakat terhadap Pengubahan Nama	104
Gambar 29. Grafik Preferensi Masyarakat terhadap Pengubahan Nama.....	105
Gambar 30. Persinggungan Tiga Konsep Sosio-onomastika.....	110
Gambar 31. Poster Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	116

Pengantar Penerbit



Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Publikasi terkait toponimi mungkin sudah ada sebelumnya. Namun, sejauh ini publikasi terkait masih berfokus pada latar sejarah-budaya penamaan dan analisis kebahasaan. Buku *Toponimi di Jantung Kota Yogyakarta dari Perspektif Kebahasaan hingga Psikologi Sosial* ini menawarkan perspektif yang baru dalam bahasan Toponimi. Menggunakan pendekatan sosio-onomastik (lanskap linguistik, kelekatan toponimik, dan onomastik setempat), penulis menemukan bahwa pengubahan nama jalan di Yogyakarta tidak hanya mengandung makna dasar tetapi juga mengandung makna filosofi. Pemaknaan ini berkaitan dengan sikap, persepsi, dan preferensi masyarakat terhadap nama jalan dan pengubahannya.

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan studi toponim, akademisi yang bergiat di bidang toponimi, juga bagi mereka yang mendalami disiplin linguistik, psikologi sosial, sosiologi, kajian perkotaan, antropologi, hingga geografi budaya. Selain

itu, diharapkan juga bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta ataupun kota atau daerah lain yang akan melakukan perubahan toponimi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar



Prof. Ayatrohaedi (alm.), seorang pakar geolinguistik yang juga seorang ahli arkeologi, khususnya di bidang epigrafi, mengemukakan pentingnya sebuah nama. Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) pada 1993, beliau mengemukakan bahwa ucapan Shakespeare yang terkenal dengan kalimat bersayap, “*What is in a name?*”, yang sering diterjemahkan sebagai “Apalah arti sebuah nama?”, adalah sebuah kalimat yang hanya berlaku pada situasi tertentu. Namun, dalam kenyataannya, nama memiliki arti yang amat penting dalam kehidupan manusia karena fungsi nama adalah menempatkan memori manusia terhadap suatu benda atau tempat. Adapun nama tempat dikenali sebagai penanda untuk penunjuk suatu tempat di muka bumi ini. Oleh karena itu, muncullah bidang ilmu tentang nama, yaitu onomastika, yang terdiri atas dua cabang ilmu, yakni antroponimi (ilmu yang mempelajari tentang nama manusia) dan toponimi (ilmu yang mempelajari tentang nama tempat).

Toponimi inilah yang menjadi alasan United Nations mendirikan United Nations Group of Experts in Geographical Names (UNGEGN), yaitu salah satu organisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus nama tempat di seluruh dunia. Di Indonesia, urusan tentang toponimi dipercayakan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG), yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan

Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Toponimi menjadi bagian penting untuk dipelajari secara khusus, baik dalam lingkungan akademis maupun nonakademis. Nama tempat banyak ditemui ketika mempelajari bidang studi arkeologi dan geografi sehingga, untuk memahami nama tersebut, diperlukan pendalaman melalui pendekatan berbagai cabang ilmu, seperti epigrafi, geografi, sejarah, linguistik, filologi, dan psikologi.

Menyambung uraian di atas, apa yang disampaikan oleh penulis di dalam karya ini patut didiseminasikan ke hadapan publik, baik bagi mereka yang secara khusus bergelut di bidang toponimi maupun bagi mereka selaku penikmat ilmu bahasa dan psikologi. Karya ini juga menjelaskan bagaimana fenomena yang barangkali terkesan umum di mata awam, yaitu perkara pergantian nama tempat, menjadi sesuatu yang layak untuk dikaji dan diperbincangkan layaknya isu sosial lainnya.

Mungkin kita juga pernah membaca di media sosial tentang bagaimana sebuah nama jalan atau nama tempat diganti oleh pihak berwenang dan seketika menimbulkan pergolakan dari sejumlah anggota masyarakat. Isu pergantian nama tersebut mengindikasikan bahwa nama bukanlah sesuatu yang remeh-temeh, melainkan sesuatu yang krusial dalam kehidupan kita. Fungsi identitas, memori, sejarah, koneksi antarkelompok, hingga bagaimana strategi sukses-tidaknya pergantian nama dijelaskan dalam buku ini melalui pendekatan ilmiah.

Iniilah mungkin yang dirasa masih terbatas di dalam ceruk publikasi kajian toponimi yang kerap berfokus pada ihwal asal-usul semata. Belum banyak yang menyadari bahwa nama pada dasarnya adalah sebuah artefak budaya, tetapi bersifat dinamis dan memiliki varian yang dimaknai berbeda pada tiap individu.

Jakarta, 3 April 2020

Dr. Ninny Susanti

Ketua Umum Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia (PAEI)

Prakata



Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa bagi masyarakatnya maupun bagi bangsa Indonesia. Yogyakarta merupakan sebuah lanskap dan representasi budaya yang sangat kaya dan mapan. Buku *Toponimi di Jantung Kota Yogyakarta dari Perspektif Kebahasaan Hingga Psikologi Sosial* ini merupakan intisari dari penulisan tentang fenomena pergantian nama jalan di Kota Yogyakarta yang kami lakukan Bersama Tim Komunitas Toponimi Indonesia (Kotisia) pada 2017 lalu. Penulisan tersebut selanjutnya dirangkum ke dalam penulisan ilmiah yang disajikan seluwes mungkin agar dapat menarik perhatian berbagai kalangan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya penamaan tempat atau yang lebih dikenal dengan sebutan toponimi.

Pada tahun 1988 lalu, telah terbit sebuah penelitian berjudul “Inventarisasi Dan Dokumentasi Nama-Nama Jalan di Daerah Kotamadya Yogyakarta”. Baru pada tahun 2007, muncul publikasi penelitian lain yang membahas ragam toponim di Kota Yogyakarta. Singkat kata, dalam dua dekade terakhir, semakin bertambah publikasi buku maupun artikel ilmiah yang membahas toponimi di Kota/sekitar provinsi Yogyakarta. Umumnya, publikasi tersebut memaparkan latar sejarah-budaya penamaan dan analisis kebahasaan. Kendati demikian,

kami menawarkan perspektif yang belum banyak dibahas, yaitu dinamika penamaan berdasarkan data fenomena pergantian nama jalan, dan seperti apa respons masyarakat terhadap fenomena tersebut. Kajian ini menjadi penting karena di satu sisi, Kawasan Yogyakarta telah berkembang menjadi sebuah kota/perkotaan, sedangkan di sisi lain, nilai-nilai budaya Jawa dengan Keraton sebagai pusat tetap teguh dipertahankan.

Konten buku ini berfokus pada aspek sosial nama dan penamaan, yang lebih dikenal sebagai sosio-onomastika. Objek yang dikaji adalah toponim yang terdapat di garis Sumbu Filosofi Sangkan Paraning Dumadi, khususnya pada r^âjam^ârnga atau jalan-jalan di sekitar Keraton Yogyakarta. Pada bagian lain, kami pun menyajikan implikasi teoretis pada konsep sosio-onomastika yang selama ini masih didominasi oleh hasil kajian berlatar Barat.

Isi buku ini disajikan bagi mereka yang tertarik dengan studi toponim, akademisi yang bergiat di bidang toponimi, juga bagi mereka yang mendalami disiplin linguistik, psikologi sosial, sosiologi, kajian perkotaan, antropologi, hingga geografi budaya. Besar harapan kami buku ini dapat menyumbangkan sesuatu pada rumpun ilmu terkait dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut hingga pada tataran praktis. Selamat membaca.

Jakarta, 24 Mei 2021

Tim Penulis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ucapan Terima Kasih



Di balik layar, ada banyak pihak yang telah berjasa mendukung semua proses dalam tulisan ini. Pada tahap awal sekali, ucapan terima kasih yang mendalam dihaturkan kepada Prof. Peter Carey, Bapak Ki Roni Sodewo Diponegoro (Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro), Gusti Bendera Pangeran Harya Yudhaningrat, dan Bapak Rahadi Saptata Abra. Dalam penelusuran toponimi dan informasi pendukungnya, kami merasa sangat terbantu oleh banyak pihak, seperti Mas Adhe Pamungkas (Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kota Yogyakarta), Bapak Ignatius Eka Hadiyanta yang sangat memahami toponimi di Kota Yogyakarta dan filosofi yang melatarinya (Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta), Bapak Darto Harnoko (Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta), serta Bapak Yuwono Sri Suwito. Mereka yang berjasa menjelaskan banyak hal tentang Yogyakarta dari berbagai perspektif: Romo Tirun (Kangjeng Raden Tumenggung Jatiningrat, Kepala Tepas Dwarapura Keraton Yogyakarta), Bapak Dr. Gregorius Budi Subanar (Romo Banar, Universitas Sanata Dharma), Bapak Nolly Sopaheluwakan (Gereja Margo Mulyo), serta Bapak Wijayanto dan Bapak Sigit Setyawan (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta).

Mereka yang telah menjadi peserta diskusi kelompok terpumpun yang berasal dari masyarakat yang tinggal dan/atau beraktivitas di

sekitar Jalan Pangurakan, Jalan Margo Mulyo, Jalan Margo Utomo, dan Jalan Pangeran Mangkubumi. Mereka yang berjasa membantu di lapangan dan di balik layar: Mas Satwiko Budiono, Mbak Ega Rezeki Margaretha Barus, Mbak Dindadari Arum Jati, Mbak Seruni Eka, dan Mas Fajar Wijanarko.

Terima kasih yang mendalam kepada dosen dan akademisi senior di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia: Ibu Dr. Felicia Nuradi Utorodewo, Ibu Dr. Myrna Laksman, dan Bapak Dr. F.X. Rahyono, melalui pikiran kritis dan filosofisnya dari hal yang sifatnya teoretis dasar hingga praktis berkenaan Jawa dan Yogyakarta.

Terima kasih juga atas dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komunitas Toponimi Indonesia, Dr. Allan F. Lauder, Dr. Lilie Suratminto, Dr. Sri Munawarah, Nurni Wuryandari, Ph.D., Dr. Ninie Susanti, Dr. Taqyuddin, Dr. Zarmahenia Muhatta, Dr. Andriyati Rahayu, Inayah Wardany, S.Kom., M.Hum., dan Rizky Fardhyan, S.Hum., M.Si., yang mengawal banyak hal dalam penggalan isi buku yang juga didukung melalui hibah penelitian yang disediakan oleh FIB UI dan DRPM UI. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Jakarta, 24 Mei 2021

Tim Penulis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB I

Selayang Pandang Nama dan Penamaan Tempat



A. Selayang Pandang Mengenai Toponimi

Dalam kesehariannya, manusia tidak dapat lepas dari penggunaan nama, yang dalam bahasa Inggris disebut *proper names* atau *names*. Nama ataupun ikhtiar penamaan dikaji dalam sebuah disiplin ilmu yang disebut onomastika atau onomatologi (Lauder & Lauder, 2015). Menurut Van Langendonck dan Van de Velde (2016), kajian nama mencakup nama tempat (toponomastika atau toponimi), nama diri (antroponomastika atau antroponimi), nama-nama bulan, nama-nama merek dagang, nama-nama angka, nama-nama penyakit dan spesies biologi, serta *autonyms*. Meskipun demikian, toponomastika dan antroponomastika merupakan dua ranah yang paling banyak dikaji (Lauder & Lauder, 2015).

Urusan nama pun telah diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB atau United Nations/UN) melalui pembentukan sebuah divisi bernama United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Dalam perjalanannya, lembaga ini juga memberikan perhatian dan mengangkat isu tentang pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada dalam ragam nama-nama rupabumi (lebih lanjut lihat Lauder & Lauder, 2017). Toponimi juga

kerap disebut dengan istilah nama rupabumi. Menurut United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN, 2006), nama rupabumi didefinisikan sebagai nama yang disematkan pada unsur yang ada di bumi. UNGEGN juga menjelaskan bahwa nama rupabumi merupakan nama atau *proper name* (terdiri atas kata, kombinasi kata, ataupun ekspresi/ungkapan) yang biasanya digunakan dalam sebuah bahasa yang merujuk pada tempat atau area tertentu yang telah dikenali ciri khasnya di permukaan bumi.

Terdapat enam kategori utama nama rupabumi menurut UNGEGN, yaitu : 1) unsur bentang alam alamiah, seperti gunung bukit sungai, danau, tanjung, dan pulau; 2) tempat atau area berpenduduk dan berunsur lokalitas, seperti masjid, gereja, taman makam pahlawan, dan stasiun kereta; 3) pembagian administratif, seperti provinsi, kabupaten, dan kota; 4) area administratif, seperti taman nasional, suaka margasatwa, dan hutan lindung; 5) rute moda transportasi, seperti jalan, jalan raya, dan jalan setapak; serta 6) unsur-unsur yang dibangun, misalnya bandara, pasar, dan pelabuhan (lihat Rais dkk., 2008).

Di Indonesia, satu-satunya lembaga pemerintah utama yang mengintegrasikan informasi geospasial, yang salah satunya nama rupabumi, ialah Badan Informasi Geospasial (BIG—dahulu bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional/Bakosurtanal). Pada 2021, juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Peraturan Pemerintah ini menyebut 10 prinsip dalam melakukan penamaan rupabumi, yaitu 1) pemakaian bahasa Indonesia; 2) diperbolehkan memakai bahasa daerah atau asing asalkan memuat nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan; 3) pemakaian abjad Romawi; 4) satu nama untuk satu rupabumi; 5) menghormati identitas suku, ras, agama, dan golongan; 6) menggunakan tiga kata; 7) tidak menggunakan nama orang yang masih hidup atau menunggu hingga lima tahun bila ingin mengabadikan nama orang yang telah meninggal dunia; 8) menghindari penamaan menggunakan nama instansi/lembaga;

9) menghindari penamaan yang bertentangan dengan kepentingan nasional ataupun daerah; serta 10) memenuhi tata cara penulisan rupabumi dan spasial. Kendati demikian, terdapat perbedaan di antara apa yang dipraktikkan dan apa yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 ini.

Studi nama tempat dengan spesifikasi nama jalan disebut dengan studi odonimi. Odonimi dikategorikan sebagai mikrotoponimi atau cabang dari toponimi karena memiliki cakupan yang lebih sempit. Cakupan odonimi termasuk jalan raya (adimarga), bulevar, jalan arteri, jalan layang, jalan tol, jalan setapak, dan jalan gang. Neethling (2016) berpendapat bahwa fenomena nama dan penamaan jalan merupakan hal yang lumrah terjadi di seluruh dunia. Neethling juga mengemukakan bahwa studi odonimi mengkaji bagaimana dan mengapa nama-nama disematkan pada jalan. Biasanya nama jalan digunakan sebagai bagian dari alamat. Kewenangan dalam penamaan, perizinan, pendaftaran (*cataloguing*), dan standardisasi atas nama jalan dimiliki oleh pemerintah, meskipun dalam dinamika lain juga dapat dimiliki oleh pihak swasta (Toussaint, 2007). Salah satu kasus yang jamak diperbincangkan dalam ranah odonimi adalah tentang pergantian nama jalan.

Sebuah objek yang sama dapat saja berganti nama seiring berlalunya waktu. Hal ini tak terkecuali pada nama jalan. Nama jalan dapat berfungsi sebagai mesin waktu yang dapat mengartikan sebuah masyarakat masa dari era ke era melalui perubahan semiotiknya (Marin, 2012). Perubahan nama jalan juga dapat diartikan sebagai batas antara masa lalu dan masa depan yang diinginkan sebuah masyarakat. Di Indonesia, kita dapat menelusuri pergantian banyak nama jalan setelah kemerdekaan dideklarasikan. Nama yang sebelumnya bercorak kolonial, baik dari kategori nama (*weg, laan, boulevard, straat*) maupun penyematan nama-nama tokoh kolonial (Houtmanstraat, Orangeboulevard, Wilhelminaboulevard), umumnya telah berganti menjadi nama-nama tokoh lokal. Dalam perjalanannya, pertukaran kekuasaan antara Orde Lama dan Orde Baru telah diperkuat melalui penanda kelaziman pemberian nama-nama Pahlawan Revolusi

(seperti Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Kapten Tendean) (Rachman, 1999).

Alderman (2000) telah menyoroti isu-isu ketidakadilan sosial yang diwakilkan melalui praktik penamaan jalan. Di Amerika Serikat, terdapat nama Jalan Martin Luther King Jr., yang dalam analisisnya, Alderman dan Inwood (2018) menjelaskan bagaimana perjuangan kaum kulit hitam (*African American*) dalam menentang praktik diskriminasi berdasarkan pada rasial yang terjadi pada masa dahulu, dan mungkin masih bersisa hingga masa modern ini. Melalui pergantian nama jalan menjadi Jalan Martin Luther King, Alderman dan Inwood (2018) menilai upaya ini sebagai pembentukan ulang atas identitas Amerika Afrika dalam ranah perkotaan, relief atas memori sosial yang ada, kesadaran atas pelibatan yang lebih masif dalam partisipasi politik, dan inklusi sosial.

Sementara itu, di Indonesia juga terdapat kontroversi hingga penentangan sekelompok masyarakat yang ada di Surabaya karena pergantian ruas Jalan Dinoyo (menjadi Jalan Sunda) dan Jalan Gunung Sari (menjadi Jalan Prabusiliwangi) pada 2019. Masyarakat beralasan nama jalan yang diganti merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat lokal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia (lihat Erikha, 2021). Saat ini, kedua nama jalan telah muncul dalam Google Maps serta pemerintah telah mengklarifikasi bahwa ruas jalan yang diganti namanya bersifat parsial dan tidak keseluruhan.

Kembali ke konteks Indonesia, semangat untuk memperlihatkan identitas kultural di sejumlah daerah makin mengemuka sejak satu setengah dekade terakhir. Kita dapat menyaksikan penamaan pada plang jalan di tempat-tempat di Indonesia tidak hanya diganti menjadi nama-nama lokal, baik itu berbahasa setempat maupun memuat tokoh lokal, tetapi juga dilengkapi dengan penulisan aksara-aksara lokal. Di Riau, kita bisa melihat pemakaian aksara Arab Melayu, di Bandung dan di Yogyakarta kita dapat melihat aksara hanacaraka Sunda ataupun Jawa pada sisi bawah nama beraksara Latin (Erikha, 2018b). Sejumlah peraturan pemerintah daerah juga menguatkan

landasan penulisan nama jalan memakai aksara lokal ini, seperti di Surakarta terdapat Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 (Semarang), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 (Jawa Barat), hingga Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 (Bali) (lihat Bolodadi dkk., 2021) sehingga kita merasakan suasana kelokalan melalui unsur linguistik, misalnya saat berkunjung dan menyusuri sisi lanskap perkotaan.

Berdasarkan pada penelusuran literatur yang ada, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan nama jalan dan persinggungannya di masyarakat makin menggeliat. Akan tetapi, perkembangan ini masih terbatas dalam konteks di internasional semata, seperti kajian dengan latar Eropa, Amerika Utara, Sub-Sahara, Afrika, dan Asia (Rose-Redwood dkk., 2018). Sementara itu, dalam konteks Asia, terutama Indonesia, tentu masih sangat terbatas. Dalam realitasnya di negara ini, pergantian nama tempat, khususnya nama jalan, dari masa ke masa, tahun ke tahun, telah menghiasi perjalanan sosial politik dan budaya yang seakan-akan tak terhindarkan.

Jika kita kilas balik, pemerintah DKI Jakarta pernah mengusulkan pengubahan empat nama jalan yang mengitari Monas: Jalan Merdeka Utara menjadi Jalan Ir. Soekarno, Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Muhammad Hatta, Jalan Medan Merdeka Barat menjadi Jalan Ali Sadikin, dan Jalan Medan Merdeka Timur menjadi Jalan Soeharto (Administration to change, 2013), yang lebih lanjut menjadi kontroversial, khususnya pada penamaan Soeharto (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2013); penolakan pergantian nama Jalan Warung Buncit dan Mampang Prapatan menjadi Jalan A.H. Nasution, yang sedianya telah disosialisasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, berakhir dengan penundaan karena mendapatkan penolakan oleh masyarakat dan sejarawan Betawi (Erikha dkk., 2018).

Kajian pergantian nama jalan dalam latar Kota Yogyakarta yang dibahas di dalam buku ini diharapkan dapat mengajak pembaca untuk mengungkap lebih jauh urusan nama tempat ataupun nama jalan, yang ternyata tidak sesederhana urusan pengidentifikasian lokasi melalui satuan bahasa yang disematkan di lempengan besi dan

ditegakkan menggunakan tiang di ujung jalan semata. Tidak pula sekadar pelengkap informasi pada papan reklame atau nama gedung ataupun toko. Melalui nama jalan, kita dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Tanpa nama jalan, rasanya peta daring yang sering kita gunakan akhir-akhir ini akan serupa dengan peta buta. Tanpa nama jalan, sebuah ambulans yang mengangkut bantuan untuk menolong korban akan kesulitan untuk menjalankan tugasnya. Hal yang mungkin menurut penulis juga masih terbatas adalah bagaimana pentingnya nama jalan, serta kaitannya dengan upaya pergantian, direspons oleh masyarakat, ditangkap, dan dijelaskan dalam sajian pandangan berdasarkan pada studi ilmiah.

B. Toponimi di Yogyakarta dan Dinamikanya

Pada penelitian toponimi, khususnya di Kota Yogyakarta, terdapat sejumlah penelitian seperti yang dilakukan Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kota Yogyakarta pada 2004 dan dirangkum ke dalam buku *Toponim Kota Yogyakarta* (Gupta dkk., 2007). Hasil penelitian ini menceritakan peran toponimi sebagai representasi peninggalan sejarah budaya yang masih dapat dilacak keberadaannya. Tim penulis tidak hanya menjelaskan toponimi penting di dan sekitar Keraton Yogyakarta, tetapi juga menjelaskan toponimi yang berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Mataram Islam di sekitar Kotagede dan Plered; penjelasan sumbu imajiner yang filosofis dari Laut Selatan (Segara Kidul) hingga ke Gunung Merapi; serta sejumlah toponimi penting, seperti Masjid Gede, Masjid Pathok Negara, Pasar Beringharjo, dan Puro Pakualaman.

Pada 2019, Sulistyowati dan Priyatmoko memublikasikan buku *Toponim Kota Yogyakarta*, yang berisi sejumlah toponimi dengan klasifikasi nama *kemantren* atau serupa dengan pengategorian kecamatan pada daerah lain (berjumlah 14 *kemantren*), kelurahan (berjumlah 45 kelurahan), dan 113 nama kampung. Keunggulan buku ini adalah dilengkapi dengan peta titik yang diadopsi dari Peta Rupabumi Badan Informasi Geospasial dan foto plang nama-nama yang digunakan beserta penanda tempat, seperti *landmark* yang dianggap representatif.

Dalam Jayanti (2020), telah ditulis juga penjabaran dari struktur kebahasaan, makna toponimi, hingga kaitannya dengan budaya Keraton terhadap dua kategori, yaitu: Njeron dan Njaban Beteng Keraton Yogyakarta. Pada struktur kebahasaan, misalnya pemakaian sejumlah pola imbuhan pada toponimi. Terdapat delapan pola penamaan pada Njeron Beteng, seperti nama pangeran/putri bangsawan, keahlian abdi dalem, jabatan tertentu abdi dalem, abdi dalem kesatuan prajurit, flora, bangunan, petilasan, dan rupabumi. Adapun pola Njaban Beteng senada dengan pola Njeron Beteng, yang hanya ditambahi pola berbeda, seperti aktivitas, komunitas etnis, pekerjaan penduduk, benda kerajinan folklor, pola permukiman, dan harapan.

Selanjutnya, kita dapat meneropong bahasan tentang etimologi Malioboro dan Yogyakarta dalam Carey (2015) dan Noorduyn (2015) dalam bunga rampai mereka yang berjudul *Asal-usul Nama Yogyakarta dan Malioboro*. Pendekatan yang digunakan Carey dan Noorduyn adalah analisis etimologi, dengan menelusuri arsip kuno Jawa dan kamus Jawa Kuno. *Yogyakarta* sebagai nama tempat memperlihatkan ikon budaya Jawa yang terkoneksi dengan istana, keraton, dan pemakaian bahasa Jawa; sedangkan *Malioboro* menggambarkan isyarat perekonomian sekaligus sentra pasar tradisional di jantung Kota Yogyakarta. Kedua muasal nama tempat ini telah ditelaah berdasarkan pada disiplin linguistik dan sejarah (melalui kajian naskah-naskah kuno). Carey (1984) menerangkan bahwa Malioboro dapat berarti ‘jalan yang berhiaskan untaian bunga’, yang disadur dari bahasa Jawa (Sansekerta), yaitu *mâlyabhara*. *Mâlyâ* bermakna ‘karangan bunga’, ‘untaian bunga’, atau ‘tasbih’. Anasir ini dapat ditelusuri pada naskah *Râmâyana* yang berbahasa Jawa Kuno dan dibuat sekitar abad ke-9.

Pada 2013, sebuah perbincangan informal bergulir melalui media sosial Kaskus tentang pergantian nama-nama jalan di Kota Yogyakarta. Terdapat 673 komentar dan tanggapan Kaskuser—sebutan untuk anggota Kaskus—dalam menyikapi isu pergantian tersebut, dari setuju hingga tidak setuju, ataupun kritik dan optimisme terhadap pemerintah dan masyarakat Yogyakarta pada pergantian nama jalan. Hal menarik dari serangkaian diskusi itu adalah Kaskuser yang

memberikan tanggapan tersebut bukan hanya masyarakat Yogyakarta, melainkan juga mereka yang berasal dari luar Yogyakarta. Menurut Erikha (2017), hal ini mengindikasikan adanya ikatan psikologis antara nama dan identitas/memori/asosiasi seseorang/kelompoknya dengan Yogyakarta.

Kita mungkin kerap melihat bagaimana fenomena pergantian nama jalan dalam konteks Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, umumnya yang ditangkap adalah tarik-menarik dua pihak, yaitu pemerintah sebagai pihak otoritas yang mengganti nama dan anggota masyarakat yang memberikan resistansinya. Walaupun demikian, dapat dibilang masih sangat sedikit akademisi Indonesia yang mencoba menangkap dan menganalisisnya. Harapannya, studi ini dapat mengisi ceruk tersebut.

Toponimi tidak hanya berupa kosakata yang berfungsi sebagai simbol identifikasi tempat semata, tetapi juga mengandung makna kultural. Pada nama, kita dapat melihat bagaimana kearifan lokal diterapkan dan memiliki makna pragmatik. Sebuah nama sarat akan nasihat yang diperuntukkan bagi masyarakat lokal tempat nama tersebut diberikan. Artinya, buku ini diharapkan dapat merangkum keterhubungan nama sebagai bagian peranti bahasa dan budaya, dengan penggunaannya oleh masyarakat.

Pada tataran praktis, buku ini menjelaskan dinamika yang terjadi saat pemerintah daerah menggiatkan kembali sumbu filosofi melalui perubahan tiga nama jalan utama di Kota Yogyakarta. Perubahan nama jalan tentu bukan perkara sederhana. Oleh karena itu, melalui penelusuran mendalam kepada informan budayawan, sejarawan, pemerintah, dan tentunya masyarakat setempat, arah studi ini dapat menunjukkan dinamika hingga dampak yang terjadi setelah nama-nama jalan diubah, seperti bagaimana masyarakat merespons dan memaknai nama jalan yang lama dan yang baru, nama jalan apa yang condong mereka akan pilih, hingga seperti apa masyarakat mengaitkannya dengan sumbu filosofi tersebut. Dengan demikian, sebagai implikasinya, buku ini dapat memberikan sejumlah rekomendasi jika suatu saat pemerintah di daerah lain ingin memberlakukan

rencana perubahan nama jalan agar mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu agar prosesnya dapat berjalan lancar dan minim penentangan.

C. Penelusuran Toponimi

Sajian dari buku ini tidak lepas dari data yang telah ditelusuri penulis berupa informasi hasil wawancara serta literatur, peta, dan foto pemakaian nama pada lanskap jalanan. Pemilihan korpus data ini merupakan sumber yang sangat diperlukan dalam penelitian onomastika, khususnya toponimi (Trask, 2010; Taylor, 2016). Dalam riset-riset berlatar sosio-onomastika, data penelitian biasanya didapatkan melalui wawancara (Ainiala & Östman, 2017). Karena tidak semua anggota masyarakat yang ada dapat menjadi target wawancara tentang nama dan penamaan, perlu dipilih berdasarkan pada variasi sosiolinguistik yang relevan terhadap penelitian (Ainiala, 2016b). Aktivitas wawancara dilakukan dengan mengundang sejarawan dan budayawan, aparatur pemerintah terkait, serta warga masyarakat yang tinggal dan/atau beraktivitas di sekitar jalan-jalan yang dikaji. Lebih detail lagi, teknik wawancara dilakukan dalam dua bentuk: wawancara mendalam (*depth interview*) dan wawancara kelompok (*group interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan menggali informasi secara komprehensif dari pakar sejarah, budaya, dan aparatur pemerintah yang menguasai topik penelitian ini. Wawancara kelompok dilakukan pada perwakilan anggota masyarakat yang tinggal dan/atau beraktivitas di sekitar jalan-jalan yang diganti.

Penggalan informasi dilakukan menggunakan daftar pertanyaan terbuka (*open-ended question*) dan bersifat semi-terstruktur. Proses wawancara pun direkam agar selanjutnya ditranskrip. Hasil transkrip wawancara dipilah (kodifikasi) berdasarkan pada kebutuhan penelitian dan dianalisis menggunakan analisis wacana dan dikaitkan dengan pendekatan semiotik dan juga sosio-onomastika. Proses perekaman wawancara dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari narasumber sebagai pertimbangan etika penelitian. Penulisan nama informan masyarakat ditulis dengan nama samaran.

Selain itu, penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan makna kata toponimi yang bersumber dari kamus dan naskah klasik, dan sejumlah peta kuno hingga modern guna membandingkan bentuk dan varian toponimi dari masa ke masa.

Penulis juga melakukan dokumentasi visual melalui pemotretan penulisan nama jalan, baik yang dilakukan pemerintah melalui marka jalan maupun pihak swasta pada papan reklame/papan nama toko/kantornya. Pemotretan dilakukan menggunakan kamera pada ponsel pintar mengenai praktik penamaan dan penulisan nama di sepanjang nama jalan yang menjadi objek penelitian. Semua proses ini dilakukan pada 2017.

BAB II

Toponimi dan Masyarakat



A. Nama dan Tanda

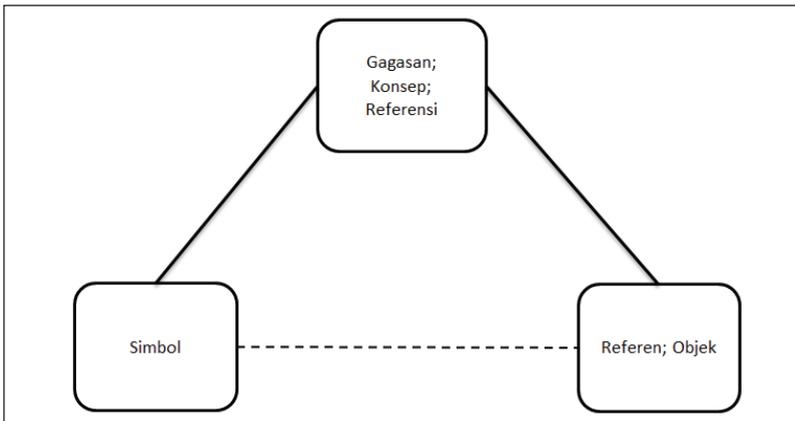
Semiotika, menurut Hoed (2014), ialah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia, sedangkan semiotika dalam Nöth (1990) diartikan lebih umum, yaitu ilmu yang mengkaji tanda-tanda. Adapun menurut Hidayat (2010), semiotika merupakan ancangan atau alat analisis guna menguraikan sebuah gejala. Semiotika juga dapat dijadikan sebagai teori dan pisau analisis pada berbagai tanda (*signs*) dan maknanya (*signification*). Dengan demikian, pendekatan ini selaras dengan ruang lingkup riset penulis yang akan mengkaji tanda-tanda yang disematkan dalam sebuah ruang sosial.

Barthes menjelaskan, setiap sistem semiotika mempunyai hubungan dengan bidang linguistik. Ia mencontohkan suatu gambar akan lebih memiliki makna jika dilengkapi dengan tulisan seperti halnya yang ditampilkan iklan, komik, dan bioskop. Tulisan bisa menjadi penanda sesuatu. Tulisan—yang merupakan bagian bahasa—tidak hanya lambang-lambang huruf semata, tetapi juga bagian dari wacana yang mengacu pada objek atau episode. Objek ini memiliki makna yang tersembunyi di dalam bahasa (Barthes, 1986).

Ogden dan Richards (1923) merupakan dua tokoh yang mengembangkan Teori Segitiga Semiotika. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah objek (referen) dan simbol atau lambang (hal yang disepakati atas referen) dipikirkan, kemudian dicerna oleh penafsir objek dan simbol tersebut ke dalam bentuk citra mental atau konsep (referensi). Adapun hubungan antara simbol dan pikiran merupakan hubungan langsung; begitu juga hubungan antara referen dan pikiran. Hubungan antara simbol dan referen merupakan hubungan tidak langsung dan biasanya digambarkan dengan garis putus-putus. Artinya, bahasa dan realitas bukanlah dua hal yang sama. Sebuah simbol yang direpresentasikan ke dalam kata-kata tidak sekadar sebuah carik atau penanda yang dilekatkan pada benda-benda, peristiwa, ataupun sebuah realitas. Simbol juga mencerminkan cara pandang masyarakat bahasa terhadap realitas.

Ogden dan Richards (1923, 21) juga memberikan penjelasan teori ini dalam konteks toponimi, khususnya pada papan penunjuk arah jalan:

If we stand in the neighbourhood of a cross road and observe a pedestrian confronted by a notice To Grantchester displayed on a post, we commonly distinguish three important factors in the



Sumber: Diadaptasi dari Ogden dan Richards (1923)

Gambar 1. Teori Segitiga Semiotika

situation. There is, we are sure, (1) a Sign which (2) refers to a Place and (3) is being interpreted by a person. All situation in which Signs are considered are similar to this.

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa sebuah arah jalan menjadi tanda simbol (*sign*) berupa leksikon atas objek atau jalan yang dirujuknya. Jalan Grantchester (sebagai simbol) dimaknai oleh seseorang yang tengah atau akan melintasi kawasan tersebut. Pemaknaan itu bersifat subjektif dan dialami oleh individu tersebut. Pemaknaannya dapat berupa asosiasi individu pada sejumlah objek, penduduk yang tinggal atau beraktivitas, sebuah peristiwa yang terekam dalam ingatannya, atau hal lain yang berkaitan erat pada referennya. Referen merujuk pada hamparan jalan yang membatasi kedua ujungnya, berikut objek yang terdapat pada sepanjang Jalan Grantchester. Dengan demikian, referen dan simbol dapat bersifat tunggal, sedangkan referensi dapat bersifat majemuk sesuai dengan pengalaman individu atas referen atau simbol itu.

Melalui penggalian mendalam kepada informan, penulis melihat konsep dan nilai-nilai filosofi yang membentuk dan dilekati pada nama jalan tersebut. Nama-nama jalan utama Keraton juga dinilai sebagai proposisi budaya yang dituangkan dalam Sumbu Filosofi. Selain itu, penulis dapat menggali hubungan sebab-akibat yang dimiliki antara nama jalan sebagai simbol atau lambang dengan konsep (referensi) yang dimuatnya. Dengan demikian, nama jalan tidak hanya menjadi penanda sebuah tempat, tetapi juga dapat memuat makna budaya yang telah digariskan oleh Keraton Yogyakarta.

Keterkaitan antara semiotika dan onomastika telah dibahas sejumlah peneliti. Koopman (2012, dalam Neethling, 2016) menjelaskan bahwa nama jalan telah menjadi bagian dari tanda dan simbol. Nama jalan sangat jelas terpampang dalam keseharian kita. Nama jalan juga hadir dan dapat ditemukan saat kita bepergian menyusuri perkotaan. Neethling juga menegaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara nama jalan dan semiotika. Berdasarkan pandangan ini, hubungan nama jalan dengan semiotika sebuah nama jalan

dapat menjadi sarana bagi ruang urban agar lebih berwibawa dan menjadikannya lebih bermakna bagi lingkungannya.

Smith (2016) telah membahas keterkaitan antara cakupan semiotika pada nama dan rujukannya. Nama pada dasarnya menjadi perujuk atas sebuah entitas yang diwakilkan melalui kata-kata. Meskipun tidak ada koneksi secara langsung, antara kata dan entitas yang diacu dapat tetap terhubung dengan apa yang ada di dalam pikiran pihak yang mencerapnya. Sepintas, pandangan Smith ini mirip dengan apa yang telah dibahas oleh Ogden dan Richards (1923) dalam konsep klasiknya, Segitiga Semiotika. Melalui referensi atas sebuah entitas, benak seseorang dapat membangkitkan sejumlah asosiasi lebih dari apa yang menjadi inti entitas tersebut. Pada titik ini, sebuah referensi dapat meliputi sejumlah hal yang disebabkan oleh asosiasi terhadap pengalaman-pengalaman yang didapat sebelumnya.

Penelitian lain yang mengaitkan antara semiotika dan nama tempat dilakukan oleh Wardany (2015) dengan judul *Toponimi Nama Stasiun Commuter Jabodetabek: Sebuah Kajian Linguistik*. Wardany melakukan penelusuran asal-usul 60 nama stasiun kereta pada 51 titik pengamatan. Informasi digali melalui literatur dan peta serta sumber oral sejumlah informan dan dianalisis menggunakan semiotika metabahasa dan konotasi milik Barthes (1986). Selain itu, Wardany menemukan nama stasiun yang telah menjadi mitos, seperti Kali Deres, Bojong Indah, Pesing, Grogol, Sudirman, Mangga Besar, Kemayoran, Pasar Senen, Kramat, Pondok Jati, Jatinegara, dan Tanjung Priok.

B. Onomastika dan Sosio-onomastika

Studi tentang nama dan penamaan, yang dikenal sebagai onomastika, merupakan disiplin yang dapat dianggap tua. Hough (2016) menjelaskan bahwa nama-nama dianggap sebagai sentral dalam kajian bahasa yang dikomunikasikan di antara sesama manusia. Jika ditarik ke belakang, Socrates, Plato, dan Aristoteles telah membahas bagaimana keterkaitan nama dengan referen atau rujukannya. Hal inilah yang

selanjutnya menjadi bahan kajian bagi para filsuf serta bahasawan atas ketertarikannya terhadap nama dan penamaan dalam konteks Barat.

Hough juga memaparkan bahwa nama dalam bahasa Inggris dikategorikan sebagai nomina ataupun frase nomina (NP) yang terkadang juga disebut sebagai *proper nouns* atau menurut Anderson (2007) sebagai *proper names* (selanjutnya disebut *nama*). Keterkaitan onomastika sebagai cabang linguistik juga telah ditegaskan oleh Algeo (2010) dalam artikelnya yang berjudul “Is a Theory of Names Possible?”. Algeo menyampaikan tujuh kritik sekaligus rekomendasi atas Teori Nama, yaitu onomastika mesti dapat menggambarkan keilmuannya dan pengategorian nama yang jelas; teori ini mesti menyajikan kerangka deskriptif dalam membedakan jenis-jenis nama; teori ini juga harus mampu berhadapan dengan pendekatan sinkronis ataupun diakronis; teori juga harus dapat mempertimbangkan kembali perbedaan antara mazhab Saussurian (*parole* dan *langue*) dan Chomskyan dalam menerapkan penamaan; teori ini juga harus dapat membedakan dirinya sendiri dengan teori lain yang bersekutu dengan onomastika, seperti geografi, kritik kesusastraan, filsafat, dan teori lain yang bersinggungan dengan penamaan; mampu memperlihatkan bagaimana sistem dari teori onomastika, seperti upaya penciptaan sebuah nama ataupun penggunaannya oleh manusia; serta teori juga harus bertujuan menemukan keuniversalan penamaan.

Toponomastika, sebagai cabang dari onomastika, membuat bahasanya tidak melulu pada nama tempat atau nama jalan (odonimi) semata, tetapi juga berlanjut pada nama-nama gedung/bangunan, nama pasar, merek dagang, nama binatang, nama angin topan, nama objek astronomis, nama kapal, dan nama organisasi (Van Langendonck, 2007). Adapun ruang lingkup nama juga terkait ke dalam semantik, sintaksis, pragmatik, dan sosio-onomastika. Oleh karena itu, kerangka teori yang terbentuk bersifat eklektik karena dipengaruhi oleh ide-ide linguistik kognitif. Toponomastika juga mencakup linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. Aspek linguistik diakronis dapat dicontohkan pada analisis penamaan dari satu waktu atau membandingkannya dengan waktu yang lain, atau dinamakan

juga dengan etimologi kata, sedangkan aspek linguistik sinkronis misalnya denotasi versus konotasi.

Dalam Rais dkk. (2008), bahasan toponimi berangkat dari bahasan geografi, khususnya pada unsur rupabumi, seperti gunung, bukit, sungai, tanjung, lembah, selat, dan pulau, yang telah diberi nama oleh manusia guna memudahkan identifikasi lingkungan fisiknya. Toponimi (*toponym*) sendiri diartikan sebagai nama tempat di muka bumi. Kata ini berasal dari bahasa latin, *tópos* (τόπος) yang berarti 'tempat' dan *ónoma* (ὄνομα) yang berarti 'nama' (Kostanski, 2009). Terminologi kajian toponimi telah disepakati menjadi toponomastika dalam International Congress of Onomastic Sciences pada 2011. Namun, pemakaian toponimi sebagai kajian tetap dianggap sebagai alternatif dan tetap digunakan oleh sebagian ilmuwan. Penggunaan toponomastika dilakukan karena toponimi sering kali dianggap rancu dengan makna lainnya, yaitu toponimi sebagai sinonim nama tempat (*place-names*) dan toponimi sebagai kajian nama tempat, sedangkan toponomastika ialah kajian yang membahas toponimi (Hough, 2016).

Toponomastika dalam perspektif sinkronis seperti yang telah dijelaskan melalui Teori Nama (Proper Names Theory) beririsan juga dengan perspektif diakronis (studi asal-usul kata) yang biasa disebut sebagai etimologi. Dalam bukunya yang berjudul *The Oxford Guide to Etymology*, Durkin (2009, 1) menyebutkan bahwa *etymology is the investigation of word histories*. Artinya, etimologi merupakan upaya penyelidikan asal-usul kata berdasarkan pada kesejarahannya, perubahan makna, ataupun penutur kata tersebut, melalui sejumlah metodologi linguistik berdasarkan pada bukti-bukti tertulis yang masih tertinggal. Melalui etimologi, kita dapat melihat bentuk kata arkais, perkembangannya, sampai akhirnya berubah rupa hingga digunakan pada masa sekarang. Durkin juga mengeksplorasi cakupan etimologi dalam sejumlah hal, seperti pelacakan sebuah sejarah kata secara linear, perubahan bentuk kata, perubahan makna kata, kata pinjaman, keterkaitan bahasa dengan genetis manusia penuturnya, kognat (kata yang berkerabat karena berasal dari sumber bahasa yang sama), rekonstruksi komparatif, serta perubahan bunyi kata.

Dalam perjalanannya, nama dan penamaan memiliki kategori tersendiri sesuai dengan budaya dan konteks sosial yang berlaku. Dapat juga dikatakan bahwa nama tidak hanya dimiliki oleh ilmu bahasa semata dan ilmu terkait lainnya, tetapi nama juga menjadi bagian dari masyarakat dan budaya. Nama-nama juga sering kali hadir sebagai bentuk interaksi dalam masyarakat, yang tentunya masyarakat linguistik, serta lingkungan di sekitar (Ainiala, 2016b). Dengan memberikan nama, seseorang tengah memberi rujukan terhadap individu atau tempat dan melekatinya dengan makna. Sering kali nama juga diberikan sebagai upaya mengontrol suatu lingkungan, sebagai penanda jejak eksistensi, ataupun membuatnya menjadi bagian dari kebudayaan.

Persinggungan nama dan masyarakat menghasilkan cabang baru yang disebut sosio-onomastika, sebuah cabang onomastika dan telah berkembang selama lima dekade terakhir. Ainiala (2016b, 448) telah menyebut Hans Walther sebagai sarjana yang pertama sekali menggunakan istilah sosio-onomastika dalam bahasa Jerman, *sozio-onomastik* pada 1971 lalu. Dalam sosio-onomastika, sebuah nama dan penamaan ditelusuri penggunaannya dalam masyarakat. Lebih lanjut, ditelusuri juga bagaimana nama memiliki sejumlah variasi, mengapa pemakaian sejumlah nama dihindari, sikap terhadap nama, serta bagaimana nama memiliki nilai rasa oleh penggunaannya (Ainiala & Östman, 2017). Singkat kata, Ainiala dan Östman (2017) menyebut sosio-onomastika sebagai studi sosiolinguistik terhadap nama-nama.

Dalam Hough (2016), sosio-onomastika dibagi menjadi sejumlah konsep yang masing-masing juga telah mengembangkan keilmuannya melalui penelitian-penelitian yang mendalam. Konsep-konsep tersebut, yaitu, 1) nama dalam masyarakat; 2) nama dan identitas; 3) lanskap linguistik; 4) kelekatan toponimik; 5) nama alamat; 6) nama samaran atau *pseudonyms*; serta 7) nama komersial. Dari tujuh poin tersebut, peneliti mengkhususkan diri pada tiga konsep sebagai pisau analisis, yaitu Lanskap Linguistik, Kelekatan Toponimik, dan Onomastika Setempat.

C. Lanskap Linguistik

Lanskap Linguistik atau *Linguistic Landscapes* (selanjutnya disebut LL) adalah kehadiran bahasa di antara ruang dan tempat. Puzev (2016) menggambarkan LL sebagai kajian interdisipliner atas kehadiran isu-isu bahasa yang berinteraksi dengan bahasa lain di dalam ruang publik. Meskipun LL merupakan istilah yang relatif baru dalam ranah studi linguistik terapan, konsep ini telah beririsan dengan sejumlah konsep lain, seperti sosiolinguistik, kebijakan bahasa, multilingualisme, semiotika, sastra, geografi budaya, pendidikan, dan psikologi sosial. Di dalam ragam interaksinya, kita seakan-akan ditunjuki seperti apa konstruksi simbolis yang terjadi di antara pemakaian bahasa, relasi sosial, dan politik. Hal ini ditegaskan pula oleh kutipan Gorter (2006, 3) bahwa *LL refers to linguistic objects that mark the public space*.

Landry dan Bourhis (1997) telah menjelaskan dua fungsi LL, yaitu fungsi informasional dan fungsi simbolis. Fungsi informasional mengindikasikan sebuah penanda yang berfungsi membedakan sebuah wilayah geografis penduduk yang disematkan melalui nama. Singkat kata, nama yang juga memiliki unsur bahasa telah berfungsi sebagai penanda sebuah wilayah dan sebagai pembeda dari wilayah lain yang mungkin berbeda pula secara bahasa. Fungsi simbolis digambarkan melalui pemakaian sebuah bahasa merepresentasikan identitas kelompok yang ditengarai ada di sekitar tempat tersebut. Blommaert (2013) menyebut sebuah ruang dapat menjadi arena atas interaksi sosial para manusia yang ada di dalamnya guna menjalankan aktivitas budaya mereka. Melalui bukti bahasa tulisan yang ada, kita dapat melihat seperti apa pola komunikasi anggota masyarakat yang ada.

Segecap tanda di ruang publik menggambarkan tatanan ruang tempat ia bekerja. Fitur sosiologis, kultural, sosiolinguistik, dan politik di sebuah ruang akan menentukan cara tanda-tanda terlihat dan beroperasi, serta memainkan perannya dalam organisasi dan regulasi keruangan. Tanda-tanda di dalam ruang publik memiliki kekuatan untuk memaksa audiensnya mematuhi aturan yang telah dibuat dalam pedoman bersama (Blommaert, 2013). Tentunya pembuatan tanda

berikut pedoman atau aturan tersebut dilakukan tidak tanpa alasan. Menurut Stroud dan Mpendukana (2009), sebuah tanda mempunyai pesan tersendiri dan tidak pernah netral, memiliki koneksi dengan struktur sosial yang ada, termasuk di dalamnya hierarki ataupun kekuasaan. Dengan demikian, kita dapat melihat ruang publik sebagai sebuah area sekaligus alat yang dikendalikan oleh kekuasaan.

Ruang publik sangat berbeda dengan ruang privat, seperti halnya kita membedakan jalan yang ada di depan rumah kita dengan kamar tidur. Ruang publik merupakan ruang untuk berbagi dengan orang-orang lain, atau bisa juga ruang yang dikehendaki oleh pihak yang berwenang. Umumnya, mereka yang berwenang atas kepemilikan ruang publik berhak mengatur seperti apa teknis pemakaiannya (Blommaert, 2013).

Nama jalan dapat dikatakan sebagai sebuah pesan yang merefleksikan komunikasi mereka yang membuat dan menerima pesan. Jika dikaitkan dengan konteks pergantian nama-nama jalan di Yogyakarta, pesan komunikasi dibuat dan disampaikan oleh Keraton Yogyakarta melalui peraturan pemerintah daerah setempat. Blommaert (2013) mengemukakan bahwa komunikasi yang terjadi di ruang publik tidak lain merupakan bentuk komunikasi pada ranah relasi kuasa dan bersifat sosiolinguistik. Sebagai contoh, tidak lama setelah Indonesia merdeka, banyak tempat di Indonesia mengganti nama-nama jalan/tempat yang awalnya bercorak Belanda menjadi nama-nama yang bercorak lokal. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Blommaert (2013, 40) *how does space organize semiotic regimes of language?* Semua tanda yang dikomunikasikan melalui plang nama jalan telah menggambarkan praktik pewacanaan atas ideologi (Blackwood & Tufi, 2015).

Ketika membahas tanda, kita akan sulit melepaskannya dari bahasan semiotika. Plang nama jalan dianggap sebagai penanda di dalam ruang. Dalam pembahasan Ogden dan Richards (1923), telah disinggung tentang sebuah konsep (referensi) yang merepresentasikan objek (referen), yang diwakilkan oleh lambang atau simbol bahasa.

Dengan demikian, konsep semiotika memiliki andil tersendiri dalam lingkup LL. Kehadiran nama jalan dapat dikaji menggunakan konsep geosemiotika. Geosemiotika merupakan kajian atas pemaknaan sosial terhadap penempatan material tanda-tanda, muatan wacananya, serta sikap terhadap dunia material tersebut. Konsep geosemiotika bermula dari evaluasi atas ruang fisik bukanlah sebagai latar semata, melainkan bagian dari sebuah teks (Scollon & Scollon, 2003).

Dalam kajian onomastika, urusan toponomastika memiliki kaitan erat dengan LL. Nama atau plang nama jalan merupakan bagian atau objek yang ada di lanskap, dan dianggap bentuk hubungan di antara bahasa, ruang, dan tempat. Di dalam konsep LL juga dibahas situasi yang berhadapan-hadapan, seperti relasi di antara bahasa minoritas dan mayoritas (Marten dkk., 2012) serta penguatan bahasa lokal melalui pergantian nama tempat yang berdampak pada sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat (lihat Kostanski, 2009), ataupun hubungan di antara LL, nama tempat, dan kebijakan bahasa yang ada yang memicu konflik (Puzey, 2016).

D. Kelekatan Toponimik

Kelekatan Toponimik menjadi pisau analisis kedua dalam buku ini. Kelekatan Toponimik (*Toponymic Attachment*) merupakan teori yang digagas oleh Kostanski (2009) dari disertasinya yang berjudul “What’s in a name?’: A case study of the Grampians (Gariwerd) National Park name restoration process Place and Toponymic Attachment, Identity and Dependence”. Kelekatan Toponimik diartikan sebagai asosiasi positif ataupun negatif terhadap toponimi yang nyata ataupun toponimi yang imajiner. Teori ini dibangun berdasarkan pada teori Kelekatan terhadap Tempat (*Place Attachment*) yang dikembangkan oleh Low dan Altman (1992) dan disempurnakan oleh para teoretikus selanjutnya, seperti Williams dan Vaske (2003) serta Raymond dkk. (2010). Low dan Altman (1992) mencatat bahwa tempat merujuk pada ruang yang telah diberi pemaknaan oleh seseorang, kelompok ataupun budaya. Artinya, melalui perubahan ruang (*space*) menjadi

tempat (*place*), sebuah geografi telah dilekati makna tertentu. Singkat kata, Kelekatan terhadap Tempat diartikan sebagai nilai rasa terhadap tempat (*sense of place*).

Kelekatan Toponimik dibangun atas dua unsur, yaitu identitas toponimik (*toponymic identity*) dan ketergantungan toponimik (*toponymic dependence*). Identitas toponimik berkaitan dengan identitas terhadap tempat dan sangat emosional (psikologis) bagi seseorang (Williams & Vaske, 2003). Identitas terhadap tempat juga menjadi simbol hubungan antara fisik suatu tempat dan psikis penghuninya. Identitas toponimik terdiri atas empat hal, yaitu kesejarahan dan memori, komunitas, emosi, serta peristiwa dan kegiatan. Keempatnya saling memengaruhi dalam identitas toponimik seseorang ataupun kelompok.

Unsur selanjutnya adalah ketergantungan toponimik (*toponymic dependence*). Ketergantungan toponimik adalah ketergantungan seseorang pada fungsi-fungsi dari toponimi itu sendiri, seperti seorang sopir taksi yang menguasai ruang kota melalui nama-nama tempat yang ada, baik nama tempat yang resmi (ada di dalam peta) maupun nama tempat yang nonresmi (kesepakatan masyarakat dan tidak ada di peta).

Ketergantungan toponimik dibagi menjadi tiga hal, yaitu promosi, lokasi, dan alat identifikasi. Sebagai contoh, sebuah toponimi dapat berfungsi sebagai alat promosi pariwisata (pemasaran); toponimi dapat menjadi lokasi sebuah tempat dan memudahkan fungsi komunikasi sehari-hari; toponimi sebagai alat identifikasi yang bermanfaat pada *global positioning service* (GPS).

Dalam buku ini, pisau analisis Kelekatan Toponimik digunakan melalui analisis wacana komentar masyarakat berkenaan perubahan nama-nama jalan. Penulis menelisik kelekatan masyarakat terhadap nama jalan melalui subkonsep identitas toponimik, seperti nilai historis, memori pribadi yang diasosiasikan, peristiwa yang pernah terjadi, emosi yang muncul saat membahas nama tersebut, dan kaitannya dengan jati dirinya sebagai bagian sebuah komunitas atau etnis. Kelekatan masyarakat terhadap nama juga ditelusuri melalui ketergantungan

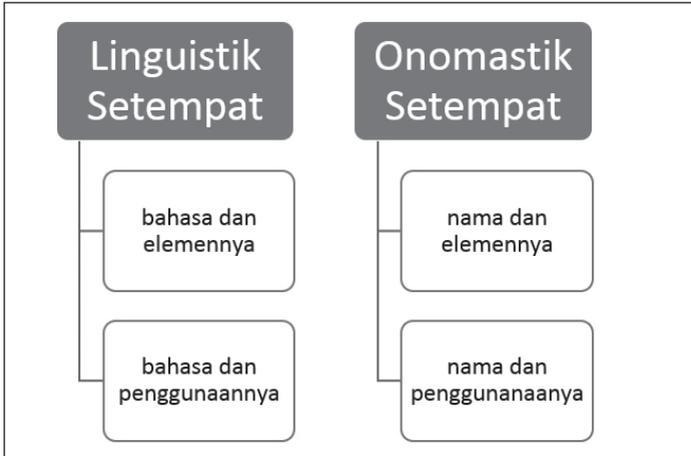
mereka saat menggunakan nama jalan. Misalnya, bagaimana sebuah nama jalan dapat digunakan untuk mempromosikan kawasan atau perekonomian wilayah di sekitarnya. Ini berhubungan dengan citra positif yang telah terbangun pada nama jalan.

E. Onomastika Setempat

Pada Kelekatan Toponimik, kita dapat melihat bagaimana kelekatan nama dapat diukur melalui identitas dan ketergantungan toponimik yang telah tertanam dengan baik dalam kognisi masyarakatnya. Sementara itu, Onomastika Setempat (*Folk Onomastic*) berfokus pada bagaimana sebuah toponimi, khususnya odonim, hidup dan digunakan oleh penduduk setempat dalam kehidupan sehari-hari.

Pada awalnya, nama dikaji berdasarkan pada aspek kebahasaan, sejarah, dan geografinya saja. Bagaimanapun, dalam perkembangannya, kita tidak dapat menegasikan aspek sosial dan juga budaya (Ainiala, 2016b). Aspek sosial pada nama menggambarkan interaksinya di tengah masyarakat, dimaknai dan digunakan dengan berbagai cara. Penelitian ini mengadopsi konsep Onomastika Setempat yang dikembangkan oleh Ainiala (2016a) dalam artikel yang berjudul “Attitudes to Street Names in Helsinki”. Onomastika Setempat mengeksplorasi bagaimana nama berdasarkan pada aspek kebahasaannya, dan bagaimana nama digunakan. Pada awalnya, konsep Onomastika Setempat terinspirasi dari konsep Linguistik Setempat (*Folk Linguistic*) yang membicarakan bagaimana masyarakat membahas bahasa: membicarakan bahasa dan penggunaannya (Niedzielski & Preston, 2000). Ranah Linguistik Setempat ini pun masih termasuk ke dalam dimensi sosiolinguistik (Ainiala dkk., 2016). Oleh karena itu, Ainiala (2016b) mengembangkannya dengan menjadikan nama sebagai objek kajian pada Onomastika Setempat. Secara ringkas, kedua konsep ini digambarkan ke dalam skema Gambar 2.

Dalam Ainiala (2016a), penelitian sosio-onomastika dilakukan dengan mengkaji nama-nama jalan dan sikap masyarakat di Helsinki. Penelitian ini menggali tiga hal, yaitu bagaimana nilai rasa masyarakat di Helsinki terhadap nama-nama jalan di sekitar lingkungan tempat



Sumber: Diadaptasi dari Ainiala (2016a)

Gambar 2. Teori Konsep Linguistik Setempat dan Onomastika Setempat

tinggalnya, nama jalan mana saja yang disukai dan tidak disukai; mengkaji bagaimana mereka memberikan justifikasi sikap tersebut; dan bagaimana sikap masyarakat terhadap nama jalan. Berdasarkan perspektif Onomastika Setempat, nama dan elemennya ditelusuri melalui nilai rasa suka ataupun tidak suka, makna nama, keterkaitannya dengan sejarah asalnya, hingga asosiasi nama dengan hal lain. Nama dimaknai tidak hanya dari arti linguistiknya, tetapi juga dimaknai dengan hal-hal yang berkaitan dengan nama tersebut. Sikap orang-orang terhadap nama merefleksikan nama itu sendiri.

Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana sebuah toponimi dimaknai oleh masyarakatnya. Kalijodo, sebuah toponimi di daerah Jakarta, pada awalnya diasosiasikan sebagai tempat rekreasi dan juga tempat mencari pasangan bagi muda-mudi yang belum mempunyai pasangan. Lalu persepsi yang netral ini bergeser menjadi negatif sejak lokasi ini dijadikan area perjudian, penjualan minuman keras, dan bahkan diperkuat sebagai area prostitusi. Pada 2016, bar dan tempat prostitusi Kalijodo telah dibongkar dan dialihfungsikan menjadi

Ruang Publik Terbuka Ramah Anak Kalijodo atau sering disebut dengan RPTRA Kalijodo (Susanti dkk., 2016).

Berikutnya, pada aspek nama dan penggunaannya, nama yang dicontohkan dengan kepraktisan dan ketidakpraktisan sebuah nama, dan variasi yang timbul oleh pengguna nama. Variasi nama juga dapat muncul karena keberagaman latar masyarakat, baik etnik maupun bahasa yang digunakan. Fenomena ini membuktikan bahwa nama bukanlah sesuatu yang statis, konstan, ataupun stabil, melainkan merupakan variabel yang dapat berubah. Dalam studi yang berkaitan dengan kompetensi toponimik seseorang, sering kali diperlihatkan bahwa sebuah tempat dapat dirujuk dengan nama A oleh suatu komunitas, sedangkan pada komunitas lain mereka merujuknya dengan nama B (Ainiala, 2016b: 449).

Studi lain juga dilakukan guna menggali bagaimana Helsinki sebagai nama ibu kota Finlandia memiliki dua varian nama yang tidak resmi, yaitu Hesa dan Stadi (Ainiala & Lappalainen, 2017). Kondisi seperti apa yang membuat para masyarakat menggunakan nama Helsinki, serta kondisi seperti apa yang muncul setelah penggunaan Hesa dan Stadi, juga ditelusuri lebih lanjut. Faktor-faktor penting, seperti asal daerah informan, apakah merupakan asli Finlandia atau pendatang, menjadi pertimbangan dalam studi ini. Selain itu, faktor konteks sosial dan kepada siapa mereka sedang berbicara menjadi poin lain yang penting sehingga terdapat perbedaan penggunaan di antara nama-nama tersebut. Masih dalam publikasi yang sama, yang berjudul “Socio-onomastic The Pragmatic of Names”, Ainiala dan Halonen (2017) dalam artikelnya membahas mengenai persepsi terhadap nama-nama tempat berlatar Somalia di Helsinki, yaitu Mogadishu dan Mogadishu Avenue. Studi ini menggali dua pendapat dari dua kelompok berbeda: pemuda imigran dari Somalia dan masyarakat asli Finlandia tentang kedua nama yang berlatar Somalia tersebut.

Sebuah studi dilakukan oleh Kostanski (2016a) tentang pengembalian nama-nama tempat menjadi nama-nama asalnya, yaitu nama berlatar Aborigin di Victoria, Australia. Pengembalian nama memunculkan dinamika yang kompleks di antara masyarakat, baik

masyarakat Aborigin maupun masyarakat pendatang (koloni Inggris). Dinamika ini tidak terlepas dari telah terbangunnya kelekatan antara masyarakat pendatang dan nama yang diberikan oleh para leluhurnya yang datang pertama sekali ke Australia, serta ketercerabutan antara ikatan masyarakat Aborigin dan sejarahnya yang pernah eksis sebelum para koloni datang pada 1836 (lebih lanjut lihat Kostanski, 2009).

Serupa dengan Kelekatan Toponimik, penelusuran aspek Onomastika Setempat dilakukan melalui analisis informasi dari masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar nama yang telah diubah. Penulis mendalami apa komentar yang muncul serta menggali apa pemaknaan dan penggunaan mereka terhadap nama.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB III

Filosofi Sangkan Paraning Dumadi



Keraton merupakan bentuk kerajaan yang konsentris. Keraton pun dianggap sebagai pusat segala hal. Lombard (2008) menjelaskan bahwa keraton yang berada pada pusat lingkaran dianggap sebagai kutub positif, sedangkan pinggiran seperti pantai atau pesisir sebagai kutub negatif. Konsep lingkaran yang konsentris ini telah dimulai sejak abad ke-9, tepatnya saat berkembangnya Buddha di Nusantara. Lambat laun, konsep ini diadopsi pada zaman Mataram. Contohnya pada komposisi keraton yang menaruh bagian tengah sebagai kediaman raja dan tempat pemerintahannya (*parentah jero*). Di sekitar keraton, terdapat ibu kota dengan nama lainnya, *nagara*, mengacu pada konsep negara. Di sekitar ibu kota, terdapat *nagaragung*, yang berarti ‘ibu kota besar’, yang dalam pengertian Lombard sebagai ibu kota dalam arti yang lebih luas. Dampak dari kerajaan yang konsentris ialah mulai berkembangnya kelompok masyarakat dengan ditandai dengan penambahan jumlah penduduk dan luas wilayah. Konsep lingkaran konsentris ini dapat dikaitkan dengan konsep lain, yaitu mikrokosmos dan makrokosmos (Behrend, 1989).

Penjabaran tentang keraton dan lingkaran konsentris tidak terkecuali pada Keraton Yogyakarta. Keraton ini didirikan pada 7 Oktober oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengku Buwono (Darmosugito, 1956; Priyono dkk., 2015) dan selanjutnya menjadi cikal-bakal Kota Yogyakarta. Kosmologi dan filsafat Jawa menjadi unsur dalam desain Keraton. Hal ini ditunjukkan dari penentuan lokasi yang dipilih berdasarkan pada konsep mikrokosmos (*jagad cilik* atau dunia kecil), sedangkan tatanan pusat kota disusun berdasarkan pada filosofi Jawa mengenai takdir manusia. Dengan demikian, setiap komponen pada Kota Yogyakarta memiliki makna filosofis.

Pusat Kota Yogyakarta terletak di antara dua penanda alam, yaitu Gunung Merapi dan Laut Selatan (atau Segara Kidul dan Samudra Hindia). Kedua penanda alam ini merupakan unsur penting dalam kosmologi Jawa, yang nantinya disebut sebagai makrokosmos (*jagad gede* atau dunia besar). Kota ini juga diapit oleh tiga sungai pada sisi timur, yaitu Kali Code, Kali Gadjahwong, dan Sungai Opak, sedangkan pada sisi barat terdapat Kali Winongo, Kali Bedog, dan Sungai Progo. Kosmologi Hindu-Jawa menilai komposisi ini sebagai cerminan alam semesta yang terdiri atas Gunung Mahameru (lihat Behrend, 1989) di tengah, yang dikelilingi cincin-cincin dari laut dan daratan. Ini menjadi pijakan Sultan Hamengku Buwono I memilih hamparan dataran ini sebagai tempat yang paripurna untuk membangun istananya.

Mikrokosmos yang dilambangkan dalam lanskap Kota Yogyakarta dianggap sebagai mikrokosmos dan merupakan perjalanan takdir manusia. Terdapat tiga takdir manusia dalam filsafat Jawa yaitu 1) setiap manusia harus mengetahui asal-usul dan tujuan akhir kehidupannya (*sangkan paraning dumadi*) dan mengikuti siklus hidup tersebut; 2) selama hidupnya, manusia mesti menjaga harmonisasi hubungan antara Tuhan, manusia lain, dan alam (*hamemayu hayuning bawono*); serta 3) sangat dekatnya perasaan manusia dengan Tuhan sehingga mengesankan satu-kesatuan di antara hamba dan Sang Pencipta (*manunggaling kawula gusti*) (Priyono dkk., 2015).

Keraton dianggap sebagai pusat semua kegiatan kehidupan masyarakat (Khairuddin, 1995). Hal ini ditunjukkan melalui peran keraton pada aspek-aspek utama, seperti pusat kegiatan budaya, keagamaan, perekonomian, dan militer. Perkembangan yang makin pesat ini menjadikan keraton sebagai *pancer* atau *puser* bumi serta representasi miniatur atas makrokosmos. Sebuah komentar dari Surjoudjojo (1966, dalam Behrend, 1989, 174) menyebutkan "*The Sultan... in the center of the keraton and therefore of the world*". Komentar ini menguatkan peran Sultan sebagai sentral dari konsep mikrokosmos karena menjadi miniatur Keraton sebagai sentral pada konsep makrokosmos.

Dalam Tanpoaran (1978) dijelaskan bahwa *sangkan* disebut sebagai *asal*, sedangkan *paran* ditafsirkan sebagai *ketentuan*. *Ketentuan* semakna dengan *takdir* atau *garis hidup manusia (dumadi)*. Filosofi *sangkan paraning dumadi* ini berjalan dengan baik jika masyarakat dapat memahami dan mengamalkannya. Mengutip Tanpoaran tentang hakikat filosofi ini: "hanya pribadi yang menyadari diri dalam unsur dan keadaannya, sehubungan dengan asal ketentuannya, akan mempunyai niat dan tekad untuk mendalami pertanyaan hidup sepanjang masa. Mengapa ini dilahirkan di dunia?" Hal ini menyiratkan pentingnya kesadaran manusia tentang siapa dia, dari mana ia berasal, dan tujuan (ketentuan) yang akan ia tuju. Dengan menggunakan istilah "ketentuan", yang juga bermakna 'takdir', Tanpoaran tidak mengaitkan ini sama sekali dengan hal ihwal kematian. Tanpoaran menjelaskan, *paran* bukanlah kematian sebagaimana yang ditafsirkan oleh manusia itu sendiri, tetapi ia mengingatkan bahwa *paran* merupakan upaya manusia untuk memelihara hubungan antara *kawula (hamba)* dan *gusti (Tuhan)*. Wadah *sangkan paraning dumadi* adalah hubungan antara *kawula* dan *gusti*.

Tujuan filosofi *sangkan paraning dumadi* adalah kembali kepada Tuhan sebagaimana yang menjadi tujuan dari *paran* atau *ketentuan hidup*. Kembali kepada Tuhan juga disebut sebagai *manunggaling kawula gusti*. Dalam contoh yang diberikan tentang Kisah Dewaruci, Magsis-Suseno (1988) menganalogikan manusia harus sampai kepada sumber airnya jika menginginkan kesempurnaan dalam hidup

dan sampai pada realitas yang paling mendalam. Sumber air yang dimaksudkan sebenarnya sama dengan batin diri manusia itu sendiri. Hakikat manusia pun berasal dari keilahian. Oleh karena itu, diperlukan penghayatan akan kesatuan hakiki antara hamba (*kawula*) dan Tuhan (*gusti*).

Secara geografis, *sangkan paraning dumadi* diwujudkan ke dalam sumbu filosofi yang terbentang lurus dari selatan (ditandai dengan Laut Selatan/Segara Kidul), tengah (ditandai dengan Keraton), dan utara (ditandai dengan Gunung Merapi). Ini selaras dengan konsep Tri Hita Karana dan Tri Angga (*parahyangan-pawongan-palmahan* atau *hulu-tengah-hilir* serta nilai *utama-madya-nistha*) (Priyono dkk., 2015).

I.E. Hadiyanta (komunikasi personal, 2 Oktober 2017) menyebut ini sebagai konsep makrokosmos dalam arti perjalanan manusia dari awal hingga akhir dengan cakupan penanda yang luas, dari Laut Selatan menuju Gunung Merapi di sebelah utara Yogyakarta. Hadiyanta juga menjelaskan bahwa makrokosmos ini sama dengan istilah “garis poros imajiner”. Imajiner serupa dengan konsep makrokosmos karena tidak ada penanda fisik dalam garis tersebut, berbeda halnya dengan Sumbu Filosofi yang terdiri atas tiga penanda fisik, yaitu Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi.

Secara simbolis, sumbu atau garis poros imajiner ini mencerminkan hubungan manusia dan Tuhan yang selaras dan seimbang, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun min Allah*), hubungan manusia dengan manusia lain (*hablun min annas*), dan hubungan manusia dengan alamnya yang tecermin dalam lima unsur pembentuk: api (*dahana*) disimbolkan dari Gunung Merapi, tanah (*bantala*) dari bumi Yogyakarta, air (*tirta*) dari laut selatan, angin (*maruta*), dan angkasa (*ether*). Gunung Merapi juga dianggap sebagai simbol kesempurnaan manusia (*kasampurnaning ngaurip*), yaitu manusia sejati yang memiliki pancaran rohani yang teguh dan tak tergoyahkan seperti teguhnya Gunung Merapi. Bentuk gunung yang menjulang tinggi menjadi tujuan yang hendak dicapai manusia dalam garis kelangengan (Gupta dkk., 2007).

Dalam buku berjudul *Yogyakarta City of Philosophy* yang diterbitkan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa *sangkan paraning dumadi* dibagi menjadi dua, yaitu *sangkaning dumadi* dan *paraning dumadi*. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang *sangkaning dumadi* (Priyono dkk., 2015).

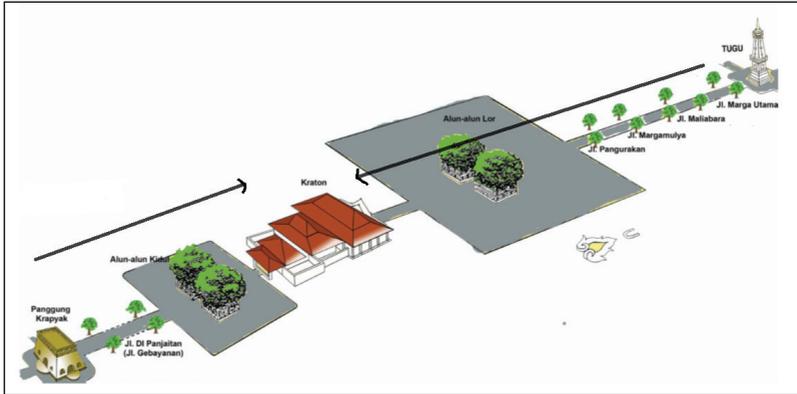
a. *Sangkaning Dumadi*

Sangkan berarti 'tempat asal' (Tanpoaran, 1978; Zoetmulder, 1995), sedangkan *dumadi* bermakna 'makhluk' (Prawiroatmodjo, 1981). Dengan demikian, *sangkaning dumadi* berarti 'asal-usul manusia'. Terkait dengan filosofi, *sangkaning dumadi* berarti perjalanan manusia, yang disimbolkan pada nama tempat dan nama jalan sebagai berikut: Panggung Krapyak, Jalan D.I. Panjaitan, Alun-alun Kidul, hingga menuju Keraton. *Sangkaning dumadi* dimaknai sebagai perjalanan manusia sejak masih berada di dalam kandungan hingga beranjak remaja. Garis lurus menuju Keraton bermakna Keraton sebagai tujuan sehingga seorang anak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya.

b. *Paraning Dumadi*

Paran berarti 'tujuan', 'ke mana' (Tanpoaran, 1978), sedangkan *dumadi* berarti 'makhluk' (Prawiroatmodjo, 1981). Jadi, *paraning dumadi* dapat diartikan sebagai tujuan seorang manusia. Filosofi *paraning dumadi* digambarkan dari Tugu Pal Putih menuju Keraton. Sepanjang ini dimaknai dengan jalan yang dipenuhi godaan dunia, seperti kepangkatan ataupun jabatan (disimbolkan oleh Kantor Kepatihan atau Kantor Gubernur DI Yogyakarta), kekayaan, dan wanita (disimbolkan dengan Pasar Beringharjo). Jalan lurus ini juga melambangkan manusia yang dekat dengan penciptanya (lihat juga Priyono dkk., 2015).

Sepanjang sumbu ini, terdapat empat jalan utama dari utara menuju Keraton, yaitu Jalan Margo Utomo (d.h Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Maliboro, Jalan Margo Mulyo (Jalan Jenderal Ahmad Yani), dan Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora). Keempat jalan ini merupakan jalan-jalan utama kerajaan atau *râjamârga* (Darmosugito,



Ket.: *Sangkaning dumadi* pada panah kiri ke kanan; *paraning dumadi* pada panah kanan ke kiri.
 Sumber: Priyono dkk. (2015)

Gambar 3. Ilustrasi filosofi *sangkan paraning dumadi*

1956; Carey, 1984; Carey, 2015) karena menjadi jalan utama saat tamu-tamu kerajaan hendak memasuki Keraton.

Jika kita perbandingan, terdapat dua varian pemahaman Sumbu Filosofi. Hadiyanta (2000) menyebutnya sebagai poros imajiner yang terbentang antara Laut Selatan, Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, Tugu Pal Putih, dan Gunung Merapi. Menurut I.E. Hadiyanta (komunikasi personal, 2 Oktober 2017), pencantuman istilah “imajiner” dilakukan karena hanya Panggung Krapyak, Keraton, dan Tugu yang menjadi penanda konkret, sedangkan Laut Selatan dan Gunung Merapi dianggap sebagai penanda imajiner. Hadiyanta menekankan filosofi selatan ke utara yang menggambarkan perjalanan hidup manusia sejak masih dalam perut ibunya, lalu dilahirkan, dan menjadi kanak-kanak, telah ditandai melalui bangunan Panggung Krapyak, dilanjutkan dengan jalan lurus hingga ke Keraton. Filosofi dari Keraton ke Tugu merupakan perjalanan yang paripurna karena keberadaan raja yang menyertainya. Sumbu Filosofi yang menjadi dasar pergantian nama-nama jalan di Yogyakarta telah dikaji melalui penelusuran literatur dan perbandingan informasi dari narasumber penelitian. Filosofi *sangkan paraning dumadi* sebagai perjalanan asal

dan tujuan manusia dikemukakan oleh Priyono dkk. (2015) dan diilustrasikan pada Gambar 3. Priyono dkk. mengemukakan filosofi dalam konteks mikrokosmos yang menjadikan Keraton sebagai sentra atau poros. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa *sangkan paraning dumadi* terbagi menjadi dua, yaitu *sangkaning dumadi* (dari Panggung Krapyak menuju Keraton) dan *paraning dumadi* (dari Tugu Pal Putih menuju Keraton). Penjelasan ini menitikberatkan pada manusia, raja sebagai tujuan, manusia menjadi raja, bukan dititikberatkan pada perjalanan kembali/menjuju Tuhan. Namun, pada literatur sebelumnya, filosofi ini mengacu pada konteks makrokosmos, yaitu dari Laut Selatan, Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, Tugu Pal Putih, hingga Gunung Merapi (Gupta dkk., 2007). Penjabaran ini juga selaras dengan informasi I.E. Hadiyanta (komunikasi personal, 2 Oktober 2017) bahwa terdapat dua konteks dalam menafsirkan *sangkan paraning dumadi*, baik dari konteks mikrokosmos maupun makrokosmos.

Selain itu, penggantian nama jalan tidak dapat dilepaskan dari upaya menjalankan filosofi *sangkan paraning dumadi* yang di dalamnya juga meliputi nama tempat ataupun nama jalan, seperti Panggung Krapyak, Jalan D.I. Panjaitan, Keraton Yogyakarta, Jalan Pangurakan, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Utomo. Bagian berikut ini akan menjelaskan secara terperinci setiap nama tempat dan jalan yang terhampar dari Panggung Krapyak hingga Tugu Pal Putih, serta berfokus pada filosofi mikrokosmos.

A. Panggung Krapyak

Panggung ini merupakan bangunan kastil dari bahan batu bata dengan tinggi 10 meter dan merupakan bangunan yang sangat kokoh. Kata *krapyak* berarti 'tempat berburu yang telah dipagari' (Adam, 2003; Utomo, 2009). Dalam Brotodiningrat (1978), Krapyak sebagai nama tempat didefinisikan sebagai sebuah podium yang tinggi, terbuat dari batu bata, dan digunakan oleh Sri Sultan yang sedang menyaksikan latihan bala tentara ataupun para kerabat yang sedang memperlihatkan keahlian berburu. Namun, saat ini tempat tersebut berfungsi sebagai

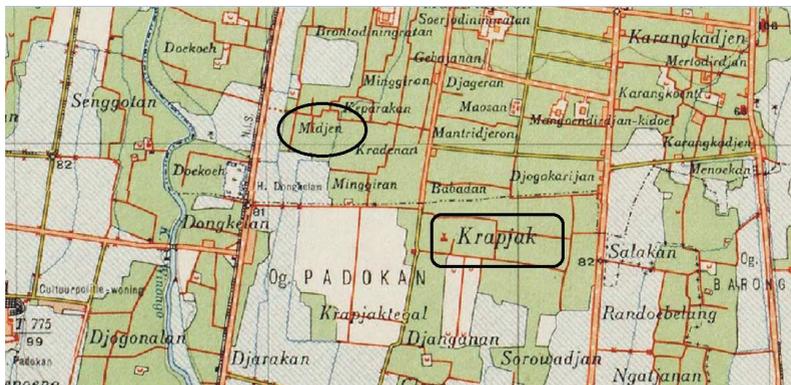


Sumber: Erikha (2017)

Gambar 4. Panggung Krpyak dari Arah Barat Laut

tujuan pariwisata. Secara filosofis, Panggung Krpyak merupakan simbol Yoni atau alat kelamin wanita. Oleh karena itu, Panggung Krpyak menjadi representasi sel telur dan sebaliknya, Tugu Pal Putih (terletak di utara) merepresentasikan sperma. Panggung ini juga dinilai sebagai tempat tersimpannya roh-roh manusia (Khairuddin, 1995). Keadaan ini disebut juga sebagai alam *arham*, yaitu tempat bersemayamnya jiwa atau roh setelah berpisah dari esensi ilahiah atau ketuhanan dan sebelum menjadi embrio di dalam rahim manusia (Priyono dkk., 2015).

Kaitan makna filosofi Krpyak sebagai rumah roh-roh juga dikaitkan dengan toponimi Mijen yang merupakan etimon dari *wiji* (benih). Mijen merupakan nama sebuah kampung yang terletak di sebelah barat laut Panggung Krpyak. Makna *benih* ini merupakan perumpamaan bahwa panggung ini tempat menyimpan benih manusia (roh). Menurut Gupta dkk. (2007), di sepanjang jalan dari panggung



Sumber: Topografische Dienst (1933)

Gambar 5. Penulisan *Krapjak* dan *Midjen*

ini menuju utara, terdapat pohon asam dan pohonanjung. Rasa asam dan wanginya disukai sebagian wanita yang sedang mengandung. Penanaman pohon asam dimaknai sebagai *nengsemake* atau sesuatu yang menyenangkan. Ini merupakan penggambaran atas perasaan sukacita seorang ibu yang sedang menunggu kelahiran bayinya.

B. Jalan D.I. Panjaitan

Menurut informasi dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (2017), Jalan D.I. Panjaitan terletak di antara simpang empat Gading (yang terdiri atas Jalan Sutoyo, Jalan M.T. Haryono, Jalan Gading) dan batas Kota Yogyakarta. Adapun jalan ini memiliki panjang 1.341,9 meter (varian data menurut Salamun (1988) adalah 1.312 meter). Terdapat sejumlah penanda pada jalan ini, seperti Pasar Gading, Rumah Sakit Patmasuri, Gereja Ngadinegaran, Gereja Baptis Indonesia Ngadinegaran, Balai Laboratorium Kesehatan, dan Kantor Kecamatan Mantrijeron.

Nama D.I. Panjaitan diberikan dengan alasan penghargaan atas perjuangannya dari masa Hindia Belanda, pendudukan Jepang, hingga setelah Indonesia merdeka. Saat masih menjadi Asisten IV Menteri Panglima Angkatan Darat, D.I. Panjaitan dinilai berhasil

menemukan penyelundupan senjata untuk Partai Komunis Indonesia (PKI) dari Tiongkok. Senjata-senjata itu dimasukkan ke peti bahan bangunan yang akan dipakai membangun gedung Conference of the New Emerging Forces (Conefo). Selain itu, D.I. Panjaitan termasuk perwira yang menolak rencana PKI membentuk Angkatan Kelima yang terdiri atas buruh dan tani (Salamun, 1988). Sejauh ini, belum ada dokumen tertulis yang menyebutkan kapan jalan ini mulai dinamai D.I. Panjaitan. Variasi toponimi terdapat pada peta Kota Yogyakarta yang dirilis media massa *Kedaulatan Rakyat* pada 1973. Dalam peta itu, nama jalan tersebut ditulis Jl. Maj Panjaitan. Jika dikaitkan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965, penamaan ini diduga kuat disematkan setelah 1965.

Sebelum dinamai D.I. Panjaitan, jalan ini bernama Jalan Ngadinegaran karena terdapat Kampung Ngadinegaran yang notabene tempat tinggal Tumenggung Ngadinegoro (Salamun, 1988). Selain nama Ngadinegaran, ruas selatan dulu dinamai Jalan Gebayanan. Gebayanan merupakan nama kampung dan tempat tinggal *abdi dalem cari kanayakan* (Gupta dkk., 2007). Menurut Utomo (2009), kata ini berarti 'pesuruh desa' (varian lain menyebutkan *kebayan* merupakan salah satu jabatan di kelurahan). Tempat ini terletak di sebelah utara Kampung Minggiran. Sejak masa pendudukan Jepang, Kampung Gebayanan digusur dan dijadikan lapangan olahraga. Namanya saat ini dikenal sebagai Lapangan Minggiran. Jika dibanding dengan keberadaannya saat ini, secara administratif Kampung Gebayanan berada dalam wilayah Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron.

C. Keraton Yogyakarta

Pada awalnya, Yogyakarta merupakan hasil pemisahan Kerajaan Mataram menjadi dua kerajaan (keraton) berdasarkan pada Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini disepakati dengan Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie/VOC) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977). Perjanjian itu membagi wilayah Mataram menjadi dua

bagian, yaitu Keraton Surakarta (dipimpin oleh Sunan Pakubuwana III) dan Keraton Yogyakarta (dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi). Pada awal abad ke-19, terjadi kemelut di antara Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta yang dipicu oleh tekanan Marsekal Deandles pada 1808 dan invasi Inggris ke Yogyakarta pada 1812. Hal ini menyebabkan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta mendapat sanksi dari Inggris sehingga, pada 1812, Keraton Yogyakarta juga dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono serta Kadipaten Pakualam yang dipimpin oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Setelah 17 Agustus 1945, dua kerajaan ini mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberikan dukungan penuh terhadapnya. Pada 1946, kedua rajanya bahkan mempersilakan Sukarno untuk memindahkan ibu kota negara yang semula di Jakarta ke Yogyakarta dengan alasan adanya blokade tentara sekutu yang ingin merebut kembali Indonesia ke tangan Belanda. Meskipun berada di bawah Negara Indonesia, Yogyakarta tetap diberi keistimewaan berupa penetapannya menjadi Daerah Istimewa (DI). Penetapan ini menjadikan DI Yogyakarta sebagai provinsi yang menjalankan fungsi kerajaannya dan mengangkat gubernurnya secara otomatis dari Raja Kerajaan Yogyakarta dan wakil gubernur dari Raja Kadipaten Pakualam.

Seperti halnya kompleks kerajaan, Keraton memiliki komponen yang kompleks sesuai dengan fungsi dan makna filosofi masing-masing. Berikut ini nama-nama tempat dari bagian selatan (belakang) sebagai kelanjutan dari *sangkaning dumadi*.

1. Alun-alun Kidul

Keraton Solo ataupun Keraton Yogyakarta sama-sama memegang orientasi utara-selatan. Dalam konteks Yogyakarta, hal ini diwujudkan ke dalam pembuatan Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan (Adam, 2003). Zoetmulder (1995) mengartikan alun-alun sebagai lapangan persegi di depan istana. Area di sekitar Alun-alun Kidul ini disebut juga dengan *pungkuran*, yang berarti 'punggung' (Utomo, 2009).

Hal ini sesuai dengan letak Alun-alun Kidul yang memang berada di belakang Keraton.

Dalam perjalanannya, Alun-alun Kidul menjadi daya tarik bagi sejumlah seniman dan pemerhati budaya untuk memaknai tempat itu sebagai ruang dan masyarakat perkotaan. Lebih spesifik lagi, bagaimana Alun-alun Kidul dimaknai oleh Keraton, masyarakat Yogyakarta, dan pemerhati budaya maupun seniman (Alun-alun selatan, 2009).

Pada alun-alun ini, terdapat dua pohon beringin yang dinamai Ringin Wok yang berarti 'berewok' atau 'jenggot' (Khairuddin, 1995). Kedua pohon ini, yang juga disebut sebagai Supit Urang, yang berarti 'sumpit udang', dikelilingi pagar dalam bentuk busur pemanah; melambangkan bagian suci tubuh manusia sehingga harus dilindungi. Bentuk busur pagar adalah ciri khas seorang gadis dan anak laki-laki. Di sekitar alun-alun juga terdapat lima jalan, yaitu dua jalan di sebelah timur, dua di sebelah barat, dan satu di sebelah selatan. Kelima jalan ini menyimbolkan lima pancaindra manusia. Alun-alun merupakan hamparan tanah yang berpasir dan dimaknai sebagai keadaan yang belum teratur (Gupta dkk., 2007). Hal ini mirip dengan sifat labil seorang remaja yang masih mencari jati diri. Di sekitar alun-alun juga terdapat pohon kuweni dan pohon pakel. Pohon kuweni dimaknai sebagai anak yang sudah mulai berani, sedangkan pohon pakel bermakna anak yang sudah menginjak akil balig (mulai remaja). Keberanian juga ditandai dengan proses khitanan yang dilalui seorang anak remaja.

Secara umum, Alun-alun Selatan menyimbolkan hasrat seksual seseorang. Pada awalnya, Alun-alun Selatan berfungsi sebagai tempat berlatih para prajurit Keraton serta digunakan sebagai jalur prosesi pemakaman raja yang hendak dibawa ke pemakaman para raja di Imogiri.

2. Siti Hinggil Kidul

Siti Hinggil memiliki nama lain, yaitu Sasana Hinggil Dwi Abad. Nama ini diberikan saat memperingati 200 tahun Kota Yogyakarta

pada 7 Oktober 1956. Secara harfiah, *siti* berarti ‘tanah’, sedangkan *inggil* berarti ‘tinggi’, sehingga Siti Hinggil bermakna ‘tanah yang tinggi’ (Utomo, 2009) atau tanah yang ditinggikan (Khairuddin, 1995). Sementara itu, varian lain toponimi ini adalah Setinggil atau Sitinggil (Adam, 2003). Siti Hinggil selatan menjadi analogi atas hubungan seksual. Di sisi kiri dan kanan Siti Hinggil, terdapat sepasang jalan menuju halaman Kamandhungan Kidul, yang dinamai Jalan Pamêngkang. *Pamêngkang* merupakan turunan dari *mêkangkang*, yaitu posisi pria dan wanita saat berhubungan intim. Bentuk makna lain ialah penggambaran seorang ibu yang sedang melahirkan (Priyono dkk., 2015).

3. Kamandungan Kidul

Setelah keluar dari Siti Hinggil Kidul, kita dapat memasuki Kamandungan Kidul melalui Regol Kemandungan (pintu gerbangnya) terlebih dahulu. Toponimi ini berarti kandungan atau jabang bayi yang sedang dikandung seorang ibu (Priyono dkk., 2015). Di samping kiri dan kanan Bangsal Kamandhungan, terdapat jalan kecil yang merepresentasikan pengaruh-pengaruh negatif yang dapat mengganggu pertumbuhan bayi tersebut.

4. Kamagangan

Untuk menuju Kamagangan, kita mesti melewati Regol Gadhung Mlathi. Di bagian utara gerbang ini, terdapat pembatas *baturana* yang pada bagian atasnya menempel dua patung naga yang saling membelakangi dan melilitkan ekornya satu sama lain. Kedua patung ini merupakan *candrasengkala memet* (disebut sebagai penanda waktu yang dibuat menggunakan simbol gambar (Adi, 2014)) yang dapat merepresentasikan Dwi Naga Rasa Tunggal yang berarti 1682 tahun Jawa dan sebagai peringatan tahun berdirinya Keraton Yogyakarta,

Kamagangan berasal dari kata dasar *magang*, yang mungkin berarti ‘seseorang yang mesti melewati tes bertarung menggunakan tombak dan disaksikan oleh para pangeran’. Secara filosofis, bayi yang telah lahir akan melalui pintu gerbang ini. Regol Gadung Mlathi yang berwarna putih dan hijau bermakna seorang bayi merupakan lambang manusia yang suci dan damai.

Terakhir, terdapat sebuah gerbang yang menjadi konektor antara halaman Kedhaton dan halaman Kamagangan serta dinamai Regol Kamagangan. Pada sisi kanan dan kiri regol ini, terdapat dua patung hiasan naga berwarna merah. Kedua naga ini merupakan penanda berdirinya Keraton Yogyakarta. Sebagai *candrasengkala memet*, penanda ini ditafsirkan sebagai Dwi Naga Rasa Wani, yang masing-masing mewakili angka 1682 Jawa (setelah angka dibalik) atau setara dengan 1756.

5. Halaman Kedhaton

Pada halaman ini, terdapat sejumlah bangunan dan tanaman yang memiliki makna filosofi bahwa proses kehidupan seorang manusia telah mencapai tahap kemapanan. Dalam kata lain, tahapan kemapanan melambangkan kesiapan menjalankan kehidupan. Nilai inilah yang dicerminkan dari tanaman seperti pohon sawo kecik, yang secara bahasa berasal dari frasa *sarwa bêcik* atau serba baik dalam bahasa Indonesia. Saat memasuki halaman ini, kita akan melihat Bangsal Kencana. Bangsal Kencana merupakan bangunan terbesar pada kompleks Kedhaton. Bangsal ini dibangun pada 1719 Jawa dan dicitrakan melalui *candrasengkala: Trus Satunggal Pandhitaning Ratu*. Menurut Adam (2003), diperkirakan pada 1792 nama awal bangunan ini adalah Bangsal Alus. Secara penamaan, kata *kencana* berarti 'bercahaya' atau 'bercahaya keemasan'. Warna ini mencitrakan bahwa segala hal mestilah dikaitkan dengan Tuhan. Selain itu, tempat ini digunakan saat dilakukannya *ngebêktèn*, yaitu ritual saling memaafkan pada saat hari raya Idul Fitri oleh keluarga Sultan dengan para abdi dalem. Secara simbolis, hal ini merepresentasikan proses *manunggaling kawula gusti*, yaitu bersatunya raja dengan rakyatnya.

Pada Bangsal Kencana bagian barat, terdapat tiga ruangan: Kedhaton Kilèn, Gêdhong Kepilih, dan Gupit Mandragini, yang digunakan sebagai kamar permaisuri, serta pada tempat terpisah sebagai tempat tinggal abdi dalem yang menyajikan sesaji bagi pusaka-pusaka keraton.

Selain Bangsal Kencana, pada kompleks ini terdapat tiga bangunan utama, yaitu Gedhong Prabayeksa, Bangsal Kencana, dan Gedhong Jene. Gedhong Prabeyaksa mulai dibangun pada 1763 dan selesai pada 1768. Bangunan Gedhong Prabayeksa terhubung dengan Gedhong Trajuritrisna dan Gedhong Jene melalui sebuah pintu di bagian utara. Selain itu, terdapat *sênthong têngen*, *têngah*, dan *kiwa* dari bagian barat ke timur. Hal lain yang dapat ditemui ialah tempat tidur hias (biasa disebut *pêdaringan*) yang susunannya menyerupai empat penjuru mata angin. Ini bermakna bahwa ke mana pun tujuan manusia akan selalu berhadapan dengan Tuhan.

Hal yang terkenal dari Gedhong Prabayeksa adalah tempat menyimpan api abadi (Kanjeng Kiai Wiji) dan memiliki nama lain Gedhong Pusaka. Secara filosofi, keabadian api ini menceritakan perjalanan hidup manusia yang dituntun oleh Tuhan yang disimbolkan dengan cahaya agung. Secara etimologi, *praba* berarti 'sinar' atau 'cahaya', sedangkan *yaksa* berarti 'nama golongan makhluk setengah dewa', pembantu Dewa Wisnu, serta dapat pula diartikan sebagai 'makhluk raksasa' (Zoetmulder, 1995); kemungkinan makna lain juga diajukan oleh Adam (2003), yaitu *praba* berarti 'cahaya' dan *yasa* berarti 'bangunan'. Dengan demikian, secara keseluruhan, nama ini bermakna 'cahaya agung' (Priyono dkk., 2015). Cahaya agung ini berperan sebagai penuntun manusia agar berjalan hingga sampai pada tempat yang abadi. Seperti bangunan Keraton lainnya, terdapat *candrasengkala* pada Gedhong Prabayeksa, yaitu Warna Naga Rasa Tunggal (1694 Jawa).

Gedhong Jene (Gedhong Kuning) merupakan bangunan berwarna kuning sebagai perlambangan tempat roh-roh suci dan disebut juga sebagai surga yang abadi. Warna kuning juga diartikan sebagai bentuk keagungan sehingga warna ini selalu berhubungan dengan Sultan. Prinsipnya, Gedhong Jene merupakan tempat tinggal Sultan. Letaknya membujur dari barat ke timur dan menghadap timur.

Bangunan lain adalah Gedhong Purwaretna, yang terletak di sebelah utara Bangsal Kencana. Gedung bertingkat dua ini merupakan tempat Sultan bekerja dan terletak di sebelah perpustakaan pribadi

Sultan, yaitu Panti Sumbaga. Secara bahasa, *purwa* berarti ‘pertama’, ‘permulaan’, ataupun ‘bagian depan’, sedangkan *ratna* berarti ‘permata’ (Zoetmulder, 1995). Secara umum, bangunan ini bermakna ‘menara permata pertama’ (Priyono dkk., 2015).

6. Sri Manganti

Dari halaman Kedhaton menuju arah utara, kita akan sampai ke Halaman Sri Manganti. Untuk sampai ke Halaman Sri Manganti, kita terlebih dahulu melewati Kori Danapratapa (Pintu Danapratapa). Kori atau regol ini dibangun dalam bentuk limasan *Semar tinandhu* karena dibangun dalam bentuk dua sisi tembok saja. Limasan ini terdiri atas gapura pada bagian utara (depan) dan *baturana*. Berdasarkan ornamen pada gapura, terdapat penanda tahun berdirinya gapura ini, yaitu melalui *candrasengkala memet* dan *surya sengkala memet*. *Candra sengkala memet* diperlihatkan melalui ornamen daun *keluwih*, kepala raksasa, seekor biawak, dan lambang Keraton sehingga menjadi *Kaluwihaning Yaksa Salira Aji* (1853 tahun Jawa). *Surya sengkala* ditunjukkan melalui hiasan bola dunia, tangan yang sedang memegang, dan pintu gerbang ini sehingga berbunyi *Jawag Asta Wiwara Narapati* (1921 tahun Masehi). Baik *candrasengkala memet* maupun *surya sengkala* di atas merupakan tahun pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwana VIII.

Pada aspek asal-usul penamaan, regol ini dapat ditelusuri melalui dua pembentuk kata, yaitu *dana*, yang dapat berarti ‘tindakan pemberian atau dana’, ‘hadiah’, dan ‘pemberian’, dan *pratapa* dapat berarti ‘panas menyala’, ‘semarak’, ‘kemegahan’, ‘kecemerlangan’, ‘cahaya kemuliaan’, ‘keagungan’, ‘daya kekuatan’, ‘kekuasaan’, dan ‘wewenang’ (Zoetmulder, 1995). Makna tambahan atas regol ini ialah sebuah anjuran agar manusia dapat selalu memberi nasihat dan memberantas hawa nafsunya.

Pada sisi timur, terdapat Bangsal Trajumas. Mulanya bangsal ini digunakan sebagai tempat memainkan gamelan Sekaten sebelum dibawa ke Masjid Agung Kauman dan tempat mengangkat patih yang merupakan wakil raja. Trajumas juga memiliki nama lain, Traju-

kencana, yang merupakan paduan kata *traju* (berarti ‘timbangan, ‘keseimbangan’) dan *mas* atau *kencana* (berarti ‘suci’ dan ‘tanpa salah’). Dengan demikian, Trajumas dapat diartikan sebagai ‘hati yang bersih dan tanpa ada salah’. Ini merujuk pada raja yang duduk di bangsal ini sehingga hatinya akan suci dan tutur katanya benar. Bangunan ini juga memberi simbol bahwa Sultan haruslah mengakui bahwa hawa nafsu bersifat sementara sehingga perlu membedakan kebaikan dan kejahatan di dalam semua perbuatannya (Priyono dkk., 2015).

7. Kamandhungan Lor

Selepas dari Halaman Sri Manganti, akan ditemui Halaman Kamandhungan Lor (Kamandhungan Kêbên karena terdapat *pohon kêtên*) dan terletak persis di selatan Siti Hinggil. Halaman ini dibatasi oleh dua gerbang atau regol, yaitu Regol Sri Manganti di sisi selatan dan Regol Brajanala di sisi utara. Selain Regol Brajanala, pada sisi barat dan timur terdapat gapura keluar kompleks Keraton.

Berbeda dengan Kamandhungan Kidul, Kamandhungan Lor berasal dari kata *mandhung*, yang berarti ‘mengumpulkan’. Terdapat juga sejumlah tanaman, seperti pohon kepel dan kelapa gading. Kepel atau *kêmpêl* berarti ‘menjadi padat atau beku’. Pohon kelapa gading berarti segala hal tentunya mengandung makna ketuhanan (Priyono dkk., 2015). Warna kuning pada kelapa tersebut juga dikaitkan dengan kepatuhan secara paripurna kepada Tuhan. Pendek kata, Kamandhungan Lor memiliki makna filosofi Sultan harus menggunakan semua pancaindranya agar dapat merendahkan diri dan menjalankan semua yang digariskan oleh Tuhan.

Bangsal Pancaniti merupakan bangunan yang terletak di tengah Halaman Kamandhungan ini dan berbentuk tajuk lambang gantung. Atapnya disangga 16 tiang, dan empat di antaranya merupakan tiang utama. Terdapat hiasan ukiran bermotif *suluran* (tunas yang merambat) berwarna merah dan emas. Zaman dahulu, bangsal ini dipergunakan untuk tempat bermusyawarah para bupati ketika menetapkan sesuatu benar atau salah. Tidak hanya itu, tempat ini juga digunakan sebagai tempat tunggu para bangsawan pada hari

pisowanan, hari bagi para bupati atau kepala daerah di bawah Keraton untuk bertemu dengan Sultan guna memberikan laporan rutin. Secara penamaan, Pancaniti berasal dari kata *panca* yang berarti ‘lima’ dan *niti* berarti ‘meneliti’ atau ‘memeriksa’. Oleh karena itu, bangunan ini melambangkan seorang Sultan menggunakan kelima indranya untuk menyembah dan melakukan perintah Tuhan.

8. Siti Hinggil Lor

Selepas Regol Kamandhungan Lor menuju utara, kita memasuki Kompleks Siti Hinggil Lor atau Siti Hinggil Utara melalui Regol Brajanala. Pintu gerbang ini dirancang dengan model limasan *Semartinandhu*. Seperti halnya sebuah regol, Brajanala juga memiliki bagian baturana yang mempunyai fungsi sebagai penolak bala yang akan masuk ke kompleks Siti Hinggil. Baturana ini disebut juga Rêntêng Mântog Baturana. *Rêntêng* dimaknai dengan ruwet atau perasaan susah sehingga menjadi simbol bahwa Sultan tidak perlu khawatir menjadi perpanjangan tangan Tuhan saat memberikan hukuman kepada rakyatnya. Regol ini ditutup untuk umum sehingga jika dari Halaman Kamandhungan Lor menuju Siti Hinggil kita mesti keluar terlebih dahulu.

Brajanala terdiri atas dua kata: *braja* berarti ‘tajam’ dan *nala* berarti ‘hati’. Brajanala bermakna ‘seruan untuk menajamkan hati agar dapat membuka apa yang tidak dapat dilihat dengan kasatmata’. Secara tidak langsung, ini merupakan seruan kepada manusia agar tetap memohon kepada Tuhan, mengikuti aturan raja, dan menjalankan petunjuk orang tua kita. Regol Brajanala juga memiliki makna senjata hati yang mengandung peperangan antara iman dan hawa nafsu. Di dekat baturana ini juga terdapat pohon jambu tamplok arum. Pohon ini bermakna bahwa Sultan mesti bertutur kata secara bijaksana sehingga kesucian Sultan menjadi harum hingga ke seluruh dunia (Priyono dkk., 2015).

Bangsal Sitinggil merupakan bangunan utama kompleks ini. Jika dibanding dengan bangunan-bangunan yang ada di Keraton, bangsal ini adalah bangunan yang paling tinggi. Bangsal ini berfungsi

sebagai tempat penobatan para raja Keraton Yogyakarta. Bangsal ini direnovasi sewaktu kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dan ditandai dengan *candrasengkala memet* pada bagian atas muka, yaitu *Pandhita Cakra Naga Wani* (1857 Jawa) dan *surya sengkala memet Gana Asta Kembang Lata*, setara dengan 1926 Masehi. Dalam aspek penamaan, *siti* berarti ‘tanah’ dan *hinggil* berarti ‘tinggi’. Oleh karena itu, Siti Hinggil bermakna ‘tanah yang ditinggikan’ dan memiliki tinggi sekitar 2,85 meter. Ini bermakna sukma yang diangkat melalui garis lurus menghadap utara menuju Gunung Merapi. Tempat ini melambangkan kedudukan Sultan sebagai wakil Tuhan di dunia.

Di sebelah bangsal ini juga terdapat Bangsal Manguntur Tangkil dan Bangsal Witana. Pada Bangsal Manguntur Tangkil, terdapat *selo gilang* (batu persegi) yang digunakan sebagai tempat menaruh singgasana Sultan saat upacara penobatannya. Bangsal Witana berfungsi sebagai tempat menaruh pusaka utama Keraton saat penobatan Sultan. Lantai pada bangsal-bangsal ini terbuat dari batu pualam. Pada 1925, Bangsal Witana direnovasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dan ditandai dengan *candra sengkala* Tinoto Pirantining Madya Winoto (1855 Jawa) pada sisi belakang bagian timur, dan *surya sengkala* Linungit kembar Gatra Ningron (1925 Masehi) pada bagian barat.

Kori Siti Hinggil merupakan pintu masuk atau keluar dari kompleks Siti Hinggil Lor menuju Pagelaran di sebelah utara. Saat kita menaiki tangga menuju Siti Hinggil, tempat pertama yang kita temui adalah Tarub Agung, sebuah ruang tunggu para tamu Sultan yang akan mengikuti upacara di Bangsal Siti Hinggil. Pada sisi kiri dan kanan *Tarub Agung* juga terdapat bangsal sebagai tempat penjaga yang bertugas menyampaikan aduan rakyat yang melakukan *pepe* atau upaya memohon keadilan pada Sultan dengan cara duduk berpakaian putih-putih di Alun-alun Utara. Bangsal ini disebut juga sebagai Bangsal Pacikeran.

Setelah menaiki kompleks Siti Hinggil, pada bagian timur halaman terdapat bangunan yang diberi nama Balébang, yang awalnya digunakan untuk menyimpan gamelan pusaka Sekaten, yaitu Kiai

Gunturmadu dan Kiai Nagawilaga. Di bagian barat juga terdapat bangunan Balé Angun-angun sebagai tempat penyimpanan tombak yang dinamakan Kanjeng Kiai Sura Angun-angun.

9. Pagelaran

Kompleks Pagelaran merupakan kompleks paling utara dari Keraton Yogyakarta. Pada awalnya, tempat ini dipakai untuk menunggu bagi para tamu yang akan menghadap raja dan para abdi dalem yang akan menghadap raja pada upacara kerajaan. Selain itu, terdapat sejumlah bangunan, seperti Bangsal Pangrawit, Bangsal Pangapit Wetan dan Pangapit Kilen, Bangsal Pemandangan Wetan dan Pemandangan Kilen, serta Bangsal Pacikeran Wetan dan Pacikeran Kilen. Bangsal Pengrawit berfungsi sebagai tempat duduk Sultan saat melantik *pépatih dalém* (tangan kanan raja). Bangsal Pemandangan pada awalnya digunakan sebagai tempat Sultan dan pimpinan prajurit menyaksikan latihan perang di Alun-alun Utara. Adapun Bangsal Pangapit digunakan sebagai tempat para senapati (pimpinan tentara) menunggu untuk mendapatkan instruksi dari Sultan.

Pagelaran berasal dari kata *gelar* yang berarti ‘bentangan’, ‘susunan’; maka pagelaran berarti tempat mengatur pasukan, tempat rakyat berkumpul (Zoetmulder, 1995). Makna pagelaran ialah *an open hall where a monarch holds audience*, sedangkan gelar berarti dibuka (Priyono dkk., 2015). Dengan demikian, Pagelaran dihubungkan dengan unsur keterbukaan dan bentuk kesamaan kedudukan dan derajat di hadapan Tuhan.

Pada bagian atas di luar gerbang Pagelaran, terdapat *candra sengkala memet* Ponco Gono Saliro Tunggal (1865 Jawa) dan *surya sengkala memet* Catur Trisulo Kembang Loto yang berarti 1934 Masehi, tahun saat Pagelaran direnovasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.

10. Alun-alun Lor

Alun-alun Lor atau Alun-alun Utara merupakan lapangan pasir berukuran 300 x 300 meter. Di dalam area alun-alun ini, terdapat

sepasang pohon beringin yang diberi pagar. Pohon beringin pada sisi timur diberi nama Kiai Janadaru (berukuran lebih besar), sedangkan pada sisi barat diberi nama Dewandaru. Di sekitar Alun-alun Lor juga ditanam 62 pohon beringin lain sehingga jumlahnya 64 batang. Hal ini melambangkan usia Nabi Muhammad dalam tahun Jawa. Kedua pohon ini juga sebagai harapan agar Sultan diberi umur panjang. Sebelum dibuka untuk umum seperti saat ini, awalnya hanya Sultan dan orang kepercayaannya yang diperkenankan untuk berjalan di antara kedua pohon ini. Selain itu, alun-alun ini berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin melakukan *Tapa Pépé*, bagi mereka yang ingin menyampaikan keluh kesah kepada Sultan (Priyono dkk., 2015).

Dalam aspek filosofis, kedua beringin ini menggambarkan konsep *manunggaling kawula gusti* dan *hablun min annas* (hubungan horizontal, antarmanusia) & *hablun min Allah* (hubungan vertikal, antara manusia dan Tuhan). Pada *manunggaling kawula gusti*, digambarkan juga keadaan seorang manusia yang terpisah dari dirinya sendiri, seolah-olah telah bersatu dengan wujud yang lebih suci. Manusia sebagai representasi mikrokosmos, bersatu dengan suasana batin yang lebih besar yang digambarkan dengan unsur ilahi) atau makrokosmos (Khairuddin, 1995).

Kedua pohon ini juga terletak di antara garis lurus bentangan Sumbu Filosofi Keraton Yogyakarta. Dari sumbu menuju arah barat menyimbolkan kehidupan akhirat dan sumbu ke arah timur menyimbolkan kehidupan duniawi. Alun-alun ini merupakan tempat yang penting bagi Keraton pada masa lampau. Tempat ini bermakna sebagai tempat yang menentukan kekuatan lahir dan batin yang diwujudkan ke dalam prajurit dan perwira yang berlatih perang guna mempersiapkan diri apabila dalam situasi peperangan.

Alun-alun juga dianalogikan sebagai *añalun* atau bergelombang (Zoetmulder, 1995). Gelombang dalam konteks ini diartikan sebagai situasi yang mengayun-ayun pada perjalanan hidup manusia di dalam samudra masyarakat dan digerakkan oleh angin yang ditimbulkan dari pohon-pohon beringin (Priyono dkk., 2015).

D. Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora)

Jalan Pangurakan merupakan bagian dari jalan pada Sumbu Filosofi. Makna nama jalan ini adalah hakikat perjalanan manusia mencapai tujuannya. Dalam proses perjalanan tersebut, semua hawa nafsu dan hal yang bersifat keduniawian dapat dilepaskan dan dibuang. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kesucian yang paripurna (lihat Gupta dkk., 2007; Priyono dkk., 2015).

E. Jalan Margo Mulyo (d.h Jalan Ahmad Yani)

Jalan Margo Mulyo merupakan jalan yang terletak antara Jalan Malioboro dan Jalan Pangurakan. Secara filosofi, jalan ini bermakna manusia diharapkan melalui perjalanan manusia dengan penuh kemuliaan karena tidak teralihkan oleh godaan dunia, seperti takhta, wanita, dan harta (lihat Gupta dkk., 2007; Priyono dkk., 2015).

F. Jalan Malioboro

Malioboro diartikan sebagai ‘jalan yang telah diterangi oleh obor para wali’ (K.R.T Jatiningrat, komunikasi personal, 3 Oktober 2017). Obor diartikan sebagai agama yang dapat menjadi tuntunan dalam hidup manusia.

G. Jalan Margo Utomo (d.h Jalan Pangeran Mangkubumi)

Jalan Margo Utomo merupakan bagian perjalanan manusia dalam mencapai tujuannya. Manusia diharapkan berjalan di jalan yang lurus dan sesuai dengan nilai-nilai keutamaan dalam hidup (lihat Gupta dkk., 2007; Priyono dkk., 2015).

H. Tugu Pal Putih

Tugu Pal Putih (de Witte Paal dalam bahasa Belanda) atau Tugu Yogya atau Tugu Jogja merupakan bangunan setinggi 15 meter dan terletak di simpang empat Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangeran Diponegoro, dan Jalan Sudirman. Tugu Pal Putih selesai didirikan pada 3 Oktober 1889 ketika masa pemerintahan Sri

Sultan Hamengku Buwono VII dengan keterangan *candra sengkala* Wiwara Harja Manggala Praja. Informasi pembangunan Tugu ini, didapatkan dari pengamatan penulis di lapangan; terdapat empat pelat yang dilekatkan pada keempat sisi tugu.

Sisi barat bertulisan “Yasan dalem ingkang sinuwun kangjeng sultan hamengku buwana ingkang kaping VII” (dibangun oleh Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono VII).

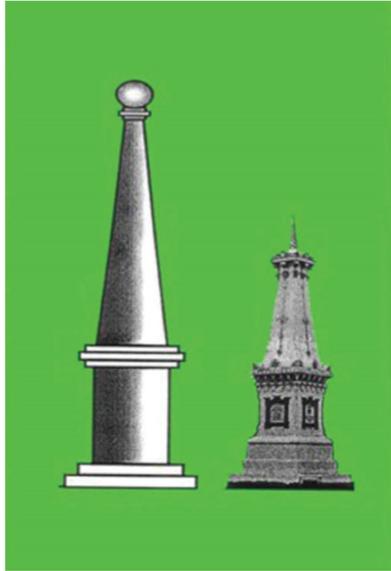
Pada sisi selatan, terdapat logo Sri Sultan Hamengku Buwono VII dan tulisan “Wiwara Harja Manggala Praja Kaping 7 Sapar Alip 1819” (*wiwara* bermakna ‘gerbang’, representasi angka sembilan; *harja* berarti ‘kemakmuran’, representasi angka 1; *manggala* bermakna ‘pemimpin’, sebagai wakil angka 8; sedangkan *praja* berarti ‘negara’, sebagai representasi angka 1). Sengkalan ini selaras dengan angka 1819 dan dimaknai sebagai gerbang kesejahteraan untuk pimpinan negara (Kraton Jogja, 2018).

Sisi timur bertulisan “Inkang mangayubagya karsa dalem kangjeng tuwan residen Y. Mullemester” (yang menyambut baik kehendak Ngarsa Dalem Sultan adalah Kangjeng Tuwan Residen Y Mullemester).

Sisi utara bertuliskan “Pakaryanipun sinambadan patih dalem kangjeng raden adipati danureja ingkang kaping V. Kaundhagen Dening Tuwan Y.P.F. van Brussel Opzchter Waterstraat” (pekerjaan dibiayai oleh Patih Dalem Kangjeng Raden Adipati Danureja V. Pimpinan pelaksanaan oleh Tuan Kaundhagen Dening Tuwan Y.P.F. van Brussel Opzchter Waterstraat).

Dalam KBBI V, *pal* berarti ‘tonggak batu sebagai tanda jarak, antara satu tonggak dan tonggak yang lain berjarak 1,5 kilometer’. *Pal* berasal dari bahasa Belanda, yaitu *paal* (Jones dkk., 2007), dan *witte*, berarti ‘putih’. Oleh karena itu, tugu ini juga bernama Tugu Pal Putih.

Pada mulanya, tugu yang saat ini berdiri merupakan bentuk kedua setelah bentuk pertamanya runtuh akibat gempa bumi pada 10 Juni 1867. Tahun keruntuhan ini ditandai dengan *candra sengkala* Obah Trus Pitung Bumi. Tugu versi pertama ini diberi nama Tugu



Sumber: Priyono dkk. (2015)

Gambar 6. Ilustrasi Perbandingan Tugu Golong Gilig (kiri) dan Tugu Pal Putih (kanan)

Golong Gilig (lihat Gambar 6) karena bentuknya menyerupai bangun bulat pada bagian puncak (dalam bahasa Jawa bulat disebut *golong*) dan silinder (*gilig* dalam bahasa Jawa, sedangkan dalam bahasa Jawa Kuno *gilig* juga berarti ‘penuh dengan lubang karena dimakan ulat’ (Zoetmulder, 1995). Tugu Golong Gilig memiliki tinggi 25 meter dan dibangun sejak kekuasaan Sri Sultan Hamengku Bowono I pada 1755. Dengan ketinggian ini, tugu juga berfungsi sebagai penanda Kota Yogyakarta dan berfungsi sebagai tujuan ketika Sultan bermeditasi di Bangsal Manguntur Tangkil.

Secara filosofi, tugu ini melambangkan bersatunya raja dengan rakyat yang disebut sebagai filosofi *manunggaling kawula Gusti* (Priyono dkk., 2015). Filosofi ini merujuk pada konsep mikrokosmos yang menjadikan Keraton sebagai pusat dan masyarakat di sekitarnya

sebagai pendukungnya. Jika dibanding dengan konsep makrokosmos, Tuhan menjadi sentral sehingga *kawula* bermakna ‘manusia’ dan *gusti* diartikan sebagai ‘Tuhan’ (lihat Gupta dkk., 2007).

Rangkaian nama jalan yang terdapat pada garis utara ke selatan (*sangkaning dumadi*) dari Margo Utomo, Malioboro, Margo Mulyo, dan Pangurakan merupakan anjuran agar perjalanan manusia dapat melalui jalan-jalan keutamaan, sesuai dengan ajaran para wali agama, sehingga hidup dengan jalan yang penuh kemuliaan, dan upaya pelepasan semua hawa nafsu keduniawian sebelum meninggalkan dunia menuju ilahi. Hal ini selaras dengan kutipan Magnis-Suseno (1988, 117):

Paham sangkan-paran merupakan inti spekulasi mistik Jawa. Sangkan-paran hanya dapat tercapai apabila dijadikan tujuan satu-satunya dan apabila manusia bersedia untuk melawan segala godaan alam luar dan bahkan mempertaruhkan nyawanya sebagaimana yang dilakukan Bima (pada kisah Dewaruci, pen).

Keadaan *manunggal* ini disebut juga *mati sajroning urip* (mati dalam hidup) dan *urip sajroning mati* (hidup dalam mati). Keterpisahan antara roh dan fisik keduniawian dimaknai bukanlah sebagai akhir, melainkan kehidupan yang hanya bertransformasi ke alam “di luar dunia”. Tujuan akhir ini juga dianggap sebagai yang utama dan sebuah realitas yang sebenarnya.

Dalam filosofi ini, terdapat dua konsep yang saling berkaitan dan bersatu dalam manusia, yaitu lahir dan batin. Manusia sebagai makhluk memiliki fisik dan di saat yang bersamaan terdapat juga batin di dalam fisik tersebut. Magnis-Suseno (1988) menganalogikan lahir dengan makrokosmos (*jagad gede*) dan batin sebagai mikrokosmos (*jagad cilik*). Saat manusia telah berfokus pada batinnya, ia diasumsikan dapat melihat semuanya tanpa batas, sedangkan lahir merupakan ungkapan atau analogi semata dari konsep batin. Dalam filsafat Jawa, batin yang tanpa batas dan meliputi semua hal disebut juga konsep Ketuhanan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB IV

Anasir Kebahasaan dan Psikologi Sosial Toponimi



A. Rajamarga dan Masyarakatnya

Mungkin Peter Carey (2015) yang kembali memopulerkan istilah “rajamarga” (*râjamârga*) dalam bunga rampainya, setelah sebelumnya Darmosugito (1956) menyebutkannya dalam buku berjudul *Kota Jogjakarta 200 Tahun*. Rajamarga sendiri merupakan *jalan poros utama kota istana* (Carey, 2015, 2). Poros ini digunakan sebagai jalur yang dilalui para tamu agung Keraton (misalnya pembesar dari Eropa) yang akan beranjang-sana ke Istana Sultan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut dari keempat nama jalan yang termasuk ke dalam ruas rajamarga.

1. Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora)

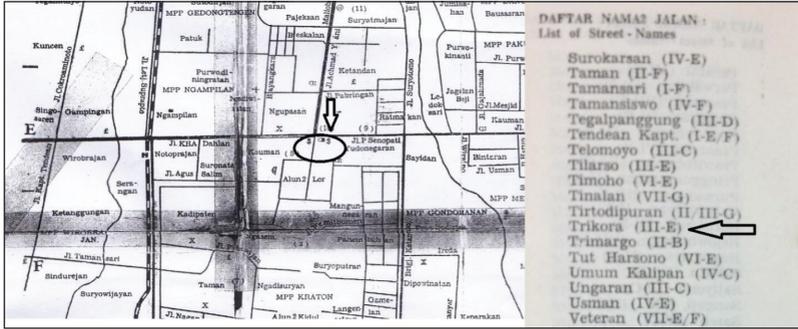
Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora) merupakan jalan pendek dengan panjang 167,5 meter, yang membentang dari simpang empat Kantor Pos Besar hingga Alun-alun Lor (Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2017). Secara administratif, jalan ini termasuk ke dalam Kecamatan Gondomanan (biasa disingkat dengan GM). Sejumlah penanda yang ada di sepanjang jalan itu adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Kantor Pos Besar, Museum Sonobudoyo, SMA Pangudi Luhur, dan Badan Pemasarakatan Kota Yogyakarta.



Sumber: Erikha (2017)

Gambar 7. Plang Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora)

Pada zaman penjajahan Belanda, jalan ini bernama Kadasterstraat (Gupta dkk., 2007) dan Kadaster Straat. Pada jalan ini juga terdapat tiga gapura, yaitu Gapura Gladhag, Gapura Pangurakan Jawi, dan Gapura Pangurakan Nglëbët. Namun, saat ini Gapura Gladhag sudah tidak ada. Nama lama yang disematkan pada Jalan Pangurakan ialah Jalan Trikora. Nama Trikora disematkan sebagai peringatan (*commemorative name*) atas deklarasi Operasi Tri Komando Rakyat (Trikorra) yang diluncurkan pada 19 Desember 1961 oleh Presiden Sukarno di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta. Tidak pula ditemukan kapan nama Trikora ini diberikan. Namun, pada peta yang dikeluarkan Kedaulatan Rakyat (Atmojo, 1973), telah ada penamaan



Sumber: Atmojo (1973)

Gambar 8. Jalan Trikora

Trikora. Sejak 2013, Pemerintah Kota Yogyakarta mengembalikan nama Jalan Trikora menjadi nama awalnya, yakni Jalan Pangurakan.

Rouffaer dan J.W. Winter (1902, dalam Adam, 2003), menyebutkan lima gerbang di Keraton Solo (Keraton Surakarta) yang dimulai di utara: 1) Pangurakan; 2) Gladhag; 3) Brajanala; 4) Kemandhungan; dan 5) Srimenganti. Zimmerman (2003, 43) menyebutkan bahwa Pangurakan pada Keraton Solo berfungsi sebagai gerbang pembuka Pangurakan berasal dari kata dasar urak yang berarti '*a commission, an order*'. Lombard (2008) juga menambahkan bahwa terdapat dua patung raksasa *Cingkrabala* dan *Balaupata* di Pangurakan Keraton Solo. Kedua patung ini dikenal sebagai penjaga pintu masuk kayangan. Meskipun terdapat perbedaan yang sangat kentara di antara Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, masih terdapat kemiripan-kemiripan yang baru terlihat setelah diteliti lebih lanjut. Lombard beralasan, hal ini terjadi karena keduanya dibangun berdasarkan rancangan yang sama, apalagi pembangunannya berselang kurang-lebih 10 tahun (Keraton Surakarta pada 1745, sedangkan Keraton Yogyakarta pada 1756). Dalam tulisannya, Adam (2003) menyatakan Pangeran Mangkubumi merupakan arsitek Keraton Surakarta sehingga pada saat membangun Keraton di Yogyakarta ia merancang dengan pola bangunan yang mirip.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Adam juga menjelaskan bentuk lain dari Pangurakan, yaitu Pamurakan dalam kutipan berikut.

The Pangurakan or Pamurakan, which originally extended to the cross roads near the club, was, according to P.A. Soerjadiningrat, the place to which retainers of the Sultan who had been banished were escorted by their guards. Dwijasaraya connects this custom with the word ngurak-urak which means to expel with angry words. Gericky and Roorda give a different meaning in their dictionary, namely 'the place where the duty lists are issued' (Adam, 2003, 33).

Jalan Pangurakan mengandung makna menolak, membuang, atau mengusir hawa nafsu duniawi (Priyono dkk., 2015). Singkatnya, Pangurakan atau Pamurakan secara filosofis dianalogikan sebagai tahapan kehidupan manusia yang mulai melepas segala keburukan dan hawa nafsunya (lihat juga Lauder dkk., 2017). Pangurakan sebagai gerbang pembuka atau jalan raja, seperti kutipan dari Gericku dan Roorda "*the place where the means of transport for the service of the ruler had to be brought*". Ini sesuai dengan penjelasan dalam *Kamus Jawa Kuna Indonesia* (Zoetmulder, 1995), yaitu sebagai lapangan persegi dan merupakan pintu gerbang di sebelah utara (Alun-alun Lor).

Dalam Serat Salokapatra, nama Pangurakan disebut enam kali. Serat Salokapatra sendiri merupakan naskah yang memuat mitos tumbuh-tumbuhan (flora) dan bangunan yang terdapat di kompleks Keraton Yogyakarta (Sunjata dkk., 1995). Tujuan dari pemaknaan atas flora dan bangunan ini adalah menguatkannya menjadi mitos yang dapat dijadikan pegangan manusia agar selalu menjalankan tata krama yang berlaku di lingkungan tersebut. Pangurakan merupakan salah satu bangunan bangsal berbentuk joglo yang terletak tepat di depan Alun-alun Lor dan terlihat seperti diapit oleh dua pohon beringin Kiai Janandaru dan Dewandaru. Serat Salokapatra membagi dua bangunan utama di keraton, yaitu bangsal (rumah) dan regol (pintu gerbang). Bangsal berarti 'rumah besar di keraton' (Poerwadarminta, 1939). Sunjata dkk. (1995) menegaskan pemakaian istilah bangsal dipakai guna membedakan rumah yang dimiliki sang

raja di dalam keraton dengan rumah-rumah yang terdapat di luar keraton. Sesuai dengan maknanya, Pangurakan digunakan untuk mengusir anggota masyarakat yang tidak patuh pada peraturan yang dibuat raja. Selain itu, bangsal ini dipakai untuk menyimpan barang-barang perlengkapan kerajaan, seperti *panggung kuthamara*, kereta kerajaan, hingga persenjataan. Dahulu, bangsal ini dijaga oleh abdi dalem *geladhag* yang bertugas menyeret anggota masyarakat yang melanggar aturan kerajaan. Dengan demikian, bangsal ini memiliki varian nama, yaitu Geladhag (Ashadi, 2017). Ini diperkuat melalui kutipan sebagai berikut (Sunjata dkk., 1995, 10).

Sun mangsuli carita ing ngarsi, ngalun-alun rerenggane praja bangsal kekalih papane, ngapit iringan lurung, pangurakan sinungan asmi, kang bangsal kalahkan kembar, wangun joglo mungguh, ngapit marga jeng-ajengan, wetan kilen kasandhingan wit waringin, larese pojok saka (artinya: Saya ulangi cerita, di depan alun-alun sebagai perlengkapan kerajaan, dua bangsal tempatnya mengapit tepinya jalan, diberi nama dua bangsal kembar. Bangunan joglo, mengapit jalan berhadapan-hadapan timur barat **pangurakan**, berdekatan pohon beringin tepat pada sudut tiang) (pupuh I baris ke-9).

Mila saking karsa dalem aji, pan ing riku kaparingan bangsal, pangurakan bebangsale, saking karsa sang prabu, paring priksa sagungin jalmi, sing sapa tan manuta, mring pranatan ratu, nerak angger-angger praja, dipun urak kapatrapan ukum adil, kang bangkang ginaladhag (artinya: memang karena kehendak raja, di situ diberi bangsal **pangurakan**. Bangsalnya atas kehendak sang raja, memberi tahu pada seluruh manusia: barang siapa tidak menurut pada peraturan raja, melanggar peraturan raja, diarak, diberi hukuman adil. Yang membantah diburu) (pupuh I baris ke-10).

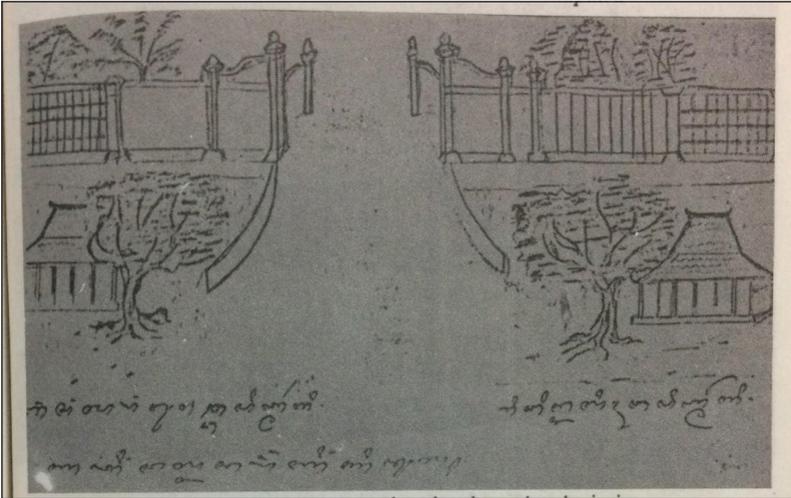
Mila inggih ugi den wastani, akatelah papan geladhagan, sampun seling seserapé, makaten terangipun, ran geladhag pangkaté pyayi, di dalem kang rumeksa kang caos ingku riku tembung caos iku jaga, abdi dalem mantra jaga kang majibi, kang jaga gegiliran (artinya: sehingga diberi nama geladhagan sudah diketahui orang banyak demikian jelasnya dinamakan geladhag pangkatnya priyayi, abdi dalem yang merawat yang datang di situ untuk menjaga. Kata caos artinya 'menjaga'. Abdi dalem mantra jaga yang wajib yang menjaga bergantian) (pupuh I baris ke-11).

Pangurakan (Pangoerakan dalam ejaan van Ophuijsen), menurut Dwidjaraja (1935), termasuk ke dalam bagian Alun-alun Lor (ia menulisnya dengan Aloon-aloon ler): kala kinanipoen kikisipoen Pangoerakan poenika doe-moegi margi prasakawanan ngadjeng kamar bolah. Manawi wonten Santana oetawi abdi Dalem karapoengan katetepaken kalepatanipoen oepami katoendoeng, wonten ing margi ngrikoe ladjeng kagoesah (kaoerak-oerak) déning ingkang ngirid yang artinya (Alun-alun Utara): waktu dulu batasan 'Pangoerakan' itu sampai di jalan 'Prasakawanan' depan gedung di sebelah gedung Agung. Jika ada Santana atau abdi dalem (petugas keraton) beristirahat, ia dianggap bersalah, contohnya disuruh pergi. Ada di jalan itu kemudian terusir (diusir-usir) oleh yang menyeret.

Pangurakan juga dibahas dalam Brotodiningrat (1978) dengan nama Pengurakan. Dalam kaitannya dengan tahapan semedi kepada Tuhan, seorang manusia melakukannya melalui garis lurus dengan pandangan dan tujuan ke arah utara menatap Tugu Yogyakarta hingga Gunung Merapi. Dalam perjalanan semedi, terdapat sejumlah godaan yang dapat mengganggu prosesnya. Godaan itu digambarkan seperti wanita-wanita yang cantik jelita, makanan-minuman, pakaian, dan wangi-wangian yang terdapat di Pasar Beringharjo yang terletak setelah simpang empat ke arah utara Pangurakan. Hal ini digambarkan Brotodiningrat dalam bukunya "*simpang empat di sebelah utara Pengurakan menggambarkan goda-goda dalam semadi. Kita tidak boleh ke kanan atau ke kiri. Tetapi terus ke tujuan kita*".

Tabel 1. Nama Jalan Pangurakan dari Masa ke Masa

Jalan	Sumber	Abad Ke-20	Abad Ke-21
Pangurakan	SK Gubernur DI Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017	<i>Kadaster Straat</i>	
	Topografische Dienst in Nederland-Indie (1925)	<i>Kadasterstr (Kadasterstraat)</i>	
	Dwidjaraja (1935)	Pangoerakan	
	Brotodiningrat (1978)	Pengurakan	
	Atmojo (1973)	Trikora	
	Salamun (1988)	Tri kora	
	Adam (2003)	Pangurakan	
		Pamurakan	
	Pigeaud (2003)	Kadasterstraat	
		Pangurakan	
		Pamurakan	
	Sunjata dkk. (1995)	Pangurakan	
	Zoetmulder (1995)	Pangurakan	
	Gupta dkk. (2007)	Pangurakan	
			Gladhag
Priyono dkk. (2015)		Gapura Pangurakan Jawi	
		Gapura Pangurakan Nglèbèt	
Google Maps (2017)		Pangurakan Yogyakarta	
Ashadi (2017)		Pangurakan	
		Geladhag	



Sumber: Sunjata dkk. (1995)

Gambar 9. Bangsal Pangurakan dilihat dari selatan Keraton Yogyakarta.



Sumber: Atlas of Mutual Heritage (t.t)

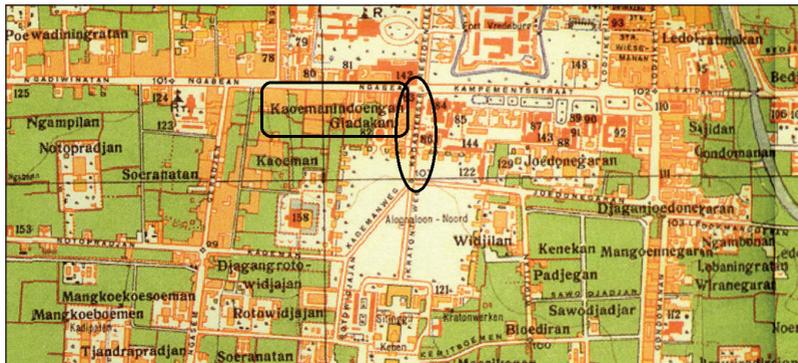
Gambar 10. Gerbang Pangurakan, Lukisan Karya Johannes Rach (1760–1780)

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Ket.: *Gapura Pangurakan Jawi* (Sisi Utara) dan *Gapura Pangurakan Ngelebet* (Sisi Selatan)
 Sumber: Google Maps (2017)

Gambar 11. Dua dari Tiga Gapura yang Tersisa di Jalan Pangurakan



Sumber: Topografische Dienst in Nederland-Indie (1925)

Gambar 12. *Kadasterstraat* (dalam Elips) dan *Kaoemandoengan Gladakan* (dalam Segi Empat)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam konsep Lanskap Linguistik, penulisan nama jalan yang disertai dengan aksara setempat, yang dalam hal ini adalah hanacaraka, seakan-akan merefleksikan kepada publik bahwa tempat itu merupakan wilayah pakai bahasa Jawa. Aksara hanacaraka ditulis tepat di bawah aksara Latin, tetapi dengan ukuran sedikit lebih kecil. Landry dan Bourhis (1997) menyebut bahwa plang nama jalan yang dikategorikan sebagai ekabahasa, dwibahasa, ataupun multibahasa merupakan gambaran keberagaman kelompok bahasa yang ada di wilayah tersebut.

Dalam fungsi simbolisnya, plang Jalan Pangurakan dinilai sebagai perwujudan identitas Jawa yang tidak lain sebagai kelompok mayoritas di Yogyakarta. Sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dan dikategorikan sebagai bahasa edukasional oleh Ethnologue (t.t.), bahasa dan aksara Jawa menjadi lambang bahasa yang dominan di Kota Yogyakarta. Negro (2008) juga menyebut penyematan toponimi menjadi bentuk ekspresi yang nyata diperlihatkan oleh pemerintah setempat. Landry dan Bourhis (1997) juga menjelaskan bahwa plang nama jalan yang menerakan bahasa kelompok mayoritas mengindikasikan kelompok bahasa tersebut secara tidak langsung mengendalikan lanskap, termasuk segenap sektor di dalamnya, seperti ekonomi, media massa, dan fungsi lain, seperti kesehatan, pertahanan, dan administrasi publik. Dominasi ini pun telah dilegitimasi dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (lihat Yudoyono, 2017).



Sumber: Erikha (2017)

Gambar 13. Nama Jalan Ganda: Trikora dan Pangurakan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebagai sebuah tanda, plang nama jalan dianggap telah menjadi perangkat yang memiliki aspek kesejarahan. Bloomaert (2013) menyebutkan bahwa terdapat harapan normatif yang dikandung dari hubungan antara ruang dan norma yang hendak diungkapkan aspek kesejarahannya. Dalam hal ini, harapan normatif yang diinginkan oleh Keraton Yogyakarta melalui penamaan jalan telah diwakili oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam konsep Kelekatan Toponimik, terdapat bahasan mengenai hubungan nama dan memori-kesejarahan. Keduanya termasuk ke dalam bagian identitas toponimik, subkonsep yang menggali aspek seperti memori-kesejarahan, emosi, peristiwa, dan komunitas. Pada Ekstrak 1 diperlihatkan temuan yang mengaitkan nama dan aspek memori-kesejarahan.

Ekstrak 1

*Kalo dari ini karena Yogyakarta sendiri kota perjuangan, saya sebut kota perjuangan karena memang tempat ibu kota kedua setelah Jakarta, nah menurutku lebih suka Trikora karena menyentuh **nilai-nilai nasionalisme**. (Dipa, komunikasi personal, 25 Agustus 2017)*

Berdasarkan pada ekstrak tersebut, Dipa lebih memilih penamaan jalan yang lama, yaitu Trikora, daripada nama baru (Pangurakan). Hal ini adanya asosiasi terhadap Yogyakarta sebagai kota perjuangan. Perjuangan ini mengacu pada Trikora sebagai upaya politis Presiden Sukarno yang waktu itu ingin menjadikan Papua bagian barat menjadi bagian Indonesia. Ungkapan Dipa juga menegaskan aspek nasionalisme karena mengandung seruan dan upaya mengintegrasikan sebuah wilayah dengan tujuan kekuatan geopolitis Indonesia kala itu. Dalam Lauder dan Lauder (2016), dijelaskan bahwa penelusuran nama-nama pelabuhan memuat unsur kesejarahan Indonesia sebagai bangsa maritim. Kesejarahan, identitas kebangsaan, dan nasionalisme ini berkaitan erat dengan keinginan pemerintah saat ini.

Augustins (2004, 289) memaparkan, "*What kind of action is street naming? Street names necessarily express something essential that has to be commemorated by means of an enduring mark*". Kutipan

ini sesuai dengan pelekatan nama pada sebuah jalan untuk tujuan memperingati suatu peristiwa. Penamaan sebuah jalan merupakan praktik peringatan yang menghubungkannya pada pandangan relational antara pembuatan sebuah tempat, memori yang dikandung, dan modal simbolis (Rose-Redwood, 2008). Alun-alun Lor yang berhadap-hadapan dengan ruas jalan ini digunakan sebagai tempat Presiden Sukarno mendeklarasikan Trikora menjadikan. Ini yang dimaksud Rose-Redwood sebagai rupa hubungan tiga unsur, yaitu *place making*, memori kesejarahan, serta simbol kekuasaan dan eksistensi penguasa yang lama.

Ihwal relasi kuasa juga ditampilkan pada komentar Fitra, seperti tampak pada ekstrak 2.

Ekstrak 2

Terus kalo dalam perubahan nama Trikora menjadi Pangurakan, yang mana itu kepentingannya lebih ke arah Keraton, apa ya filosofis yang menurut mungkin menurut Sultan atau siapa, ya kalau menurut saya ya karena itu titah dari Sultan, ya setuju. Mau setuju enggak setuju, ya setuju gitu. (Fitra, komunikasi personal, 25 Agustus 2017)

Pengubahan nama dalam konteks politik dapat dilihat sebagai bentuk relasi kuasa. Berdasarkan komentar pada Ekstrak 2, ditemukan bahwa meskipun dalam pendapat awal pribadi tidak menyetujui atas perubahan nama, sikap tersebut menjadi berubah saat menyadari bahwa itu merupakan perintah Sultan, raja Keraton Yogyakarta. Giosa (2011) menilai terkadang dalam konteks Yogyakarta, peran masyarakat biasa dalam menggunakan ruang kota menjadi penting, termasuk harmonisasi, kesatuan, serta keterpaduan menjadi *condition sine qua non* atas legitimasi kekuasaan Sultan. Relasi yang saling terkait ini dilakukan oleh masyarakat sebagai kelompok yang diatur oleh Sultan, dan Sultan sebagai sosok yang berwenang atas kebijakan yang dibuat pada wilayah politisnya. Respons kepatuhan terhadap Sultan, meskipun ada perasaan yang berbeda, sangat tipikal pada masyarakat yang hidup di kawasan yang unsur keraton atau kerajaannya masih

kental. Harmonisasi yang disebut De Giosa di atas senada dengan pentingnya keseimbangan bagi masyarakat Jawa (Lombard, 2008).

Kuasa atas penggunaan suatu nama pada ruang publik merupakan bentuk hegemoni (Alderman, 2000). Sebuah lanskap menjadi penanda identitas dan peringatan atas kelompok atau komunitas mayoritas. Selain itu, pihak yang berwenang dapat menolak dan memproduksi penanda “teritorialnya” dengan memberi nama pada suatu wilayah. Dalam konteks komentar Fita dapat diartikan bahwa Sultan memiliki kepentingan dalam memberikan nama pada teritori yang melingkupi Keraton Yogyakarta, apalagi Jalan Pangurakan berada tepat di depan Keraton. Hal ini tentu menjadi signifikan terlepas dari alasan perubahan nama dari nama sebelumnya, Jalan Trikora. Hal ini disadari betul oleh Fita sehingga ia tetap menyetujui perubahan nama jalan tersebut.

Pengubahan nama jalan menghasilkan perbandingan antara nama lama dan nama baru. Terkadang nama lama dipandang lebih positif jika dibanding dengan nama lama.

Ekstrak 3

*Saya personally itu saya enggak begitu cocok dengan nama Pangurakan karena dulu ibu saya itu sering bilang “urakan”, urakan itu adalah **melabeli untuk anak yang nakal**. Jadi Pangurakan kan, lantas ia memiliki hubungan dengan Pangurakan. Tapi saya itu **kurang ear catching** sekali, he-he-he... (Fajri, komunikasi personal, 25 Agustus 2017).*

Menurut Zoetmulder (1995), secara etimologis, *pangurakan* pada dasarnya berarti ‘desakan’ atau ‘dorongan’; adapun makna kedua yang sesuai dengan konteks lanskap lingkungan keraton berarti lapangan persegi di sebelah utara keraton (pintu gerbang yang menuju kepada raja). Nilai rasa negatif disebabkan oleh pandangan bahwa leksikon Pangurakan diasosiasikan dengan urakan, yang bermakna seseorang yang tidak bisa diatur. Informan teringat akan ujaran ibunya, bahwa urakan merupakan pelabelan atas seorang anak yang nakal dan tidak

patuh terhadap orang tuanya. Lebih lanjut, berdasarkan pada elemen bahasa, nama ini juga dinilai kurang begitu mudah ditangkap telinga sehingga bisa saja menjadi sulit dikenali.

Dalam praktiknya, nama dapat berfungsi praktis, sosial, afektif, dan informatif (Ainiala dkk., 2016). Fungsi afektif bermuara pada nilai rasa positif atau negatif terhadap toponimi. Dalam contoh berkonteks Finlandia, Sirén (2005, dalam Ainiala dkk., 2016) telah mengkaji bagaimana sikap terhadap karakteristik dan lokasi pada nama tempat di Pirkkala, kota madya di Finlandia Barat. Pirkkala diberi nama-nama lain, seperti Nälkäläakso (lembah kelaparan) dan Ryysyranta (pantai kelas bawah). Bagaimanapun, ini merupakan kategorisasi sosial (stereotipe) dan deskripsi terkait fisik tempat tersebut yang muncul dari persepsi masyarakat terhadap toponimi.

Konsep *sangkan paraning dumadi*, yang berarti ‘asal-tujuan manusia’, menjadi dasar dalam pengembalian sejumlah nama jalan utama di Kota Yogyakarta. Nama jalan secara semantis dapat ditelusuri berdasarkan pada makna pembentuknya. Pada penjelasan Ekstrak 3, penulis telah menyebutkan makna semantis atas Pangurakan dan diartikan sebagai ‘desakan’ atau ‘dorongan’. Sementara itu, pada Ekstrak 4, Fajri menjabarkan Pangurakan dalam aspek pragmatis atas nama tersebut. Makna pragmatis Pangurakan berarti anjuran agar seseorang untuk mengeluarkan nafsu yang tidak baik sebelum pulang kembali kepada Tuhan. Makna ini sangat filosofis dan memuat budaya Jawa yang diwakili oleh Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Keraton sebagai pusat kebudayaan dan tradisi berperan dalam melekatkan ajaran hidup dan kebaikan bagi masyarakatnya. Pendapat Augustins (2004) menguatkan bahwa nama jalan dapat mengekspresikan realitas sosial dan merujuk pada nilai-nilai lama yang dianut oleh sebuah kelompok masyarakat.

Ekstrak 4

*Pangurakan itu adalah bagaimana mengeluarkan **mengeluarkan nafsu yang tidak baik** karena filosofi tersebut kan adalah sangkan paraning dumadi, (sangkan paran). Sangkan paran itu dari Krapyak sampai*

Keraton; kemudian paran itu dari Tugu sampe ke Keraton (sangkan paraning). Kalau orang Islam kita mengenal istilah innalillahi wa innailaihi raji'un. Nah itu itu sama, sangkan paran itu adalah sama bagaimana seorang raja itu nanti dia akan kembali lagi ke keraton dalam wujud yang lain ketika dia sudah sudah mangkat (Fajri, komunikasi personal, 25 Agustus 2017).

Saat ditanyai perihal elemen aksara Jawa yang terdapat pada papan nama jalan, ia pun berpendapat (pada Ekstrak 5) bahwa ini dapat dimanfaatkan sebagai upaya pelestarian hanacaraka sebagai bagian dari bahasa Jawa. Sebagai sarjana yang pernah mendalami kesusastraan Jawa, ia juga mensyaratkan penulisan yang tepat saat menggunakan aksara ini pada papan nama jalan. Ihwal penggunaan aksara ganda pada penamaan ini sudah diatur oleh pihak Keraton melalui Undang-Undang Rijksblad 1922 Nomor 2. Undang-undang ini berisi aturan tentang bagaimana penulisan papan nama dan penomorannya di kampung dan rumah. Aturan ini tertuang dalam penjelasan yang dikutip dalam Gupta dkk. (2007, 6).

angangkani kampong lan omah-omah, blabag utawa liyane kang isi Tulsan jenenge kampong utawa wong ing sajroning kutha Ngayogyakarta, Papan 74x40 cm blabag kang nerangke jeneng kampong mau saka kampong kang kidul dewe mengaler, angka cilik ing sisih kidul angka gedhe ing sisih lor. Ing butulane dalan-dalan kang lumebu ing-siji-sijining kampong ing sajrone kutha Ngayogyakarta. Ananging ing mung kapilih butulan kang perlu-perlu bae, iku kudhu kadidekan blabag utawa liyane nganggo wragad saka nagara, kang isi tulisan amratelakake angkane lan jenenge kampong, katulis nganggo angka lan aksara latin, sarta ing ngisore dirangkepi nganggo aksara Jawa, wujuding angka lan aksara-aksaran mau putih katulis ing dasar ireng.

Ekstrak 5

*Sebenarnya lebih kepada **manfaat kelestarian aksaranya** itu saja, tetapi ee yang penting intinya kalo saya ketika penulisannya itu benar itu tidak masalah (Fajri, komunikasi personal, 25 Agustus 2017).*

2. Jalan Margo Mulyo (d.h Jalan Ahmad Yani)

Jalan Margo Mulyo memiliki panjang 559,8 meter dan terletak antara simpang empat Kantor Pos Besar (Jalan Panembahan Senopati, Jalan Trikora, Jalan KH Ahmad Dahlan) dan simpang empat Suryatmajan (Jalan Malioboro, Jalan Pajeksan, dan Jalan Suryatmajan). Jalan ini termasuk ke dalam Kecamatan Gondomanan (GM). Di sepanjang jalan ini, terdapat banyak sekali toko dan pedagang kaki lima, dan sejumlah bangunan yang menjadi ciri khasnya, seperti Gedung Agung (Istana Yogyakarta) yang dulu digunakan sebagai tempat residen Belanda; Pasar Beringharjo (dahulu disebut Pasar Gedhe hingga akhirnya Sultan Hamengku Buwono IX menggantinya dengan nama Beringharjo sebagai peringatan pembangunan kota dan pasar dari hutan beringan/beringin); dan Gereja Margo Mulyo.

Pada mulanya, Jalan Ahmad Yani ini bernama Jalan Margo Mulyo (Salamun, 1988; Gupta dkk., 2007; Priyono dkk., 2015). Penamaan Margo Mulyo karena pemaknaan bahwa jalan itu merupakan jalan kemuliaan dalam hidup. Namun, dalam peta klasik, ruas ini diberi nama Residentielaan (Salamun, 1988; Tirtakoesoema, 2003; Gupta dkk., 2007) karena pada sebelah timur dari jalan tersebut terdapat Loji Kebon/Karasedinan. Pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX, tepatnya pada 1955, jalan ini dikembalikan menjadi Jalan Margo Mulyo.

Jenderal Ahmad Yani (varian lain Ahmad Yani dan A. Yani) diresmikan menjadi nama jalan pada 1965. Menurut Salamun, nama tersebut diberikan karena Ahmad Yani merupakan salah satu pahlawan revolusi yang berjasa kepada Indonesia. Ia terlibat dalam sejumlah operasi militer, seperti penumpasan Sakamura Butai di Magelang (1948), PKI di Madiun, DI/TII di Jawa Tengah, PRRI Permesta di Sumatera Barat, hingga menjadi korban pemberontakan Gerakan 30 September 1965.

Salah satu tinggalan bangunan yang relevan dengan nama jalan ini adalah Gereja Margo Mulyo. Gereja ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan diresmikan pada 11 Oktober 1857



Sumber: Topografische Dienst in Nederland-Indie (1925)

Gambar 14. *Residentielaan*

dengan nama awalnya Gereja Protestan atau dalam bahasa Belanda, yaitu *Indische Kerk* (Suaka dan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 1999). Menurut narasumber N. Sopaheluwakan (komunikasi personal, 28 September 2017), nama Gereja Margo Mulyo berasal dari nama Jalan Margo Mulyo. Hal ini diperkuat oleh tinggalan tulisan pada bagian depan atas bangunan luar gereja tersebut (lihat Gambar 15).

Dalam sebuah berita di koran *Sinar Harapan*, terdapat dua nama yang digunakan pada gereja tersebut, yaitu Gereja Kristen Protestan Yogyakarta dan Gereja Yogyakarta (Natal Bersama Bung, 1983). Tidak dijelaskan apakah penamaan itu sesuai dengan konteks isi berita yang membahas kehadiran Presiden Sukarno pada perayaan hari raya Natal 24 Desember 1947 di Gereja Margo Mulyo, atau penamaan itu digunakan pada masa artikel koran tersebut dibuat, yaitu pada



Sumber: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (1999)

Gambar 15. Plang Nama Gereja Margo Mulyo (Tertulis Marga Mulya)

1983. Namun, penulis menduga penamaan tersebut sebagai varian atas nama gereja Margo Mulyo.

Tabel 2. Nama Jalan Margo Mulyo dari Masa ke Masa

Jalan	Sumber	Abad Ke-20	Abad Ke-21
Margo Mulyo	SK Gubernur DI Yogyakarta Nomor 108 Tahun (2017)	<i>Residentielaan</i>	
	Topografische Dienst in Nederland-Indie (1925)	<i>Residentielaan</i> Petjinan	
	Tirtakoesoema (2003)	<i>Residentielaan</i>	
	Salamun (1988)	<i>Residentielaan</i>	
	(Gupta dkk., 2007)	<i>Residentielaan</i>	
	Atmojo (1973)	Achmad Yani	
	Smithies (1986)	Jen. A. Yani	
Margo Mulyo	Salamun (1988)	Jendral Ahmad Yani Margo Mulyo	
	Gupta dkk. (2007)		Jenderal Ahmad Yani
	Priyono dkk. (2015)		Marga Mulya
			Margamulya
	Google Maps (2017)		Margo Mulyo/A. Yani

Jalan Margo Mulyo merupakan nama baru yang diberikan pada ruas sebelumnya, Jalan Ahmad Yani. Pergantian ini diresmikan langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Secara geografis, jalan ini terbentang dari titik nol, dan di jalan ini pula terdapat Istana Kepresidenan yang berhadapan dengan Benteng Vredebrug. Pasar Beringharjo pun terletak di ruas jalan ini. Di depan Pasar Beringharjo juga terdapat Gereja Margo Mulyo. Gereja ini dianggap sebagai representasi atas nama Jalan Margo Mulyo. Gereja ini dikategorikan sebagai gereja klasik karena dibangun sejak masa kolonial, yaitu 1830.

Secara kosakata, penamaan Margo Mulyo dikategorikan sebagai bagian dari bahasa Jawa. *Margo* atau *mergi* diartikan sebagai ‘jalan’, sedangkan *mulya* bermakna ‘kemuliaan’ (Zoetmulder, 1995). Secara filosofis, nama jalan ini diartikan sebagai tahapan saat manusia menemukan keutamaan hidup dan mengajarkan kebaikan menurut ajaran para wali agar dapat memperoleh kemuliaan dalam hidup (Priyono dkk., 2015).



Sumber: Erikha (2017)

Gambar 16. Plang Jalan Margo Mulyo



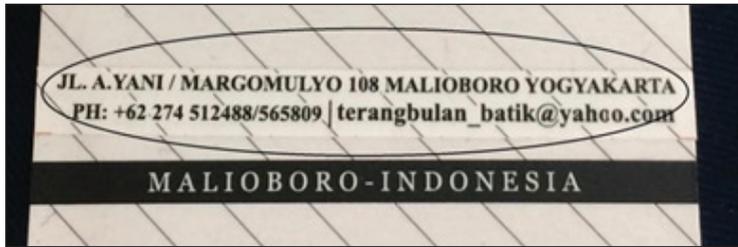
Sumber: Erikha (2017)

Gambar 17. Nama Ganda pada Papan Reklame

Gambar 17 memperlihatkan bentuk penggunaan nama ganda yang mencerminkan fungsi informasional dalam konsep LL. Dengan adanya tulisan nama jalan, pengunjung jalan atau pelanggan toko dapat dimudahkan dengan petunjuk bahwa keberadaan toko ada pada jalan yang dulunya bernama Ahmad Yani, meskipun sekarang telah bertukar menjadi Jalan Margo Mulyo. Pemakaian nama ganda dilakukan karena nama lama telah tertanam kuat dalam pikiran masyarakat Yogyakarta. Pemilik toko sepenuhnya sadar akan pergantian nama jalan sehingga diperlukan adaptasi atas nama jalan yang baru mengikuti apa yang diinstruksikan pemerintah. Penggunaan nama ganda seperti ini dianggap sebagai bentuk transisi dan berlaku sementara hingga nama jalan yang baru dianggap telah umum dikenal. Ini sesuai dengan pendapat Kostanski (2016a, 162):

This is not to say that the existing names should be retained forever, but consideration should be given to retaining the existing names as dual names with the restored names, until such time as the restored names are in the common lexicon and the community have come to accept their usage (Kostanski, 2016a, 162).

Gambar 18 merupakan salah satu temuan varian penulisan nama jalan. Setelah ditelusuri, keberadaan toko terletak di Jalan Margo Mulyo, yang sebelumnya bernama Jalan Ahmad Yani. Penulisan yang didahulukan adalah nama jalan yang lama, alih-alih nama baru. Di kartu nama tersebut juga diterakan toponimi Malioboro sebanyak dua kali (sisi atas *Malioboro Yogyakarta*, sedangkan pada sisi bawah



Sumber: Erikha (2017)

Gambar 18. Pemakaian Tiga Nama Jalan

Malioboro-Indonesia). Perlu juga untuk ditelusuri lebih lanjut soal referen yang hendak dirujuk oleh pemilik toko, baik Malioboro sebagai kawasan maupun sebagai bentuk konvensi di kalangan pedagang setempat bahwa jalan yang dirujuk pada bangunan toko tersebut adalah Jalan Malioboro. Hal lain yang dapat didapatkan ialah peran Malioboro sebagai nama tempat ataupun nama jalan telah menjadi rujukan yang krusial bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya mereka yang berdagang di kawasan tersebut.

Pada Gambar 19, dipaparkan contoh lain bagaimana penyematan Malioboro sebagai toponimi pada papan reklame. Hal ini menandakan bahwa Malioboro merupakan penanda yang istimewa untuk menunjukkan informasi tempat toko tersebut. Penamaan Jalan A. Yani dianggap sebagai penunjuk formal dan sesuai dengan administrasi yang digariskan pemerintah kota, sedangkan penamaan Maliboro dinilai dapat mempermudah calon konsumen/konsumen sewaktu mengunjungi toko ini. Selain itu, Malioboro memiliki nilai tambah secara ekonomi. Komodifikasi Malioboro sebagai ruang merupakan bentuk nilai tambah bagi pedagang yang beraktivitas di Jalan Margo Mulyo.

Sepintas, peran Malioboro pada Jalan Margo Mulyo dapat kita tarik ke belakang dalam konteks sejarah. Sejak awal abad ke-20, Malioboro menjadi kawasan bisnis atau tempat para pedagang mendirikan toko hingga berjualan di pinggir jalan. Darmosugito (1956, 26) pernah membahasnya seperti dalam kutipan berikut.



Sumber: Erikha (2017)

Gambar 19. Variasi Pemakaian Nama Jalan

karena sebagai kebiasaan orang-orang yang hidupnya melulu berdagang, maka mereka sama berumah tangga di tepi jalan, dengan toko-tokonya yang berisi bermacam-macam keperluan rumah tangga. Ini pun merupakan salah satu faktor yang banyak membantu meramaikan Malioboro (Darmosugito, 1956, 26).

Pernyataan ini berkaitan dengan ikhtiar pemerintah setempat untuk merevitalisasi kawasan Malioboro, termasuk Jalan Margo Mulyo, sebagai salah satu tujuan wisata. Leeman dan Modan (2010) mengemukakan bahwa penyebarluasan simbol-simbol budaya lokal dan budaya nasional dapat menarik perhatian dan kunjungan turis sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah lokal. Leeman dan Modan juga mencontohkan bagaimana kelompok etnik minoritas di Pecinan di Washington, D.C., telah menjadi target pemasaran pariwisata. Berbeda dengan konteks Yogyakarta, bahasa dan ortografi Jawa yang notabene merupakan etnik mayoritas juga dapat dijadikan sebagai penarik bagi para wisatawan.

Ben-Rafael (2009) menyampaikan bahwa plang nama jalan memuat aspek sosiologis dan penanda yang penting bagi masyarakat. Fungsi simbolis pun dapat berperan dalam konstruksi sebuah tempat ataupun ruang sosial (Shohamy & Waksman, 2009). Selain itu, fungsi simbolis dapat melekat pada individu ataupun masyarakat yang menyaksikannya sehingga akan menjadi pengalaman pribadi tersendiri yang mungkin tidak ditemui saat melihat plang nama jalan

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Erikha (2017)

Gambar 20. Penulisan Jalan Malioboro (elips sisi kiri) ditaruh pada ruas Jalan Margo Mulyo (elips sisi kanan).

di tempat lain. Ben-Rafael (2009) menjelaskan dua struktur tambahan mengenai LL dalam konteks area urban akhir-akhir ini, yaitu identitas kolektif dan relasi kuasa. Penggunaan bahasa berikut aksara Jawa di samping bahasa Indonesia dan aksara Latin merupakan cermin multikulturalisme. Hal ini menyiratkan adanya identitas yang hidup, tidak hanya Jawa sebagai mayoritas, tetapi juga non-Jawa. Kehadiran bahasa-aksara Jawa dalam penamaan di ruang publik merupakan produk yang diproduksi oleh pemerintah sebagai bentuk relasi kuasa dengan masyarakat yang menggunakannya. Pemarkah bahasa ini merupakan bentuk perwujudan eksklusi dan inklusi terhadap identitas mana yang ditonjolkan dan mana yang tidak.

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana ikhtiar pengubahan nama tempat dengan cara mengembalikan ke nama asalnya (*indigenous name*) dapat memantik pendapat seperti yang dipaparkan pada Ekstrak 6.

Ekstrak 6

*Kalo saya seneng Margo Mulyo karena ya dilihat dari sisi sejarah, karena **keistimewaan Jogjakarta itu tetep bisa dipertahankan** dengan adanya budaya-budaya yang dulu, apa, hilang, kita angkat kembali (Sukanto, komunikasi personal, 25 Agustus 2017).*

Berdasarkan komentar tersebut, Sukanto memperlihatkan adanya ikatan antara nama yang baru dan identitas yang dimilikinya sebagai masyarakat Yogyakarta. Ia berharap penamaan baru yang menggunakan bahasa Jawa ini menjadi upaya yang dapat mengangkat serta melestarikan budaya Jawa yang, menurutnya, sempat atau telah hilang. Seddon (1997, dalam Kostanski (2016a)) menguatkan bahwa kosakata dalam sebuah lanskap memuat unsur budaya yang menyiratkan nilai-nilai dan relasi kuasa. Pernyataan Sukanto sebagai masyarakat asli di sekitar jalan tersebut juga selaras dengan pandangan Bodenhorn dan Vom Bruck (2006) bahwa nama menjadi bagian dari kebudayaan dan konteks sosial yang dimaknai dan sangat berarti bagi sebuah identitas.

Konteks globalisasi saat ini tentunya berdampak pada nilai-nilai lokal yang ada di suatu tempat. Curtin (2009) membahas bagaimana bahasa ditampilkan di ruang publik sebagai bentuk identitas kelompok. Jika dalam kasus lain penggunaan bahasa dan aksara lokal sebagai upaya protes atas romanisasi penulisan terhadap bahasa lokal, apa yang dibahas Curtin dalam konteks Taiwan berkebalikan dengan konteks di Yogyakarta. Penggunaan aksara hanacaraka bukan upaya menyaingi aksara Latin. Akan tetapi, penggunaan ini merupakan bentuk pelestarian bahasa dan aksara Jawa. Ini sesuai dengan imbauan Sultan Hamengku Bowono X bahwa hanacaraka perlu dihidupkan kembali sehingga dapat menyangga kebudayaan nasional. Salah satu caranya adalah memberikan peranan dan jiwa yang baru sehingga dapat menampung interpretasi baru di masa yang akan datang (Rochkyatmo, 1997).

Selanjutnya, melalui konsep Onomastika Setempat, peneliti menyajikan persepsi nama dan elemennya, yakni sikap positif terhadap nama lama. Selain itu, dikaji pemakaian bahasa dan aksara lokal

pada nama. Sikap positif terhadap nama berkaitan dengan kelekatan (*attachment*) seseorang terhadap nama jalan. Ekstrak 7 merupakan data yang relevan.

Ekstrak 7

Kalo menurut saya sebenarnya gak masalah bagi pribadi saya. Tapi itu kan sejarah. Jadi sejarah dari dulu mungkin namanya udah Margo Mulyo, njuk diganti dengan A. Yani, A. Yani itu pahlawan yang besar gitu. Jadi, saya sebenarnya cukup menyayangkan, yo diganti ke mana gitu A. Yani-nya itu. Padahal, setiap pahlawan itu kan jadi jalan-jalan protokol kayak Sudirman, A. Yani itu termasuk, kalo di kota-kota lain, mesti jalan protokol. (Zali, komunikasi personal, 25 Agustus 2017)

Penggunaan nama individu (antroponimi) ke dalam nama-nama jalan (odonim) biasanya ditandai sebagai peringatan atas peristiwa tertentu. Nama Jenderal Ahmad Yani (lebih umum disebut A. Yani) telah digunakan dalam nama-nama jalan utama di kota di Indonesia. Ahmad Yani merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S) pada 1965. Untuk mengenang nama salah satu jenderal yang gugur tersebut, pemerintah pada zaman Orde Baru mengabadikan nama-nama pahlawan revolusi pada jalan-jalan raya. Dalam studi odonim, ihwal ini disebut sebagai nama peringatan (*commemorative name*). Prinsipnya, nama jalan merupakan wahana yang menjembatani antara masa lalu dan masa kini (Alderman, 2003). Nama jalan peringatan (seperti toponimi lainnya) mengacaukan sejarah dan geografi serta menggabungkan masa lalu yang diperingati ke dalam latar kehidupan manusia. Nama peringatan dibungkus melalui bahasa serta telah menjadi partisipan aktif dalam konstruksi dan persepsi realitas sosial (Azaryahu, 1997).

Dalam komentarnya, Zali menyebut Ahmad Yani sebagai pahlawan yang penting. Baginya, pemakaian nama pahlawan besar pada nama jalan merupakan ikhtiar melekatkan sejarah pada tempat tersebut. Ia malah menyarankan agar nama yang baru ditempatkan saja

pada jalan-jalan lain. Sikap dukungan yang kuat terhadap nama lama menjadikan Zali menentang pemakaian nama baru. Hal ini juga tidak lepas dari kelekatan yang telah terbangun antara ia dan tempat (dalam konteks ini Jalan Ahmad Yani). Berdasarkan pada konsep *critical toponymies*, sebuah nama digunakan sebagai alat kontrol untuk kemudian ditoreh dan diwujudkan ke dalam bentuk budaya dan ideologi politik (Alderman, 2008). Nama A. Yani tentunya memuat sejarah masa lalu tentang penamaannya. Akan tetapi, Margo Mulyo dianggap sebagai nama yang diwariskan oleh pendahulu Sultan Hamengku Bowono X. Oleh karena itu, Sultan menggunakan wewenangnya untuk mengubah nama guna memperkuat filosofi *sangkan paraning dumadi*.

Ekstrak 8

*Jadi, kalau memang dikasih nama-nama itu bahasa Jawa itu, saya bagus sekali juga, untuk mengenang, memberitahukan anak-anak kita besoknya itu gak akan hilang Bahasa Jawanya. Jadi, masih **tetep langgeng itu bahasa Jawa** (Jundi, komunikasi personal, 25 Agustus 2017).*

Pada Ekstrak 8, diperlihatkan bahwa Jundi, masyarakat yang tinggal di belakang Jalan Margo Mulyo dan merupakan masyarakat asli Yogyakarta, memiliki sikap positif terhadap elemen bahasa Jawa pada penamaan jalan yang diubah. Ia sendiri memiliki perhatian terhadap pelestarian bahasa Jawa. Menurutnya, anak-anak saat ini sudah jarang menggunakan bahasa Jawa dan cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Dengan pengembalian nama-nama baru menggunakan nama-nama berbahasa Jawa diharapkan membuat bahasa ini tetap bertahan.

Pada tema pemakaian bahasa dan aksara lokal, objek nama jalan ini menggunakan bahasa Jawa karena sesuai dengan tujuan awal, yaitu mengembalikan nama-nama lama dan menghidupkan kembali filosofi budaya dan sejarah yang dimiliki Keraton Yogyakarta. Seperti pada penjelasan sebelumnya, ini berasal dari Undang-Undang Rijksblad

1922 Nomor 2 yang mengatur penamaan nama-nama kampung menggunakan aksara Latin dan aksara Jawa (Gupta dkk., 2007). Hingga saat ini, penamaan di kampung dan jalan-jalan di Kota Yogyakarta menggunakan aksara Latin dan Jawa dan didominasi dengan bahasa Jawa.

3. Jalan Malioboro

Jalan Malioboro terletak di antara pintu kereta api Stasiun Tugu dan simpang empat Suryatmajan yang terdiri atas Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Terdapat dua informasi mengenai panjang jalan, yakni 736 meter (Salamun, 1988) dan 748,8 meter (Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2017). Meskipun demikian, terdapat pendeskripsian lain yang menggambarkan Malioboro terbentang dari Tugu Pal Putih di bagian utara hingga ke Pasar Beringharjo di bagian selatan (Usman dkk., 2006).

Salamun (1988) menilai jalan ini merupakan jantung Kota Yogyakarta dan menjadikannya sebagai lalu lintas yang ramai. Ia juga mendeskripsikan terdapat tanaman hias dan lampu “rahyang” di sepanjang jalan itu. Selain itu, dijelaskan bahwa Jalan Malioboro sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan (Darmosugito, 1956; Salamun, 1988). Usman dkk. (2006) menjelaskan bahwa Malioboro tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi (seperti penjual batik, angkringan, hingga tukang becak), tetapi juga berfungsi sebagai tempat para seniman mengekspresikan kreativitasnya. Pada bagian timur jalan ini, terdapat pusat-pusat pemerintahan, seperti Kantor Gubernur (Kepatihan), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Dinas Pariwisata, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Malioboro sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi tidak terlepas dari peran kelompok etnis China yang berdagang dan mendirikan rumah-rumah toko. Ada kemungkinan ini berawal dari pengangkatan seorang kapiten oleh Sultan Hamengku Buwono pertama pada 1755. Kapiten tersebut bernama Tan Jin Sing (Babah Djiem Sing) dengan nama Jawa K.R.T. Secodingrat. Ini dapat diartikan bahwa etnis

China telah masuk ke lingkaran kerajaan dan diperlihatkan dengan adanya wilayah pecinan di Setyodingratan di bagian timur Kantor Pos (Usman dkk., 2006).

Seiring berjalannya waktu, pada 1900 Jalan Malioboro menunjukkan aktivitas ekonomi yang makin baik. Etnis China mulai membangun toko yang menjual perlengkapan sehari-hari, emas, dan pakaian. Lebih lanjut, Usman dkk. menguatkan bahwa sejak 1916 Malioboro bagian selatan terkenal dengan sebutan Pecinan. Pada peta zaman kolonial (1925), disebutkan bahwa pembagian ruas Jalan Malioboro adalah Jalan Malioboro yang dibatasi rel kereta Stasiun Tugu hingga simpang tiga Jalan Dagen, dan Jalan Pecinan yang dibatasi antara simpang tiga Dagen simpang empat Jalan Pajeksan-Jalan Suryatmajan. Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, saat ini ruas Malioboro terbentang dari perlintasan rel kereta Stasiun Tugu hingga simpang empat Jalan Pajeksan-Jalan Suryatmaja-Jalan Margo Mulyo. Malioboro pun sebagai nama tempat pun pernah dipopulerkan dalam lagu milik Didi Kempot yang berjudul “Angin Malioboro” (Erikha dkk., t.t.).



Sumber: Topografische Dienst in Nederland-Indie (1925)

Gambar 21. Nama Malioboro (Elips Panjang) dan Petjinan (Garis Lurus)

Malioboro merupakan nama jalan yang telah ada sejak abad ke-18 (Salamun, 1988). Ini membuat ada beragam versi ihwal etimologi jalan ini seperti disebutkan dalam uraian berikut ini.

- a. Malioboro berasal dari nama seorang petinggi militer, yaitu Jenderal Marlborough. Pada waktu itu, ia datang bersama Gubernur Jenderal Raffles. Di bawah Sultan Hamengku Buwono III, Jenderal Marlborough adalah seorang komandan Garnisun, yang letaknya dekat Pasar Bringhamjo. Dengan penyesuaian lidah masyarakat Jawa, nama Jenderal Marlborough dilafalkan dengan Malioboro (Kedaulatan Rakyat edisi Minggu Wage, 13 Desember 1987, sebagaimana dikutip Salamun, 1988). Dalam Carey (1984; 2015) juga disinggung tentang John Churchill yang bergelar Duke of Marlborough I menjadi asal-usul penamaan yang populer. Kendati demikian, etimologi ini disangsikan oleh Carey dengan alasan Yogyakarta tidak pernah berada di bawah kendali militer Inggris secara formal. Inggris hanya pernah menduduki Yogyakarta pada saat invasi keraton pada 1812. Ini senada dengan kutipan Salazar (2010, 102): "*the first Duke of Marlborough, though the man had no relation whatsoever with Indonesian and died along before the short English occupation of Java (1811–1816)*" (Salazar, 2010, 102). Argumen ini dapat menjadi penguat bahwa keterkaitan yang hampir nihil antara *Malioboro* dengan Duke of Marlborough.
- b. Pada awal abad ke-18, Pangeran Mangkubumi mengadakan perang gerilya selama sembilan tahun di daerah Sakawati (saat ini Sragen) hingga daerah Kebanaran Purworejo. Akhirnya, Pangeran dari Surakarta mendapatkan tanah Mentook yang membujur dari Surakarta melewati Yogyakarta hingga Kutoarjo. Saat Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Hamengku Buwono I, di Sithinggil ia memandang ke utara dan mengingat bahwa kebahagiaan yang diperolehnya berasal dari pengembaraan panjang (*mulyaning saka beboro* atau *mulyo beboro*) melalui Jalan

Malioboro (Kedaulatan Rakyat edisi Minggu Wage, 13 Desember 1987, sebagaimana dikutip Salamun, 1988).

- c. Malioboro berasal dari kata Mulyo Boro, yakni salah satu pesanggrahan milik Wong Agung Menak Jayengrana. Tokoh ini mempunyai lima pesanggrahan, yaitu Tasik Wojo, Tanjung Sata, Tanjung Sori, Kuparnan, dan Mulyo Boro (Kedaulatan Rakyat edisi Minggu Wage, 13 Desember 1987, sebagaimana dikutip Salamun, 1988).
- d. Ada yang menyebut Malioboro berasal dari bahasa Jawa Kuno, yakni *malaya bhara*. *Malaya* berarti ‘berjalan’, ‘berkelana’, sedangkan *bhara* berarti ‘biara’, ‘kuil’, atau ‘peninggalan suci’. Pada abad ke-18, terdapat banyak peninggalan suci zaman Kerajaan Mataram Islam, seperti Pesanggrahan Garjitowati di dekat Beringharjo (Kedaulatan Rakyat edisi Minggu Wage, 13 Desember 1987, sebagaimana dikutip Salamun 1988).
- e. Malioboro berasal dari kata *malik o boro*, atau *baliklah boro* (pakaian keprajuritan Mataram). Ini merupakan aba-aba keprajuritan Keraton yang diinstruksikan setiap hari. Para prajurit ini berjalan mendekati Kepatihan, selanjutnya komandan mengeluarkan aba-aba “*malik o boro*”, dengan maksud meminta pasukan membalikkan salah satu hiasan dalam seragam militer dan mencabut pedang sebagai bentuk pemberian penghormatan (Kedaulatan Rakyat edisi Minggu Wage, 13 Desember 1987, sebagaimana dikutip Salamun, 1988).
- f. Rombongan prajurit Keraton pulang kembali ke Yogyakarta dari sebuah peperangan. Karena sampai di Yogyakarta pada malam hari dan tentunya sudah gelap sebab belum ada teknologi penerangan, rombongan pasukan tersebut melewati jalan kerajaan dengan membawa obor. Jalan yang tadinya gelap kemudian menjadi terang. Berdasarkan pada momen inilah penduduk di

Kota Yogyakarta memberi nama jalan tempat perlintasan para prajurit dengan Malioboro sehingga diartikan sebagai ‘jalan yang berubah menjadi penuh obor/terang’. Malioboro dari kata *balik/malik* (yang berarti ‘berubah’) dan *obor*, yang maksudnya ‘keadaan yang gelap berubah menjadi terang-benderang’ (Soepanto dkk., 1976/1977, sebagaimana dikutip Salamun, 1988)

- g. Berasal dari bahasa Sanskerta, *mâlyabhara*, yang diajukan oleh Tichelaar (1976) seperti dikutip Carey, 1984; 2015). Lema *mâlyā* memang berasal dari Sanskerta melalui Jawa Kuno, yang berarti ‘rangkaihan bunga berbentuk lingkaran’ atau ‘karangan bunga’ (Zoetmulder, 1995). Pada kamus *Javaansch-Nederlandsch handwoordenboek* karangan Gericke dan Roorda (1847) yang diterjemahkan oleh Carey (1984; 2015), *bara* berarti ‘rumbai, tepian, hiasan, atau jumbai seperti yang ditemukan pada ujung ikat pinggang sutra (sabuk) atau tepian payung emas (payung kenegaraan) Sunan’.
- h. Menurut I.E. Hadiyanta, (komunikasi personal, 2 Oktober 2017), *Malioboro* berasal dari kata *mulyo mboro*, yaitu seseorang yang bepergian untuk mencari rezeki. Hal ini berkaitan dengan fungsi kawasan ini sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pendapat ini selaras dengan yang disampaikan oleh L. Suratminto (komunikasi personal, 29 Mei 2021), yakni Malioboro merupakan bentukan dari perintah raja agar masyarakatnya berdagang (selain bertani karena pada masa itu aktivitas perekonomian masyarakat setempat disokong dari sektor agraris). Penjelasan ini didukung oleh muasal kata *maliho* (berarti ‘berubahlah [menjadi]’) dan *boro* (berarti ‘berdagang’, sudah jarang digunakan masyarakat Jawa saat ini).
- i. Menurut pendapat K.R.T. Jatiningrat (komunikasi personal 3 Oktober 2017), Malioboro diartikan sebagai ‘obornya para wali’. Obor itu dianalogikan sebagai ajaran agama.

- j. Salazar (2010) berpendapat bahwa Malioboro merupakan perubahan linguistik atas bahasa Belanda, *mergelburg*, yang berarti ‘sebuah benteng dari batu kapur’, merujuk pada Benteng Vredeburg.

Jalan Malioboro terbentang dari rel kereta api (berbatasan dengan Jalan Margo Utomo) hingga perempatan Toko Batik Terang Bulan. Sebagai penanda visual, terdapat sejumlah objek yang berada di sepanjang jalan ini, seperti Hotel Garuda, Kantor DPRD, Apotek Kimia Farma, dan Kantor Kependidikan. Pada fungsi informasional, papan jalan ini tentunya menjadi penanda lanskap dan membedakannya dengan ruas *râjamârga* yang saling berdekatan, seperti Jalan Margo Utomo dan Jalan Margo Mulyo. Dengan demikian, diharapkan tidak ada yang tersesat saat berkegiatan ataupun berkunjung pada tempat(-tempat) di Jalan Malioboro. Namun, peneliti juga masih menemukan mislokasi pencantuman nama jalan pada papan toko, yang semestinya ditulis Jalan Margo Mulyo ditulis Jalan Malioboro. Artinya, temuan ini melanggar fungsi informasional dan inkonsisten dari penyampaian yang seharusnya.

Tabel 3. Nama Jalan Malioboro dari Masa ke Masa

Jalan	Sumber	Abad Ke-20	Abad Ke-21
Malioboro	SK Gubernur DI Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017	<i>Chinesekamp</i>	
	Topografische Dienst in Nederland-Indie (1925)	Petjinan Malioboro	
	Darmosugito (1956)	Malioboro	
	Lombard (2008)	Malioboro	
	Atmojo (1973)	Malioboro	
	Tirtakoesoema (2003)	Malioboro	
	Smithies (1986)	Malioboro	
	Salamun (1988)	Malioboro	
	Carey (1984)	Maliabara Malioboro	
	Gupta dkk. (2007)		Malioboro
	Priyono dkk. (2015)		Maliabara Malioboro
	Google Maps (2017)		Malioboro
	Peta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta (2017)		Malioboro

Dengan menggunakan konsep Kelekatan Toponimik, penulis menganalisis ekstrak pada Tabel 3.



Sumber: InfoJogja.com (t.t.)

Gambar 22. Plang Jalan Malioboro

Ekstrak 9

sebenarnya masyarakat se-Indonesia taunya dari Stasiun Tugu sampe Malioboro, sampe ujung itu Malioboro. Kenapa kita istilah kita populerkan dengan Malioboro, udah dari ujung sampe ujung Malioboro seperti itu. Nah, ikon Yogyakarta ada di situ.... masyarakat Indonesia ya khususnya, tahunya sepanjang itu (Torik, komunikasi personal, 25 Agustus 2017).

Terkait dengan pendapat Torik pada ekstrak 9, kita dapat melihat subkonsep ketergantungan toponimik melalui pengenalan Malioboro sebagai ikon Yogyakarta. Dalam Kostanski (2011), ini disebut sebagai pengenalan terhadap tempat atau *place branding* dan dapat dikaitkan dengan promosi dalam pariwisata. Meskipun pada ruas selatan ke utara, dari Titik Nol hingga Tugu Pal Putih, terdapat tiga jalan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

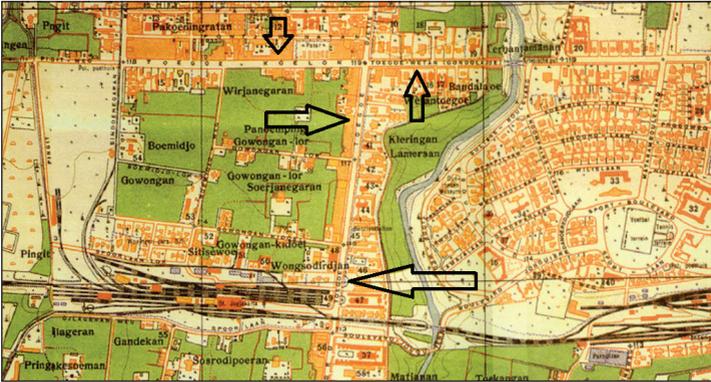
berbeda, Torik menilai masyarakat Indonesia lebih mengenal ruas tersebut sebagai Jalan Malioboro. Kelekatan yang terbangun melalui subkonsep *toponymic dependence* yang telah terbangun membuatnya mendorong pemopuleran Malioboro alih-alih menjadikannya tiga nama jalan dalam satu ruas tersebut. Penggunaan frasa masyarakat se-Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat diartikan bahwa Malioboro sudah sangat terkenal. Ini dapat menjadi alat yang tepat untuk mempromosikan Yogyakarta sebagai kota budaya dan pariwisata. Hal yang sama telah dibahas oleh Kostanski (2016b) bahwa ketergantungan toponimik juga mencakup elemen promosi atas tempat melalui toponimi. Kostanski mengaitkan dengan upaya pengembalian nama-nama jalan di Australia dengan tujuan mempromosikan pariwisata pada Taman Nasional Grampians.

Dalam konsep Onomastika Setempat, terdapat subkonsep bagaimana nama digunakan. Bagian ini membahas sebuah nama jalan dapat menjadi komoditas pariwisata melalui *Ekstrak 10*.

Ekstrak 10

Sebenarnya masyarakat se-Indonesia taunya dari Stasiun Tugu sampe Malioboro, sampe ujung itu Malioboro. Kenapa kita istilaha kita populerkan dengan Malioboro, udah dari ujung sampe ujung Malioboro seperti itu. Nah, ikon Jogja ada di situ (Torik, komunikasi personal, 25 Agustus 2017).

Dalam penelitian Giosa (2011) terhadap pemetaan mental atas ruang kota, Jalan Malioboro disebutkan sebanyak 16 kali sebagai jalanan di Yogyakarta dan menjadi pusat komersial yang utama. Komentar Torik menyatakan bahwa masyarakat Indonesia telah mengetahui ruas Jalan Malioboro merupakan ikon atau ciri khas Yogyakarta. Ini mendukung pengategorian penanda perilaku di Yogyakarta oleh Giosa (2011) yang terdiri dari ritual-ritual yang bersifat turistik, tradisional, dan neo-tradisional. Lebih lanjut, ia juga menyimpulkan



Sumber: Topografische Dienst in Nederland-Indie (1925)

Gambar 23. Nama *Toegoe*, *Toegoe Wetan*, dan *Toegoe Koelon*

bahwa Yogyakarta merupakan pusat dan tujuan wisata yang menarik magnet masyarakat lokal, nasional, hingga tradisional melalui ruang kotanya. Poin ini selaras dengan komentar pada *Ekstrak 10*.

4. Jalan Margo Utomo (d.h Jalan Pangeran Mangkubumi)

Jalan Margo Utomo (varian nama Margautama) merupakan jalan lurus yang terletak di antara simpang empat Pasar Kembang (berbatasan dengan rel kereta api) dari selatan hingga simpang empat Tugu Pal Putih di utara. Berdasarkan data Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (2017), jalan ini memiliki panjang 750,5 meter dan termasuk ke dalam Kecamatan Jetis (JT). Kendaraan yang melintasi jalan ini melaju satu arah dari utara (Tugu Pal Putih) menuju selatan hingga ke arah Alun-alun Lor.

Pada awalnya, hingga 1955, jalan ini bernama Jalan Tugu Kidul (Salamun, 1988), sedangkan varian lain adalah Jalan Toegoe, yang menggunakan ejaan Ophuisen seperti pada peta Gambar 23. Tugu Pal Putih (varian lain Tugu Yogyakarta atau Tugu Jogja) menjadi penanda indeksikal untuk penamaan jalan. Oleh karena itu, pada peta

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di Gambar 23, terdapat dua nama jalan yang menggunakan leksikon Tugu, yaitu Jalan Tugu Wetan, sekarang Jalan Jenderal Sudirman (lihat panah ke atas/utara) dan Tugu Kulon, sekarang Jalan Diponegoro (lihat panah ke bawah/selatan).

Pada 1988, Salamun menjelaskan, pada kiri dan kanan jalan ini, terdapat banyak toko, seperti pada sisi timur ada toko buku Kedaulatan Rakyat (KR) dan redaksi KR, toko kacamata A. Kasoem, dan toko elektronik. Pada bagian barat jalan, terdapat Gedung Bioskop Ratih, Toko Buku Pembangunan, *dealer* Sumber Baru Motor, kantor tenaga kerja Kota Madya Yogyakarta, dan rumah makan milik penduduk, sedangkan pada sebelah timur bagian selatan terdapat Hotel Trio serta bengkel dan *dealer* motor. Pada sebelah barat, tidak hanya terdapat toko-toko, tetapi juga tempat tinggal warga, sedangkan di sebelah barat bagian selatan terdapat *dealer* Vespa dan bengkel resmi ABC serta Agen Bus Agung.

Pada 1956, nama jalan ini diubah menjadi Jalan Pangeran Mangkubumi. Nama ini diberikan atas alasan jasa-jasa beliau dalam mengusir Belanda (VOC) dari Pulau Jawa dan menjadi peringatan bahwa Pangeran Mangkubumi merupakan pendiri Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi, yang merupakan anak Raja Amangkurat IV (bertakhta pada 1719–1727), merupakan raja Keraton Yogyakarta pertama yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Sebagai raja pertama, Sultan Hamengku Buwono I bertakhta pada 1756–1792. Sebagai raja pertama, Sultan Hamengku Buwono I memiliki peran yang besar dalam pembangunan dan peletakan kekuasaan pertama pada Keraton Yogyakarta. Dengan demikian, nama beliau disematkan ke salah satu jalan utama di Kota Yogyakarta.



Sumber: Erikha (2017)

Gambar 24. Plang Nama Ganda: Jalan Pangeran Mangkubumi dan Jalan A.M Sangaji



Sumber: Erikha (2017)

Gambar 25. Plang Jalan Margo Utomo

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 4. Nama Jalan Margo Utomo dari Masa ke Masa

Jalan	Sumber	Abad Ke-20	Abad Ke-21
Margo Utomo	SK Gubernur DI Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017	<i>Toegoescheweg</i>	
	Topografische Dienst in Nederland-Indie (1925)	Toegoe	
	Tirtakoesoema (2003)	Toegoe	
	Salamun (1988)	Tugu Kidul	
	Atmojo (1973)	P. Mangkubumi	
	Smithies (1986)	P. Mangkubumi	
	Salamun (1988)	Pangeran Mangkubumi	
	Gupta dkk. (2007)		Margatama
	Priyono dkk. (2015)		Margautama
	Google Maps (2017)		Margo Utomo

Pada 2013, nama Jalan Pangeran Mangkubumi direstorasi menjadi Jalan Margo Utomo oleh pemerintah DIY. Jalan Margo Utomo merupakan frasa nomina yang terdiri atas dua komponen, yaitu nama generik (jalan) dan nama spesifik (Margo Utomo). *Jalan* diartikan sebagai ‘tempat seseorang atau sebuah objek untuk melintas dari satu tujuan ke tujuan tertentu’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t.), sedangkan Margo Utomo dapat diartikan sebagai ‘jalan keutamaan’. Priyono dkk. (2015) menyebut *Margautama* (Margo Utomo) secara etimologis berarti ‘jalan’ (*margi/mĕrgi*) dan utama g berarti ‘utama’.

Sejak perubahan menjadi Jalan Margo Utomo, nama Pangeran Mangkubumi dipindahkan ke ruas di sebelah utara setelah Tugu Yogyakarta. Pada November 2016, Jalan Pangeran Mangkubumi resmi menjadi nama baru pada ruas Jalan A.M. Sangaji. Sebagai proses awal sosialisasi, masih terdapat pemasangan nama ganda pada salah satu titik di ruas jalan tersebut.

Dalam petikan tulisannya, Benjamin (1999, 522) menyatakan "*through its street names, the city is a linguistic cosmos*". Papan jalan dan penamaan jalan pada sejumlah papan reklame dan perusahaan merupakan bukti linguistik bahwa bahasa telah mengisi geografi ruang publik. Bagian ini akan memaparkan situasi kebahasaan yang ada di sepanjang Jalan Margo Utomo. Serupa dengan penamaan sebelumnya, nama jalan pada papan jalan dalam Gambar 24 ditulis menggunakan dua aksara, yaitu Latin dan hanacaraka. Penulisan aksara hanacaraka pada papan jalan pada dasarnya bertujuan melestarikan bahasa Jawa melalui aksaranya. Selain di Yogyakarta, penulisan papan nama jalan dengan aksara ganda dilakukan di Solo (Aribowo dkk., 2018), Bandung (Erikha, 2021), dan Bali (Artawa & Sartini, 2019). Secara fungsi informasional, menurut Landry dan Bourhis (1997), penulisan aksara hanacaraka (pada sisi bawah) memiliki konten bahasa yang sama dengan penulisan aksara Latin (sisi atas). Hanya masyarakat atau individu yang memiliki kompetensi dwibahasa, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia serta aksara hanacaraka, yang dapat membaca tulisan tersebut.

Posisi penulisan nama pada papan jalan dapat menunjukkan makna informasional dan simbolis. Scollon dan Scollon (2003) membandingkan penulisan pada papan jalan di Quebec (Kanada) dan Hong Kong yang mencerminkan penamaan ganda yang masing-masing terdiri atas dua bahasa. Di Quebec, penulisan nama sisi atas menggunakan bahasa Prancis dan sisi bawah bahasa Inggris, sedangkan di Hong Kong penamaan papan jalan sisi atas menggunakan bahasa Inggris dan sisi bawah bahasa China. Tidak hanya posisi, nama bagian atas dibuat dengan ukuran huruf yang lebih besar. Secara simbolis, ini menggambarkan dominasi bahasa yang digunakan lebih besar daripada bahasa pada sisi bawah. Bahasa Prancis digunakan secara mayoritas di Quebec, sementara bahasa China dan Inggris merupakan bahasa resmi di Hong Kong. Ini serupa dengan Yogyakarta, yang menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa yang paling banyak digunakan.

Secara fungsi simbolis, ini mengisyaratkan simbol kejawaan yang dianggap umum dalam konteks Yogyakarta. Tampilan identitas etnik telah menjadi penanda yang hendak diekspresikan melalui pemakaian bahasa Jawa, termasuk dengan aksara pada penamaan di sisi bawah plang nama jalan. Lebih lanjut, fenomena ini disebut sebagai preferensi kode dalam ruang dan waktu yang menunjukkan proses sosiokultural dan sosiopolitik (Scollon & Scollon, 2003). Blommaert (2013) menyebut fenomena ini dengan istilah *repertoar visual*. Blommaert memberi contoh kajian LL di London Chinatown yang banyak memuat bukti-bukti linguistik menggunakan aksara *cyrillic* dan diduga kuat hanya dapat dipahami oleh mereka yang dapat memahami bahasa tersebut.

Plang yang memuat nama jalan dapat disebut juga sebagai proposisi budaya yang dapat ditelisik makna semantik ataupun pragmatismenya atau mengutip istilah Rahyono (2015), yakni analisis lingual dan analisis non-lingual. Pada aspek semantik, *margo* berarti ‘jalan, sedangkan *utomo* berarti ‘yang paling tinggi’, ‘tertinggi’, ‘kepala’, ‘pokok’, ‘baku’, ‘paling baik’, ‘ulung’, ‘unggul’, ‘utama’ (Zoetmulder, 1995). Jadi, dapat disimpulkan bahwa Margo Utomo dapat diartikan sebagai ‘jalan keutamaan’.

Kelekatan Toponimik, menurut Kostanski (2016b, 412), adalah *a positive or negative association individuals and groups make with real or imagined toponyms*. Aspek nilai rasa positif dan negatif ini dapat ditemukan dalam sikap dukungan dan penentangan terhadap isu pengubahan nama jalan. Sikap dukungan biasanya diwujudkan atas kesukaan atau sikap positif terhadap nama jalan yang baru. Algeo (2015, 220) menyatakan pengategorian sebuah nama jalan sebagai dua jenis, yaitu klasik dan berkelas, pada kutipan berikut.

"street names in Athens, Georgia, are of two kinds: older, traditional, central, commemorative, directional = "classic," and newer, innovative, suburban, evocative, given by real-estate developers for their commercial appeal = "classy."

Ekstrak 11 mewakili sikap positif terhadap nama jalan yang baru.

Ekstrak 11

*Kalo saya lebih yang baru yang Margo Utomo, Margo Utomo, kan **biar modern** (Gamal, komunikasi personal, 26 Agustus 2017).*

Gamal menilai nama Jalan Margo Utomo sebagai sesuatu yang bernilai baru dan modern. Hal ini menguatkan pendapat Gamal bahwa sebuah nama yang lebih baru dipandang lebih berkkelas daripada nama yang lama. Ini dapat dipandang sebagai nilai rasa terhadap nama. Dalam konteks tempat lain, nama memiliki unsur prasangka, misalnya di Finlandia. Penggunaan nama Jalan Mogadishu (yang juga merupakan ibu kota Negara Somali) bagi remaja yang diteliti dipersepsi sebagai sesuatu yang netral atau bahkan positif yang mungkin saja karena mereka belum mengetahui apa konotasi lain yang melekat pada nama jalan tersebut (Ainiala & Halonen, 2017).

Penilaian positif Gamal terhadap nama Margo Utomo merupakan asosiasi yang dibangunnya terhadap nama jalan yang baru. Sering kali nama ditautkan dengan hal-hal lain daripada makna sebenarnya (Ainiala dkk., 2016). Konotasi ini dapat berupa kaitan dengan hal positif ataupun negatif. Contoh ini merupakan bentuk asosiasi berdasarkan pada persepsi pribadi. Sementara itu, konotasi dapat juga berasal dari bentukan kultural. Perihal asosiasi terhadap nama juga dibahas Nyström (2016). Lebih lanjut, Nyström mencontohkan pemanfaatan asosiasi terhadap nama oleh para perencana kota, politisi, dan pihak yang berkecimpung dengan pemasaran. Mereka cenderung menghindari penamaan tempat yang memiliki asosiasi negatif. Sebaliknya, mereka lebih suka menggunakan nama-nama yang dekat dengan makna kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran, seperti elemen generik *beach*, *park*, *garden*, dan *village*.

Contoh lain bagaimana nama disikapi positif oleh masyarakatnya dijelaskan oleh Berezkina (2014). Berezkina menggali gambaran perbedaan sikap masyarakat tiga kelompok etnis berbeda (Paskitani, Polandia, dan Oslo) terhadap nama tempat di Oslo, ibu kota Norwegia, dan bagaimana nama-nama tempat itu digunakan. Dalam salah satu temuan, nama diasosiasikan dengan sesuatu yang artinya positif. Ini terlihat pada kandungan nama yang dinilai sebagai kata positif

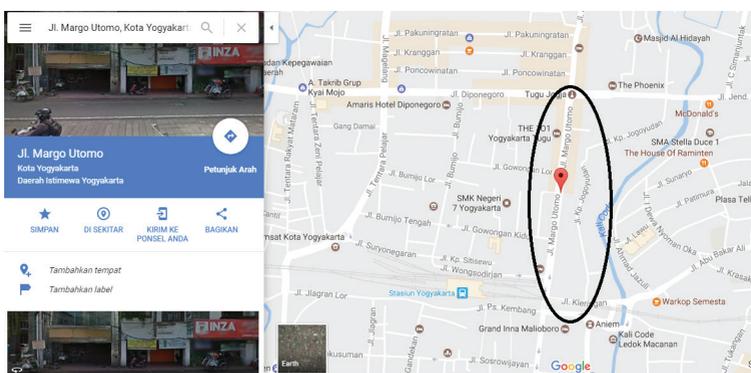
memunculkan komentar positif dari para informan. Misalnya, nama jalan seperti Sorgenfrigata (diartikan ‘jalan tanpa kesedihan’) dan Eventyrveien (berarti ‘dongeng’), serta nama Distrik Sjølyst’ (berarti ‘pantai yang menyenangkan’).

Pada Ekstrak 12 dipaparkan contoh bagaimana kelekatan dependensi, khususnya bagaimana nama tempat sangat signifikan digunakan sebagai identifikasi sebuah tempat.

Ekstrak 12

*Bener namanya tuh geser, cuman sayangnya kok gesernya gak terlalu jauh gitu lho. Jadi potensi untuk **tamu get lost** kan tinggi karena cuman hanya sini dengan (Jalan) Sangaji. Jadi kenapa kok geser namanya, padahal udah satu jalur ya, satu jalur cuman beda ruas (Cahyadi, komunikasi personal, 26 Agustus 2017).*

Cahyadi merupakan manajer salah satu hotel yang berada di Jalan Margo Utomo. Perubahan nama jalan tempat ia bekerja telah berdampak secara langsung pada pekerjaannya. Sebagai karyawan hotel yang berurusan dengan para tamu yang tidak mengetahui adanya perubahan nama jalan, tentu dapat mengakibatkan tersesatnya mereka saat akan mencari alamat hotel. Sebagai respons, hotel tempat ia bekerja langsung menyesuaikan informasi nama jalan pada situs



Sumber: Google Maps (2017)

Gambar 26. Lokasi Jalan Margo Utomo

dan papan nama hotel, mengingat Google Maps telah memperbarui nama menjadi Jalan Margo Utomo. Ia juga menyayangkan nama lama (Jalan Pangeran Mangkubumi) disematkan pada ruas yang bersebelahan (ke ruas yang dulunya Jalan A.M. Sangaji, ke arah utara setelah Tugu Pal Putih) dari jalan mulanya. Bagaimanapun, ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pengguna jasa hotelnya. Ini sesuai dengan fungsi dasar toponimi sebagai elemen pembeda dari objek tempat yang lainnya (Kostanski, 2016b).

Cahyadi sebagai anggota masyarakat yang beraktivitas di jalan tersebut sangat bergantung pada penggunaan toponimi ini. Oleh karena itu, agar tidak mendapatkan kesulitan di kemudian hari, ia dan hotel tempat ia bekerja segera menyesuaikan diri dengan perubahan nama. Hal serupa dibahas oleh Kostanski (2009) bahwa sebuah toponimi dibuat untuk memudahkan penentuan lokasi suatu lanskap, memudahkan identifikasi tempat, dan proses pengomunikasiannya.

Cara pengidentifikasian tempat melalui nama secara konsisten telah diatur oleh UNGEGN (2001). Hal ini dilakukan karena berkaitan erat dengan sejumlah hal, seperti tujuan pariwisata, peta dan produksi atlas, navigasi otomatis seperti halnya pada penggunaan peta daring (lihat peta Google Maps pada Gambar 26), pengiriman alamat oleh pihak pos, serta membantu pelacakan tempat mitigasi bencana.

Onomastika Setempat pada hakikatnya membahas nama berdasarkan pada elemen bahasa yang menyertainya dan pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pada data temuan dari wawancara, masyarakat lebih merespons pada nama Pangeran Mangkubumi daripada nama barunya, Margo Utomo. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena nama baru belum teringat dengan baik dalam benak mereka. Masyarakat memiliki memori dan asosiasi yang beragam terkait Jalan Pangeran Mangkubumi, di antaranya disebutkan pada Ekstrak 13.

Ekstrak 13

*jadi **memori yang saya ingat waktu kecil itu yang pagi, tiap hari Minggu pagi itu saya dengan kakek saya itu mesti jalan pagi atau naik sepeda, itu selalu lihat ke tugu. Pemandangannya yang di situ, kalo pagi, gunung merapi. Iya, itu selalu terkenang. Indah banget, tenang suasananya*** (Darti, komunikasi personal, 26 Agustus 2017).

Saat seseorang membicarakan sebuah nama, artinya ia membicarakan pengalaman yang dimilikinya terkait nama tersebut. Dalam Ainiala (2016a), saat membahas nama dan elemen yang melingkupinya, biasanya nama dikaitkan dengan sesuatu yang indah ataupun buruk, sesuatu yang asli ataupun artifisial, ataupun transparan bahasa dan ortografinya. Jika melihat komentar Darti pada Ekstrak 13, dapat dinilai bahwa ia memiliki persepsi yang positif pada nama Jalan Pangeran Mangkubumi. Baginya, jalan itu erat dengan pengalaman masa kecil bersama kakek. Pengalaman personal ini menjadikan nama itu dianggap sangat indah. Dari cara penggambaran melalui komentar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Darti menyimpan sebuah memori emosional dengan figur salah satu anggota keluarganya terhadap toponim ini.

Dalam cara pandang Onomastika Setempat, pendapat masyarakat tentang nama menjadi penting. Pendapat dan sikap masyarakat terhadap nama merefleksikan betapa penting apa yang dapat diceritakan dari nama itu (Ainiala, 2016a). Pendeskripsian nama tempat seperti ini merupakan bentuk penamaan tempat yang natural. Ainiala membandingkan penamaan gaya tradisional ini dengan penamaan nama jalan modern yang sering kali memerlukan alasan yang konkret penamaannya. Peneliti memberi contoh penamaan jalan dengan metode tematis, misalnya pengubahan nama jalan di kawasan Menteng yang menggunakan nama sejumlah daerah di Indonesia.

Pada Ekstrak 14, diperlihatkan tanggapan masyarakat atas pertanyaan peneliti yang menanyakan nama manakah yang ia sukai di antara nama jalan yang lama dan baru.

Ekstrak 14

Saya baru bisa menetapkan lebih suka yang mana kalau saya tahu makna filosofinya, kalo itu filosofis ada, ada makna filosofinya pasti dengan asumsi pengubahnya itu lebih paham daripada saya, saya akan pilih hasil perubahan sepanjang saya sudah paham filosofinya karena tidak mungkin perubahan ngasal gitu kan, sepanjang itu saya ikuti karena pasti ada dasar filosofinya (Saiful, komunikasi personal, 26 Agustus 2017).

Komentar tersebut menunjukkan bahwa Saiful tidak dapat memilih nama mana yang ia sukai, meskipun nama baru dicitrakan lebih positif oleh media dan pemerintah. Sikap ini muncul karena ketidakpuasan dirinya terhadap pengubahan nama yang tidak disertai dengan penjelasan yang komprehensif. Ini menjadi temuan dalam ranah sosio-onomastika tentang bagaimana nama masyarakat mempersepsikan nama jalan dan apa yang dipikirkan mereka tentang nama dan proses penamaan (Ainiala, 2016a). Keluhan atas tidak dirasakannya penyuluhan oleh pemerintah serta alasan atas pemaknaan yang ingin diartikulasi. Saiful memberikan sikap bersyarat, yaitu baru akan memberikan mana yang ia sukai jika pemerintah menjelaskan apa filosofi yang dikandung.

Komentar ini dikaitkan dengan apa yang dibahas Kostanski (2016a) dalam artikelnya yang berjudul “The Controversy of Restoring Indigenous Names: Lessons Leart and Strategies for Success”. Kostanski menekankan perlunya pelibatan komunitas masyarakat sekitar jalan dan perlunya program edukasi tentang detail pengubahan nama jalan. Dengan menerangkan alasan pengubahan atas nilai-nilai budaya yang terdapat pada kawasan tersebut, masyarakat akan menerima dan memproses informasi tentang filosofi. Sebagai hasilnya, masyarakat diharapkan dapat mulai menerima perubahan dan mulai membangun ikatan dengan nama jalan yang baru di kemudian hari.

Selanjutnya, pembahasan berfokus pada nama dan untuk apa nama digunakan. Dalam perjalanan, nama tidak hanya berhenti sebagai alat identifikasi semata, nomina yang memuat materi kultural, dan

fungsi identitas. Nama juga digunakan sebagai objek politik oleh pihak yang lebih berwenang (Rose-Redwood dkk., 2018). Hubungan antara nama geografi dan politik telah menjadi dua keping mata uang. Kadmon (2004) menyebut ini merupakan hubungan antara toponimi dan geopolitik. Pengubahan nama-nama jalan di Yogyakarta tidak terlepas dari peran Keraton Yogyakarta sebagai pemrakarsa serta dilakukan secara administrasi oleh pemerintah provinsi. Dalam konteksnya, Kota Yogyakarta tidak terlepas dari pengaruh kuat Keraton dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal ini menjadi salah satu faktor yang istimewa dalam proses dan dinamika pengubahan nama-nama jalan utamanya. Penulis membagi dua contoh penting, yaitu bagaimana justifikasi pengubahan dari perspektif penguasa (Ekstrak 15) dan bagaimana respons masyarakat (Ekstrak 16).

Ekstrak 15

*Saya pikir pasti ada satu makna filosofis yang berangkatnya dari keraton kalau dulu. Karena ini tanahnya semuanya kan tanah keraton, sampai di UGM pun itu tanah milik keraton, sehingga **yang berhak memberi nama tentunya pemilik**. Ini asumsi logis dalam sisi apa pun kepemilikan (Saiful, komunikasi personal, 26 Agustus 2017).*

Berdasarkan ekstrak tersebut, Saiful menjabarkan bahwa tanah-tanah yang terdapat di Kota Yogyakarta merupakan milik Keraton. Dengan demikian, praktis Sultan memiliki hak untuk menentukan nama apa yang akan diberikan pada lanskap-lanskap di kota tersebut. Pengubahan itu semata-mata kuasa dari Keraton serta tentunya memiliki muatan makna filosofi dan budaya sehingga dikembalikan kepada nama asalnya. Dalam artikelnya, Rose-Redwood dkk. (2010) mengusulkan tiga pendekatan komplementer dalam pembahasan dan kajian penulisan spasial yang seperti praktik toponimi, yaitu semiotika politik, studi tentang pemerintahan, serta teori normatif tentang keadilan sosial dan resistensi simbolis. Dalam contoh yang terbilang ekstrem, seperti pendudukan negara asing di negara lain, kita dapat menemukan Canal Road, California, atau Coors Street

pada pusat komersial di Kota Bagdad sejak tentara Amerika Serikat mengubahnya ke dalam peta terkini. Kendati demikian, Saiful dalam komentarnya memaklumi praktik politis ini karena Keraton memiliki wewenang yang besar atas tanah yang berada di sekitar lingkungan Keraton.

Nama dan nomenklturnya telah menduduki posisi sentral dalam sistem budaya (Rose-Redwood dkk., 2010). Dengan menggunakan pendekatan semiotika, dapat ditelusuri sejarah yang dimuat dalam toponimi, misalnya nama peringatan berikut apa yang melandasi penamaan atau pengubah-namaan suatu tempat. Terkait dengan kesejarahan pada nama Jalan Margo Utomo, I.E. Hadiyanta (komunikasi personal, 2 Oktober 2017) menjelaskan bahwa pengubahan ini disebabkan oleh eksistensi nama ini pada masa lalu. Selain itu, alasan kultural, seperti filosofi *sangkan paraning dumadi*, menjadi alasan atas pengubahan nama sebelumnya.

Ekstrak 16

*Tapi, karena memang itu titah ya kalau orang Jogja mau gak mau kita mesti respect ke raja kita. Artinya, tidak pernah ada penolakan sedikit pun; artinya tidak ada complaining dari masyarakat. **Bahwa itu titah raja ya kita jalanin.** Artinya, selama ini kita fine-fine aja (Cahyadi, komunikasi personal, 26 Agustus 2017)*

Keraton merupakan pusat kerajaan, dan bagi rakyat Jawa, juga sebagai pusat politik dan budaya. Keraton pun dianggap sebagai pusat keramat kerajaan. Di dalam Keraton pun raja bersemayam. Dengan latar belakang ini, dapat dipahami bahwa kekuasaan raja merupakan pemusatan kekuatan kosmos yang besar. Raja atau Sultan dianggap sebagai sosok yang sangat sakti (Magnis-Suseno, 1988). Pada Ekstrak 16, terlihat bagaimana sikap Cahyadi sebagai masyarakat asli Yogyakarta terhadap pengubahan nama-nama jalan utama. Terdapat impresi bahwa masyarakat harus mengikuti titah Sultan sebagai pemimpin dan raja. Hal ini dapat menjadi faktor keunikan dalam mengevaluasi pengubahan pada Kota Yogyakarta.

B. Psikologi Sosial Nama: Sikap, Persepsi, dan Preferensi

Situasi LL di jalan-jalan poros kerajaan di Yogyakarta memperlihatkan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi informasional dan fungsi simbolis. Pada fungsi informasional, plang nama jalan berfungsi sebagai penanda lokasi tempat dan ruang. Plang nama jalan juga dapat menunjukkan bukti linguistik yang eksis dalam sebuah lanskap. Lanskap juga berhubungan dengan geografi ataupun kelompok budaya yang hadir ataupun mendominasinya.

Fakta linguistik lain ialah penggunaan ortografi hanacaraka pada papan nama jalan. Aturan ini sudah ada sejak 1922 dan masih digunakan hingga saat ini. Aksara hanacaraka digunakan pada sisi bawah dan ditulis dengan ukuran huruf yang lebih kecil daripada nama jalan berakasara Latin. Penulisan aksara lokal pada ruang publik juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang diungkapkan Lauder dan Lauder (2015), apakah aksara ini berterima secara sosial dan kultural/disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; berterima secara psikolinguistik: apakah ortografi dapat memfasilitasi semua fonem?; keberfungsian ortografi: apakah digunakan di sekolah misalnya dalam materi pelajaran muatan lokal?; atau dapat dipakai dalam ranah teknologi seperti dapat digunakan melalui kibor komputer.

Terdapat dua papan nama jalan yang masih menggunakan nama ganda, yaitu Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora) dan Jalan Pangeran Mangkubumi (d.h Jalan A.M. Sangaji). Jalan Pangurakan memang jalan yang telah diubah sejak 2013, sedangkan Jalan Pangeran Mangkubumi baru diubah pada November 2016. Penggunaan nama jalan ganda ini bermakna secara legal dan formal bahwa kedua nama, baik nama lama dan baru, masih dapat dipakai dalam waktu bersamaan. Selain itu, hal ini berfungsi sebagai pengenalan kepada masyarakat di sekitar. Dalam studi penggunaan nama ganda di Taman Nasional Grampians (Gariwerd), Australia, Kostanski (2016a) memaparkan penggunaan nama ganda merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap nama Aborigin, di samping juga penamaan yang dinamai oleh kolonial

Inggris. Penamaan ganda ini juga memperkenalkan masyarakat untuk memilih toponimi yang condong dipilih. Salah satu narasumber dari Pemerintah Kota menyatakan bahwa penamaan ganda merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat ihwal pengubahan nama-nama jalan. Hal ini menjadi bentuk peralihan dari penggunaan nama lama menuju nama baru (Wijayanto, komunikasi personal, 3 Oktober 2017).

Secara simbolis, pemakaian aksara hanacaraka mengindikasikan bahwa kawasan tersebut merupakan tempat bermukimnya populasi masyarakat bersuku Jawa. Dengan kata lain, dalam perspektif psikologi sosial, plang nama jalan memiliki simbol identitas etnik yang kuat dan merefleksikan bentuk kearifan lokal. Plang nama jalan yang dikaji tersebut merupakan bagian dari filosofi *paraning dumadi*, yang berarti 'perjalanan manusia menuju tujuannya'. Filosofi ditunjukkan melalui nama dan makna yang ada pada jalan-jalan yang ada di poros Keraton Yogyakarta. Studi LL dapat secara tidak langsung menyampaikan bahwa teks nama jalan tidak hanya sebagai bentuk identifikasi tempat, tetapi juga memuat pewacanaan kultural ataupun politik yang telah diciptakan oleh pemerintah setempat.

Keraton Yogyakarta pun telah menggunakan wewenangnya dengan mengartikulasikan identitas kejawaan melalui penamaan jalan lengkap dengan sistem ortografinya. Hal ini sejalan dengan esensi kajian LL, yakni bahasa sebagai perantara di antara tempat dan ruang. Tidak hanya itu, plang nama jalan juga dinilai sebagai bagian kebudayaan lokal yang dapat menjadi penarik minat turis berkunjung. Rupa aksara ataupun gaya penamaan yang tidak biasa diharapkan dapat menjadi pengalaman yang mengisi kunjungan para wisatawan. Kondisi seperti ini dapat pula menjawab perihal koneksi di antara LL dan ekonomi.

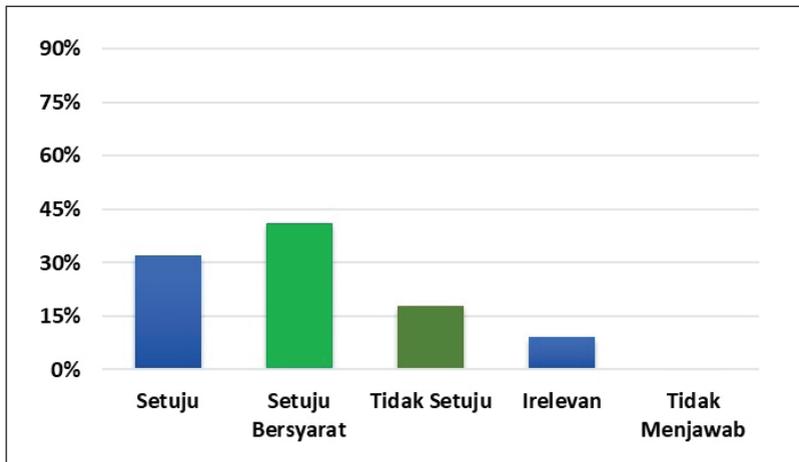
Studi pergantian toponimi di Yogyakarta ini membahas bagaimana aspek sosiopolitis pada bahasa telah dijalankan, bagaimana bahasa lokal serta bahasa nasional digunakan secara bersamaan, dan bagaimana bahasa kelompok mayoritas ditampilkan di ruang publik. Kajian bertopik LL selanjutnya dapat digunakan oleh aparatur

pemerintah dalam menelusuri relasi antarkelompok sosial dan bahkan memprediksi potensi konflik yang akan terjadi.

Setelah membuat kuantifikasi sikap, persepsi, dan preferensi masyarakat terhadap perubahan nama jalan, didapatkanlah penggambaran seperti yang dituangkan pada tiga grafik (Gambar 27, Gambar 28, dan Gambar 29). Grafik persentase terdiri atas sikap masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar nama jalan yang diganti.

a. Sikap terhadap perubahan nama-nama jalan

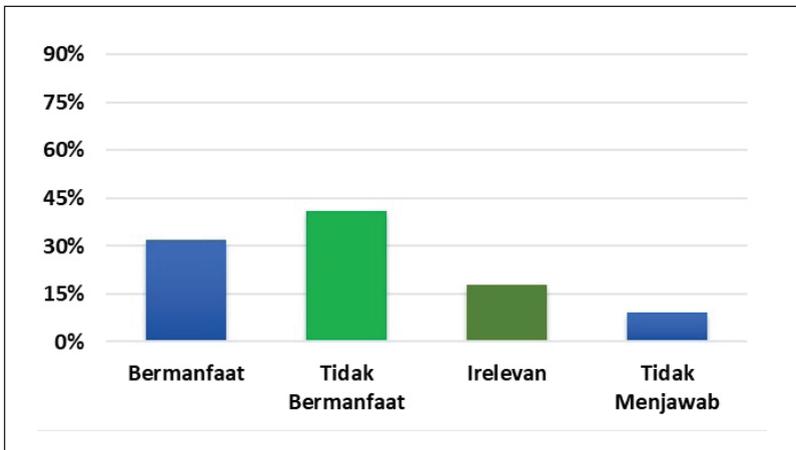
Berdasarkan pada Gambar 27, dijelaskan gambaran sikap masyarakat atas tiga nama jalan (Jalan Pangurakan, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Margo Utomo). Persentase yang menyetujui dengan syarat adalah 41%, lebih banyak daripada sikap setuju, yang berjumlah 32%. Sikap setuju didasarkan atas sikap positif terhadap filosofi nama yang baru; memperkuat dan melestarikan budaya Jawa; dapat memperkuat peran Yogyakarta sebagai kota pariwisata; serta mengembalikan kebudayaan Jawa.



Sumber: Erikha (2018c)

Gambar 27. Grafik Sikap Masyarakat terhadap Perubahan Nama

Sikap setuju bersyarat karena masyarakat tidak mengetahui filosofi yang ingin diangkat pemerintah. Oleh karena itu, mereka akan setuju jika ada upaya sosialisasi makna filosofinya. Alasan lain, mereka menyetujui perubahan nama apabila nama baru bermakna positif. Sikap tidak setuju digambarkan dengan persentase 18%. Hal ini disebabkan oleh upaya perubahan terlalu dipaksakan karena dilakukan pada ruas jalan yang terbilang kecil. Alasan lain adalah nama jalan yang lama sudah mengakar dan tersimpan dengan baik dalam memori mereka; nama lama lebih cocok karena sesuai dengan tema nama jalan lain, seperti sama-sama bertema pahlawan nasional; perubahan mempersulit proses pengiriman barang; masyarakat akan direpotkan oleh urusan penggantian identitas diri. Hal yang menarik pada temuan penelitian ini adalah terdapat perubahan sikap yang awalnya tidak menyetujui, tetapi berbalik menyetujui perubahan nama karena melalui nama baru yang menggunakan bahasa Jawa maka dapat menjadi sarana pelestarian eksistensi bahasa Jawa.



Sumber: Erikha (2018c)

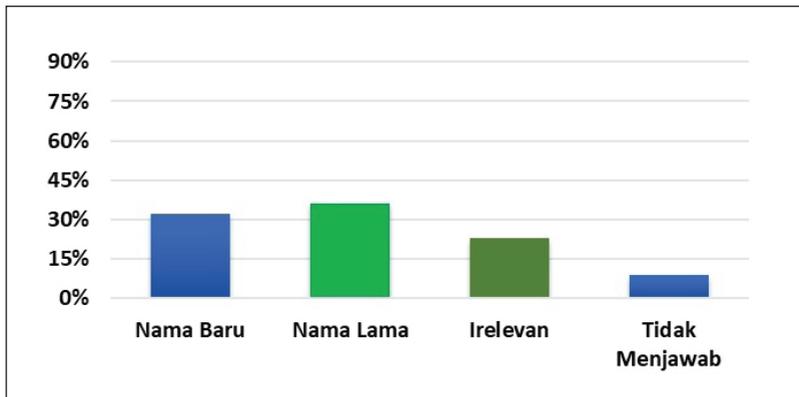
Gambar 28. Grafik Persepsi Masyarakat terhadap Perubahan Nama

Sikap lainnya seperti sikap irelevan karena sebagian masyarakat memberikan respons yang berbeda dengan pertanyaan peneliti. Selain itu, tidak ada masyarakat yang tidak menjawab atau memberikan komentarnya.

b. Persepsi terhadap perubahan nama-nama jalan

Grafik pada Gambar 28 memperlihatkan gambaran persepsi masyarakat terhadap dampak pengubahan nama. Dampak dalam konteks ini persepsi berfokus pada dua hal, yaitu bermanfaat dan tidak bermanfaatnya pengubahan yang dilakukan. Sebanyak 32% masyarakat menilai pengubahan nama-nama jalan itu bermanfaat. Alasannya, seperti mengetahui aspek sejarah dan makna filosofi yang melatari nama jalan yang baru; menguatkan keistimewaan dan identitas Yogyakarta; nama baru dinilai sebagai penyegaran.

Sebanyak 41% masyarakat menilai pengubahan nama jalan ini tidak bermanfaat. Alasannya, karena tidak ada sosialisasi, mereka tidak mengetahui makna pada nama jalan yang baru; alih-alih bermanfaat, pengubahan ini hanya akan membuat masyarakat kebingungan saat menggunakan nama jalan yang baru; nama lama lebih bernilai daripada nama yang baru.



Sumber: Erikha (2018c)

Gambar 29. Grafik Preferensi Masyarakat terhadap Pengubahan Nama

Terdapat persentase sebanyak 18% masyarakat yang menanggapi pertanyaan peneliti dengan jawaban yang irelevan. Selain itu, 8% masyarakat tidak memberikan jawaban atau tanggapan.

c. Preferensi terhadap nama jalan

Berikut ini gambaran persentase nilai pilihan masyarakat terhadap nama jalan yang baru dan nama jalan yang lama. Persentase didominasi oleh masyarakat yang lebih suka penggunaan nama lama daripada nama baru, sebanyak 36%. Hal ini terjadi karena mereka tidak terbiasa dengan nama yang baru; tidak mengetahui filosofi pada nama jalan baru, nama lama lebih gagah dan akrab di telinga, serta persepsi yang positif pada nilai perjuangan dan nasionalisme pada nama lama. Hal yang menarik adalah terdapat anggota masyarakat yang memilih nama baru sebagai nama disukai alih-alih nama lama karena sikap patuh atas perubahan ini. Sementara itu, 32% masyarakat memilih nama yang baru daripada nama yang lama. Faktor-faktor yang berperan adalah nama yang baru lebih disukai karena dirasa lebih modern; lebih menonjolkan keistimewaan dan identitas Yogyakarta; mengangkat kembali budaya Jawa, khususnya bahasa Jawa; memiliki makna yang sesuai dengan filosofi yang sedang diangkat oleh Yogyakarta.

Sebanyak 23% masyarakat menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti dengan komentar-komentar yang irelevan, seperti menganggap isu ini tidak signifikan dan membahas nama jalan yang lain, sedangkan 9% lainnya tidak memberikan jawaban sama sekali dalam arti tidak memberikan komentar apa pun.

Penelitian dalam buku ini telah memperlihatkan bagaimana nama dan penamaan disikapi oleh masyarakat yang ada di sekitar nama-nama jalan yang diubah. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, peneliti mengelompokkannya ke dalam dua kategori berdasarkan pada perspektif Onomastika Setempat, yaitu nama dan elemen pembentuknya serta nama dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kategori nama dan elemennya, sejumlah opini masyarakat telah dikelompokkan ke dalam poin-poin, seperti nilai

rasa terhadap nama jalan baru dan nama jalan yang lama. Meskipun terdapat apresiasi, ditemukan juga ketidaknyamanan pada nama baru. Hal ini diperlihatkan pada penjabaran Jalan Pangurakan yang mirip dengan makna negatif pada kata *urakan* dan dinilai sebagai nama susah untuk diingat. Sikap positif dinyatakan pada nama baru karena dirasa lebih modern dan dianggap sebagai doa dari pemberinya, dalam hal ini Sultan Hamengku Buwono X. Elemen bahasa Jawa dan aksara hanacaraka yang digunakan memunculkan kesetujuan karena dianggap dapat melestarikan bahasa Jawa. Isu nama dan identitas menjadi poin lain yang kuat. Ini diperlihatkan dengan adanya perbedaan ikatan emosional pada masyarakat asli Yogyakarta dengan pilihan nama dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Peneliti mendapatkan masyarakat non-Yogyakarta lebih memilih penamaan yang bermakna perjuangan nasional daripada nama lokal.

Perkara nama dan identitas telah dikupas oleh Dion (1983) dan Aldrin (2016), secara khusus juga dibahas oleh Helleland (2012), Ainiala (2016a), Kostanski (2016b), serta Ainiala dan Halonen (2017), bahwa nama tempat dan identitas menjadi kesatuan yang mengikat satu sama lain. Nama dan makna juga memiliki tempat tersendiri. Meskipun nama jalan yang baru dapat ditelusuri arti dan maksudnya melalui kamus, masyarakat juga mengekspresikan makna tambahan (konotasi) pada nama-nama tersebut. Pengalaman pribadi menjadi faktor kuat sehingga nama jalan memiliki arti istimewa dan tidak sama antara satu orang dan orang lainnya.

Berdasarkan pada nama dan penggunaannya, penulis membaginya ke dalam dua bahasan, yaitu dampak pengubahan nama dan nama sebagai objek geopolitik. Pada prinsipnya, dua bahasan ini saling berkait karena sebuah pengubahan nama tidak terlepas dari keputusan politik atas lanskap atau wilayah geografisnya. Pengubahan nama jalan berdampak pada penggunaan nama ganda agar pengguna jalan dapat melalui proses transisi ini dengan bertahap. Pada bahasan geopolitik, pengubahan ini terkait dengan peran Keraton Yogyakarta sebagai pengusul melalui pemerintah daerah. Secara umum, peneliti menemukan sikap setuju dan tidak setuju. Hal menarik lainnya adalah sebagian yang tidak setuju pada awalnya kemudian berubah pikiran

dan berbalik menjadi setuju. Namun, faktor Keraton sebagai institusi kerajaan berikut dengan sosok Sultan merupakan faktor yang penting bagi masyarakat di Kota Yogyakarta.

Pendekatan sosio-onomastika yang digunakan pada penelitian dalam buku ini dapat menggali sikap-sikap masyarakat terhadap isu perubahan nama. Teknik wawancara berkelompok membuat proses pengambilan data menjadi efisien dan efektif. Faktor-faktor, seperti dominasi salah satu anggota masyarakat ataupun duplikasi sikap, menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan meskipun dapat ditangani dengan baik. Selain itu, penjelasan di awal diskusi bahwa peneliti bukanlah representasi pemerintah, menjadi hal yang penting. Hal ini disebabkan oleh adanya sensitivitas dan keengganan berbicara karena mereka dimintai opininya pada apa yang telah dilakukan pemerintah.

Hal-hal tersebut menjadikan penelitian berlatar sosio-onomastika menjadi kaya karena keunikan setiap respons anggota masyarakat. Sebagian masyarakat sangat berhati-hati dalam menjawab, sedangkan sebagian lagi terlihat lebih terbuka-meskipun terdapat pernyataan yang bisa saja disalahtafsirkan oleh orang lain. Hal menarik lainnya, masyarakat dengan latar pengusaha atau pebisnis, memiliki sikap yang lebih pragmatis atas perubahan nama jalan. Pertimbangan yang cenderung lebih sederhana dan berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas proses jual-beli ditemukan pada mereka yang tinggal serta berjualan di sekitar pasar yang bersentuhan langsung dengan jalan yang diubah namanya

C. Persinggungan Antarkonsep Sosio-onomastika

Setelah menerapkan pendekatan sosio-onomastika, khususnya tiga konsep tersebut, penulis menemukan kemiripan aspek-aspek yang ditawarkan oleh setiap konsep. Konsep Lanskap Linguistik menyebutkan terdapat dua fungsi yang dimuat oleh penandaan ruang dan tempat melalui simbol bahasa, yaitu fungsi informasional dan fungsi simbolis (Landry & Bourhis, 1997). Konsep Kelekatan Toponimik memiliki dua kategori, yaitu ikatan nama dengan identitas dan ketergantungan terhadap nama sebagai “alat” yang difungsikan dalam

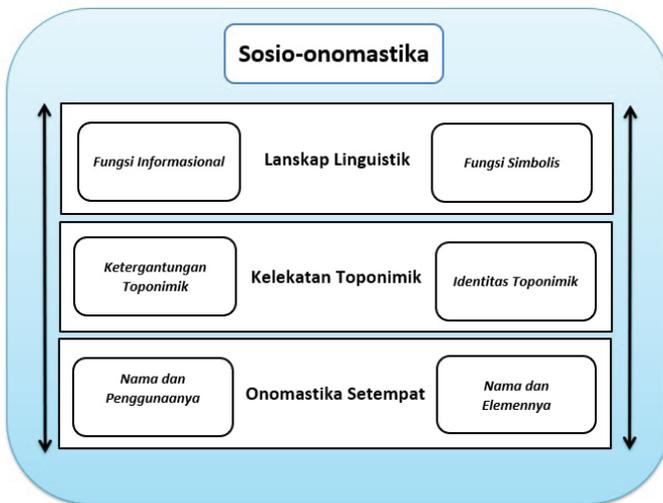
banyak aktivitas manusia (Kostanski, 2016b). Konsep Onomastika Setempat mempunyai dua kategori nama dan elemen bahasanya, serta nama dalam pemakaian sehari-hari (Ainiala, 2016a).

Diagram pada Gambar 30 menunjukkan fungsi informasional dari sebuah nama memiliki kemiripan dengan kategori keterangan toponimik dan nama-kegunaannya. Tiga subkonsep ini membahas fungsi nama sebagai penunjuk atau pengarah tempat dapat memudahkan setiap kegiatan manusia, misalnya saat menggunakan peta daring, GPS, atau dalam penulisan kartu nama dan papan reklame. Dalam perkembangannya, nama dapat digunakan sebagai alat ekonomi dan dikomersialkan. Sebuah toponimi yang sudah terkenal dapat difungsikan sebagai ikon sebuah kota atau daerah sehingga menjadi daya tarik wisatawan dalam ataupun luar negeri.

Saat membicarakan fungsi nama sebagai informasi penunjuk jalan atau tempat, pada saat yang bersamaan tecermin juga fungsi identifikasi dan penunjuk lokasi pada konsep Kelekatan Toponimik. Untuk membuat sebuah tempat dari ruang tentunya membutuhkan pembeda dari tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, toponimi hadir menerapkan simbol-simbol saat pembuatan tempat (Kostanski, 2016b). Mengacu pada Ekstrak 12 tentang kekhawatiran Cahyadi bahwa calon pelanggan hotelnya dapat tersesat karena perubahan nama jalan, hal tersebut menggambarkan bagaimana toponimi digunakan. Dalam Kelekatan Toponimik, dijelaskan bahwa toponimi dipakai dalam mengidentifikasi melalui peta. Pencarian toponimi via peta sangat bermanfaat bagi calon tamu yang akan berkunjung ke hotel tempat Cahyadi bekerja. Google Maps memfasilitasi perubahan yang terjadi di Yogyakarta dengan memutakhirkan nama jalan yang baru. Meskipun demikian, dalam penerapannya, tidak ada jaminan telah terjadi penyesuaian dalam mental leksikon masyarakat, apalagi perubahan ini baru berlangsung selama beberapa tahun, tepatnya sejak 2013. Keterpakaian nama jalan yang lama dirasa masih kuat daripada nama yang baru. Oleh karena itu, bisa saja sewaktu calon pelanggan Cahyadi bertanya pada pedagang atau masyarakat di sekitar hotel, mereka menjadi kebingungan ketika ditanyai di mana posisi nama jalan yang baru (Jalan Margo Utomo). Bisa saja tamu tersebut

diarahkan pada referen nama yang lain yang notabene bukan pada lokasi yang tepat. Inilah yang dicemaskan Cahyadi bahwa dapat saja tamunya tersesat dan tidak sampai ke tujuannya.

Berdasarkan pada bahasan pada Ekstrak 12, kita dapat menelusuri bagaimana tiga konsep ini dapat masuk dan menjelaskan fenomena yang terjadi. *Pertama*, nama jalan telah masuk ke peta daring guna penanda identifikasi dan menjadi salah satu aspek dari ketergantungan toponimik yang dibahas dalam konsep Kelekatan Toponimik. Nama Jalan Margo Utomo yang muncul dalam Google Maps merupakan simbol atas tempat yang telah dibuat oleh pemerintah Yogyakarta. Penanda lokasi memudahkan siapa saja yang ingin mengidentifikasinya melalui, misalnya, peta. Munculnya kesesuaian nama jalan yang tersedia di peta dengan petunjuk di sepanjang jalan (misalnya papan jalan atau nama jalan dari papan reklame) memperlihatkan fungsi informasi dari simbol bahasa dalam sebuah lanskap (Lanskap Linguistik). Ini semua membuat nama jalan dapat digunakan dengan



Sumber: Diadaptasi dari Landry dan Bourhis (1997), Kostanski (2016b), serta Ainiala (2016a)

Gambar 30. Persinggungan Tiga Konsep Sosio-onomastika

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tepat oleh siapa pun, sehingga menjadi koheren pada bahasan Onomastika Setempat, khususnya keterpakaian nama oleh penggunanya (lihat Erikha & Lauder, t.t.).

Kedua, nama dapat berfungsi sebagai simbol identitas individu ataupun kelompok, seperti yang diterakan dalam Lanskap Linguistik (lihat Erikha, 2018a). Fungsi identitas ini juga dibahas dalam Kelekatan Toponimik bahwa nama tempat menjadi ikatan psikologis tersendiri oleh suatu komunitas. Toponimi dapat menjadi pengingat sejarah dan peristiwa yang dikenang oleh sebuah etnik. Aspek emosi atau nilai rasa terhadap nama juga telah dibahas. Nilai rasa ini dapat muncul atas persepsi terhadap makna, ketidakpahaman atas nama, dan asosiasi nama dengan pengalaman individu sebelumnya.

Pertemuan ketiga konsep tersebut salah satunya dapat kita lacak melalui Ekstrak 8 yang membahas Jalan Margo Mulyo. Jundi, salah satu warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar jalan tersebut, mengaku penamaan yang baru dapat menuai sejumlah manfaat. Pemakaian bahasa Jawa pada nama jalan tersebut dapat mentransfer pengetahuan bahasa Jawa pada generasi penerus. Dengan kata lain, hal ini dapat melestarikan bahasa Jawa. Jundi merupakan masyarakat asli Yogyakarta. Menurut dia, pemakaian nama jalan yang baru ini telah menjadi pemarkah identitas Jawa sebagai etnik atau komunitas. Pemarkah ini mewacanakan kehadiran masyarakat berlatar etnik Jawa di sekitar Jalan Margo Mulyo.

Aspek simbol atau pemarkah tersebut sinkron dengan aspek komunitas dalam identitas toponimik yang digagas konsep Kelekatan Toponimik. Membahas komunitas atau kelompok dalam masyarakat tentunya tidak lepas dari aspek kelompok itu sendiri dan kelompok lain. Kelekatan yang dibangun oleh sebuah kelompok terhadap nama menggambarkan ikatan emosional karena adanya perasaan menjadi bagian yang sama dengan bahasa dan aksara yang digunakan pada papan nama jalan. Testimoni Jundi pada Ekstrak 8 akan berbeda jika nama baru yang digunakan pada ruas jalan itu menggunakan bahasa atau bahkan ortografi etnis lain, Sunda atau Bugis misalnya.

Aspek komunitas ini juga mirip saat kita menganalisis komentar Jundi menggunakan Onomastika Setempat. Sikap positifnya yang

memuji perubahan nama jalan menggunakan nama berbahasa Jawa dirasa dapat merawat eksistensi bahasa yang merupakan identitas dirinya sebagai orang Jawa. Sikap positif ini dikategorikan sebagai respons atas nama jalan dan elemen bahasa yang digunakannya.

BAB V

Harapan hingga Kebijakan Pemerintah Daerah dan Keraton



Merujuk pada persentase sikap masyarakat terhadap perubahan nama jalan, diperoleh persentase yang paling banyak menunjukkan kesetujuan bersyarat. Salah satu alasan masyarakat yang setuju adalah jika ada sosialisasi terhadap perubahan dan filosofi yang dikandung dari nama jalan yang baru. Masyarakat sadar terhadap perubahan nama bersumber dari dua hal, yaitu pengumuman media cetak dan informasi warga pendatang yang hendak menginap di hotel yang berada di jalan yang diubah. Oleh karena itu, masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi dari pemerintah terkait hal ini.

Meskipun demikian, pemerintah menyatakan, sebelum nama-nama itu diubah, mereka (yang terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta) telah mengikuti sejumlah rapat kerja rutin mengawal Sumbu Filosofi ini saat akan didaftarkan ke UNESCO. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ini berawal ketika Undang-Undang Istimewa atas Yogyakarta diberlakukan, dibuatkanlah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 yang mengatur tentang pelestarian cagar budaya di Yogyakarta. Salah satu yang berkaitan dengan hal ini adalah penguatan kembali Sumbu Filosofi atau Sumbu Imajiner yang terletak dari selatan ke utara (Laut

Selatan, Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, Tugu Pal Putih, dan Gunung Merapi). Hal ini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dibantu pemerintah kota menerbitkan kebijakan pada 2013 tentang perubahan nama-nama jalan utama, yaitu Jalan Trikora menjadi Jalan Pangurakan, Jalan Ahmad Yani menjadi Jalan Margo Mulyo, dan Jalan Pangeran Mangkubumi menjadi Jalan Margo Utomo.

Terkait dengan sosialisasi, pemerintah pun menjelaskan bahwa melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, mereka telah melakukan sosialisasi melalui tiga cara:

1. Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta mengirimkan surat kepada kecamatan-kecamatan terkait perubahan nama-nama jalan.
2. Media massa memberitakan informasi tentang perubahan sejumlah nama. Ini juga didukung dari pemberitaan media massa daring (*online*) dan fisik, seperti *Koran Kedaulatan Rakyat*.
3. Pemberlakuan nama ganda (*dual names*) pada papan jalan merupakan upaya sosialisasi atas masih berlakunya nama lama, dan di saat yang bersamaan juga telah dimulainya pemberlakuan nama jalan yang baru.

Kostanski (2016a) merekomendasikan empat hal agar pengembalian atau perubahan nama jalan dapat berlangsung dengan lancar. *Pertama*, perubahan nama seharusnya diadakan berdasar keputusan berbasis komunitas yang memungkinkan para anggota penggunaannya berpartisipasi saat mengambil keputusan. Dengan demikian, anggota komunitas merasakan rasa kepemilikan atas program perubahan nama jalan tersebut dan menjadi penanda bahwa pemerintah peduli atas kelekatan toponimik setiap individu komunitas tersebut. *Kedua*, pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap komunitas yang diganti nama jalannya. Melalui edukasi dan sosialisasi, komunitas dapat memahami alasan pentingnya toponimi ini diubah.

Ketiga, sebagai individu dan komunitas yang telah memiliki kelekatan toponimik pada toponimi sebelumnya, setiap langkah-langkah perubahan nama memerlukan pertimbangan yang matang dan tidak tergesa-gesa. Ini tidak berarti toponimi lama harus dipertahankan selamanya. Dengan adanya penamaan baru, suatu tempat dapat memiliki dua nama apabila nama yang lama tetap dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Penyebutan nama ganda (nama lama dan baru) pada suatu toponimi dapat menjadi solusi hingga nama baru pada toponimi dapat melekat sempurna pada mental leksikon anggota komunitas. *Keempat*, sebaiknya pihak yang berwenang tidak memanfaatkan isu perubahan nama karena alasan pariwisata saja. Ini dapat mengucilkan masyarakat lokal tempat tersebut. Selain itu, pengembalian nama asal tidak dilakukan dengan menciptakan kontroversi agar mendapatkan perhatian publik. Ini hanya makin membuat keberhasilan perubahan nama sulit diwujudkan.

Berdasarkan rekomendasi Kostanski (2016a), poin pertama ada kemungkinan tidak terlaksana karena proses perubahan dilakukan secara *top-down* atau atas-bawah dari pemerintah, meskipun terdapat usulan dari sejarawan dan budayawan untuk mengganti nama jalan agar relevan dengan muatan filosofi sejak 2003. Adapun komunitas yang dimaksudkan oleh Konstanski adalah masyarakat yang tinggal di sekitar jalan yang diubah. Pada rekomendasi kedua, terdapat dua bentuk pengertian sosialisasi. Menurut pihak pemerintah, mereka telah melakukan sosialisasi dengan tiga bentuk. Namun, pengertian sosialisasi yang diinginkan masyarakat dari temuan penelitian ini adalah perlu adanya pertemuan antara masyarakat dan pemerintah untuk menjelaskan alasan perubahan nama jalan. Mungkin apa yang ditunjukkan pada Gambar 31 merupakan sosialisasi lain terkait Sumbu Filosofi, yang disebarluaskan setelah perubahan nama jalan dilakukan. Poin ketiga sudah dijalankan karena penamaan ganda sudah digunakan, dimulai dari papan nama jalan, diikuti pula oleh peta daring, seperti Google Maps. Sebagian papan reklame di sekitar jalan pun juga telah menggunakan nama ganda. Poin keempat tidak relevan

dengan kasus Yogyakarta karena Pemerintah Daerah Yogyakarta sama sekali tidak menggunakan isu ini sebagai alat untuk memprovokasi antar-anggota masyarakat.

SOSIALISASI
YOGYAKARTA
warisan budaya dunia
City Of Philosophy

TALKSHOW
Sumbu Filosofi Jogja Istimewa
24 Oktober 2016
Plaza Ngasem • Pukul : 19.00 WIB - Selesai

NARASUMBER
Drs. Umar Priyono, M. Pd (Kepala Dinas Kebudayaan DIY)
Ir. Yuwono Sri Suwito, M.M (Pemerintah Budaya)
Sabrang Mowo Damar Panuluh (Noe "letto")

MC
TIO ANDITIO
DIANA PAVITA

Hiburan
Keroncong "Cinta Nada"
Nusasmara Band

**Angkringan
Gratis**

GRATIS

JALAN SEHAT
Laku Lambah Sumbu Filosofi Jogja Istimewa
30 Oktober 2016
Monumen Serangan Oemoem 1 Maret
START : 05.00 WIB - Selesai

HIBURAN
JHBXVIII • BENHARLEM
JATHILAN "Karya Muda Utama"

MC
Asty Macan
Jojo Kolorita

Informasi
Balai Pelestarian
Warisan Budaya dan Cagar Budaya
Jl. Gamelan Kidul No.1
Telp (0274) 371 418
Jam kerja: 08.00-16.00 WIB
CP : 081 2123 18173 (Dina)

**Fasilitas
Souvenir
Konsumsi**

**REBUT TOTAL HADIAH
SENILAI JUTAAN RUPIAH!!!**

ORGANIZED BY:

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY. (t.t)

Gambar 31. Poster Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB VI

Pengujung



A. Rekonstruksi

Berdasarkan pada penggalian makna ketiga nama jalan yang diubah, telah diperlihatkan bahwa nama-nama tersebut memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Dari sisi utara, seorang manusia akan melalui Jalan Margo Utomo sebagai lambang harapan untuk tetap berjalan di jalan yang utama sehingga memperoleh kebaikan. Kemudian, Jalan Malioboro, yang tidak diubah karena telah memiliki makna yang selaras dengan filosofi *sangkan paraning dumadi*. Malioboro diartikan sebagai ‘obor/pelita para wali’. Obor itu dianalogikan sebagai ajaran agama yang menjadi panduan hidup manusia. Selanjutnya, Jalan Margo Mulyo dimaknai sebagai jalan yang mulia atau penuh kemuliaan. Manusia yang dapat berpegang teguh ajaran agama dan tidak terpengaruh oleh godaan duniawi kelak akan mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Terakhir, Jalan Pangurakan dimaknai sebagai kondisi manusia yang telah terlepas dari hawa nafsu. Keadaan ini serupa dengan anak bayi saat baru lahir, yang bersih dan suci. Semua makna ini termaktub dalam Sumbu Filosofi, khususnya filosofi *sangkan paraning dumadi* konteks mikrokosmos. Mikrosmos atau *jagad cilik* menggambarkan perjalanan manusia yang sudah dewasa hingga selanjutnya mencapai tempat yang dituju.

Nama-nama jalan, baik nama baru maupun nama lama, dimaknai secara beragam oleh masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitarnya. Dengan kata lain, nama jalan tidak hanya memuat makna dasar atau makna denotasi hingga makna filosofis, tetapi juga telah dilekati konotasi positif dan negatif oleh masyarakatnya. Konotasi positif muncul karena nama baru diasosiasikan sebagai sesuatu yang modern daripada nama yang lama serta dekat dengan identitas kesukuan karena nama jalan memakai bahasa dan aksara Jawa. Nama lama, juga dianggap lebih positif karena diasosiasikan dengan nama pahlawan besar yang telah berjasa bagi Indonesia. Dengan demikian, terdapat nilai-nilai nasionalisme dan lambang perjuangan bangsa Indonesia. Nama jalan lama juga memuat serangkaian memori masa kecil bersama anggota keluarga yang dicintai. Sementara itu, konotasi negatif muncul karena nama diasosiasikan dengan pengalaman yang kurang baik.

Sebagian besar anggota masyarakat yang terlibat di dalam kajian ini tidak mengetahui makna filosofis pada nama jalan yang baru diganti. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intens terkait perubahan nama tersebut sehingga mereka memahami makna yang dikandung. Sebagian besar di antara mereka menilai perubahan nama jalan ini tidak mendatangkan manfaat praktis. Selain itu, berhubungan dengan preferensi, mayoritas masyarakat condong memilih nama lama jika dibanding dengan nama baru. Berdasarkan pada gambaran sikap, persepsi, dan preferensi masyarakat, ini dapat disimpulkan bahwa perubahan tiga nama jalan ini cukup berhasil dilakukan. Meskipun demikian, penilaian ini tidak serta-merta menegasikan evaluasi mereka yang kurang atau tidak menyetujui upaya pemerintah ini.

Dari sudut pandang pemerintah, perubahan ini pun dirasa sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur budaya dan perannya. Restorasi nama jalan menjadi nama semula dianggap relevan dengan tujuan revitalisasi budaya dan sejarah Yogyakarta. Saat ini, upaya menjadikan Yogyakarta se-

bagai Kota Filosofi serta Warisan Budaya Dunia masih dalam proses verifikasi oleh UNESCO dan dikategorikan sebagai bagian dari daftar tentatif (*tentative lists*) (Historical City Centre of Yogyakarta, t.t.). Sementara itu, hingga penelitian ini dilakukan, Pemerintah Daerah terus melakukan sosialisasi filosofi ke masyarakat.

Karena berkelindannya sejumlah disiplin ilmu dalam menelusuri fenomena nama-nama jalan dalam filosofi *sangkan paraning dumadi* ini, dapat dikatakan bahwa ini merupakan bentuk penerapan studi multidisipliner. Melalui linguistik, entitas jalan dikaji bentuk dan maknanya dari masa ke masa. Ranah psikologi sosial meneroka perihal kelekatan, sikap, dan persepsi mereka yang memakai nama jalan tersebut. Berkaca dari temuan di lapangan, masyarakat seakan-akan mengisyaratkan kepada kita agar lebih berhati-hati saat melakukan pergantian nama jalan karena dapat berdampak pada banyak pihak dan juga banyak hal. Pengubahan tanpa sosialisasi yang cukup memadai dapat membuat pesan yang ingin disampaikan bisa saja malah tidak mengena, sehingga dapat memicu penolakan dari anggota masyarakat. Indikasi penolakan karena secara psikologis, tempat berikutnya juga nama tempat yang diubah telah lama melekat di ingatan dan kesadaran masyarakat. Melalui psikologi sosial atas nama, kita mengetahui nama bukan hanya perihal rujukan—seperti kata para filsuf klasik—atau informasi lokasi semata, melainkan nama telah menjadi simbol identitas pada individu ataupun kelompok, dari kelompok budaya, etnis, agama, hingga hobi. Oleh karena itu, kajian toponimi dan relasinya dengan masyarakat-pemerintah diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta ataupun kota atau daerah lain yang akan melakukan pengubahan toponimi.

Hal penting lain yang ditemukan adalah pengubahan nama-nama jalan dilakukan dalam konteks lanskap yang termasuk ke dalam teritori Kerajaan atau Kesultanan. Kesultanan, seperti Keraton Yogyakarta, dipandang masih memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakatnya, terutama mereka yang tinggal dan beraktivitas di Kota Yogyakarta. Meskipun pengubahan memiliki dampak, khususnya pada tingkatan praktis dalam aktivitas sehari-hari, hal itu dapat dimaklumi bagi

masyarakat Yogyakarta. Mereka menganggap pengubahan nama jalan tentunya memiliki iktikad yang baik. Dengan kata lain, nama sebagai peranti bahasa telah menjalankan fungsi pragmatiknya, yaitu ingin mengomunikasikan pesan filosofi hidup agar dapat diejawantahkan di dalam kehidupan rakyat Keraton Yogyakarta. Selain itu, pergantian toponimi tidak terlepas dari titah Sang Sultan, sosok yang sangat dihormati di Yogyakarta. Pengubahan ini layaknya amaran dari raja kepada masyarakatnya sehingga sulit untuk tidak mematuhi. Situasi geopolitik inilah yang menjadi nilai kuat dalam pengubahan tiga nama jalan di Kota Yogyakarta.

B. Rekomendasi

Sebagai bentuk pengembangan dari buku ini yang dirasa belum paripurna, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan di kemudian hari, yaitu a) perlunya penelitian diakronis yang lebih komprehensif terhadap titik-titik pengamatan toponimi yang dilalui Sumbu Filosofi; b) pada garis lurus pada Sumbu Filosofi, terdapat bahasan tentang makna filosofi pohon dan tanaman yang tumbuh, seperti pohon beringin, kweni, ataupun pakel. Sebagai penguat, kajian selanjutnya dapat mempertimbangkan objek ini dikaji sebagai pelengkap kajian toponim; c) Untuk membuktikan apakah Sumbu Filosofi ini tetap hidup dan dijalankan oleh masyarakat, diperlukan penggalan lebih lanjut. Berdasarkan pada penjelasan I.E. Hadiyanta (komunikasi personal, 3 Oktober 2017) dan Magnis-Suseno (1988), terdapat dua paguyuban yang telah menjalankan filosofi ini, yaitu Paguyuban Ngesti Tunggal (disingkat dengan Pangestu) dan Paguyuban Songgobuwono. Oleh karena itu, akan lebih menarik jika dilakukan penelusuran penerapan dari masa ke masa tentang tiga filosofi Jawa, yaitu *sangkan paraning dumadi*, *hamemayu hayuning bawana*, dan *manunggaling kawula gusti*; d) dalam kerangka psikologi sosial, diperlukan studi lanjutan terkait persepsi, sikap, dan kelekatan terhadap toponimi bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya, studi kuantitatif, baik melalui kajian korelasional (misalnya bagaimana hubungan identitas kejawaan atau sebagai masyarakat Yogyakarta dengan

kelekatan terhadap toponimi yang ada) maupun berdasarkan pada anjakan eksperimental (seperti bagaimana pengaruh perubahan toponimi sebagai keputusan politik terhadap sikap masyarakat dengan masyarakat) sehingga temuan yang diperoleh berimbang dan makin kaya melengkapi studi yang telah ada.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Pustaka



- Adam, L. (2003). The Courtyards, gates, and buildings of the Kraton of Yogyakarta. Dalam S. Robson (Ed.), *The Kraton. Selected essays on Javanese court* (13–40). KITLV Press.
- Adi, F. W. (2014). *Sengkalan memet*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. http://digilib.isi.ac.id/4965/1/bab_1.pdf
- Administration to change name of two streets. (2013, 9 Oktober). *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2013/10/09/administration-change-name-two-streets.html>
- Ainiala, T. (2016a). Attitudes to street names in Helsinki. Dalam L. Kostanski & G. Puzey (Eds.), *Names and naming: People, places, perceptions, and power* (166–186). Multilingual Matters.
- Ainiala, T. (2016b). Names in society. Dalam C. Hough (Ed.), *The Oxford handbook of names and naming* (447–459). Oxford University Press.
- Ainiala, T., & Halonen, M. (2017). The perception of Somali place names among imigrant Somali youth in Helsinki. Dalam T. Ainiala & J.-O. Östman (Eds.), *Socio-onomastics. The pragmatic of names* (203–226). John Benjamins.

- Ainiala, T., & Lappalainen, H. (2017). Orienting to norms: Variability in the use of names for Helsinki. Dalam T. Ainiala & J.-O. Östman (Eds.), *Socio-onomastics. The pragmatics of names* (pp. 129–154). John Benjamins.
- Ainiala, T., & Östman, J.-O. (2017). Introduction: Socio-onomastics and pragmatics. Dalam T. Ainiala & J.-O. Östman (Eds.), *Socio-onomastics. The pragmatics of names* (2–18). John Benjamins.
- Ainiala, T., Saarelma, M., & Sjöblom, P. (2016). *Names in focus. An introduction to Finnish onomastics*. Finnish Literature Society.
- Alderman, D. H. (2000). A street fit for a king: Naming places and commemoration in the American South. *The Professional Geographer*, 52(4), 672–684. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/0033-0124.00256>
- Alderman, D. H. (2003). Street names and the scaling of memory: The politics of commemorating Martin Luther King, Jr within the African American community. *Area*, 35(2), 163–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-4762.00250>
- Alderman, D. H. (2008). Place, Naming and the interpretation of cultural landscapes. Dalam B. Graham & P. Howard (Eds.), *The Ashgate Research Companion to heritage and identity* (181–194). Ashgate Publishing Limited.
- Alderman, D. H., & Inwood, J. (2018). Street naming and the politics of belonging: spatial injustices in the toponymic commemoration of Martin Luther King, Jr. In R. Rose-redwood, D. H. Alderman, & M. Azaryahu (Eds.), *The political life of urban streetscapes: Naming, politics, and place* (pp. 259–273). Routledge.
- Aldrin, E. (2016). Names and Identity. Dalam C. Hough (Ed.), *The Oxford handbook of names and naming* (pp. 460–475). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.24>
- Algeo, J. (2010). Is a theory of names possible? *Names*, 58(2), 90–96. <https://doi.org/10.1179/002777310X12682237915106>
- Algeo, J. (2015). From classic to classy: Changing fashions in street names. *Names*, 63(4), 220–232. <https://doi.org/10.1080/00277738.2015.1118984>
- Alun-alun selatan: Cerita ruang bersama. (2009, 14 November). Space/Scape Project. <http://space.kunci.or.id/alun-alun-selatan-cerita-ruang-bersama/>

- Anderson, J. M. (2007). *The grammar names*. Oxford University Press.
- Aribowo, E. K., Rahmat, & Nugroho, A. J. S. (2018). Ancangan analisis bahasa di ruang publik: Studi lanskap linguistik Kota Surakarta dalam mempertahankan tiga identitas. Dalam Maryanto, W. Sasangko, A. S. Danardana, & H. Widiyanto (Ed.), *Semiloka dan deklarasi pengutamaan bahasa negara* (297–309). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Artawa, K., & Sartini, N. W. (2019). Linguistic landscapes: A study of human mobility and identity change. *Proceedings of the 4th International Conference on Urban Studies (ICUS 2017), December 8–9, 2017* (165–171). Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
- Ashadi. (2017). *Keraton Jawa*. Arsitektur UMJ Press.
- Atmojo, W. (1973). *Peta Kotamadya Yogyakarta (Map of Yogyakarta) 1*. Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.
- Atlas of Mutual Heritage. (t.t.). *View of the sultan of Jogjakarta's palace*. Diakses pada 4 Oktober, 2021 dari <https://www.atlasofmutualheritage.nl/en/View-sultan-Jogjakartas-palace.4943>
- Augustins, G. (2004). Naming, dedicating: Street names and tradition. *History and Anthropology* 15(3), 289–299. <https://doi.org/10.1080/0275720042000257421>
- Azaryahu, M. (1997). German reunification and the politics of street names: the case of East Berlin. *Political Geography*, 16(6), 479–493. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0962-6298\(96\)00053-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0962-6298(96)00053-4)
- Azaryahu, M. (2018). Revisiting East Berlin and Haifa: A comparative perspective on renaming the past. Dalam R. Rose-redwood, D. H. Alderman, & M. Azaryahu (Eds.), *The political life of urban streetscapes: naming, politics, and place* (56–73). Routledge.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *Jalan. KBBI daring*. Diakses pada 9 Mei 2017, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan>
- Barthes, R. (1986). *Elements of semiology*. Hill and Wang.
- Behrend, T. (1989). Kraton and cosmos in traditional Java. *Archipel*, 37, 173–187.
- Ben-Rafael, E. (2009). A sociological approach to the study of linguistic landscapes. Dalam E. Shohamy & D. Gorter (Eds.), *Linguistic landscape. Expanding the scenery* (40–54). Routledge.

- Benjamin, W. (1999). *The arcades project* (R. Tiedemann, Ed.). The Belknap Press of Harvard University Press.
- Berezkina, M. (2014). Place-names in Oslo, seen from an inhabitant perspective in three different ethnic groups. Dalam C. Hough & D. Izdebska (Eds.), *Proceedings of the XXIV ICOS international congress of onomastic sciences* (402–412). University of Glasgow.
- Blackwood, R. J., & Tufi, S. (2015). *The linguistic landscape of the Mediterranean: French and Italian coastal cities*. Palgrave Macmillan.
- Blommaert, J. (2013). *Ethnography, superdiversity and linguistic landscapes: Chronicles of complexity*. Multilingual Matters.
- Bodenhorn, B., & Vom Bruck, G. (2006). “Entangled in histories”: an introduction to the anthropology of names and naming. Dalam G. Vom Bruck & B. Bodenhorn (Eds.), *The Anthropology of names and naming* (1–30). Cambridge University Press.
- Bolodadi, T. U. P., da Silva, A. M., Erikha, F., Zaman, S., Rahmawati, A., Permatasari, A., Fedrian, R., & Indarto, T. (2021). *Pedoman pembentukan kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bratakesawa, R. (1980). *Keterangan Candrasengkala* (T.W.K. Hadisoeperta, Penerj). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Brotodiningrat, K. (1978). *Arti Kraton Yogyakarta*. Musium Kraton Yogyakarta.
- Carey, P. (1984). Jalan Maliabara (‘Garland Bearing Street’): The etymology and historical origins of a much misunderstood Yogyakarta street name. *Archipel*, 51–62.
- Carey, P. (2015). Jalan Malioboro (‘jalan berhiaskan untaian bunga’). Dalam P. Carey (Ed.), *Asal usul nama Yogyakarta dan Malioboro* (7–40). Komunitas Bambu.
- Colomé, L. C., & Long, E. (2012). The linguistic landscape of three streets in Barcelona: Patterns of language visibility in public space. Dalam D. Gorter, H. F. Marten, & L. Van Mensel (Eds.), *Minority languages in the linguistic landscape* (183–203). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230360235_11

- Curtin, M. L. (2009). Languages on display: Indexical signs, identities and the linguistic landscape of Taipei. Dalam E. Shohamy & D. Gorter (Eds.), *Linguistic landscape: Expanding the scenery* (221–237). Routledge.
- Darmosugito. (1956). *Kota Jogjakarta 200 tahun, 7 Oktober 1756–7 Oktober 1956*. Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun.
- Da Silva, A. M., Tjung, Y. N., Wijayanti, S. H., & Suwartono, C. (2021). Language use and tourism in Yogyakarta: The linguistic landscape of Malioboro. *Wacana. Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, 22(2), 295–318.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1977). *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2013). Polemik usulan penggantian nama Jalan Medan Merdeka. Diakses pada 15 Agustus 2021 dari <http://portal.dpd.go.id/berita-polemik-usulan-penggantian-nama-jalan-medan-merdeka>
- Dion, K. L. (1983). Names, identity, and self. *Names*, 31(4), 245–257. <https://doi.org/10.1179/nam.1983.31.4.245>
- Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. (t.t.). *Peta jalan Kota Yogyakarta*. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
- Durkin, P. (2009). *The Oxford guide to etymology*. Oxford University Press.
- Dwidjaraja, A. (1935). *Ngajogjakarta Hadiningrat. Djilid 1 Kraton Ngajogjakarta*. Tjap-Tjapan Kapisan.
- Erikha, F. (2017). Nama jalan baru versus nama jalan lama di Kota Yogyakarta: Sebuah penelusuran toponomastik. *Seminar internasional leksikologi dan leksikografi*, 126–135.
- Erikha, F. (2018a). Konsep lanskap linguistik pada papan nama jalan kerajaan (râjamârga): Studi kasus di Kota Yogyakarta. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 8(1), 38–52. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.231>
- Erikha, F. (2018b). Geliat aksara dan bahasa ganda dalam Papan Nama jalan di Indonesia. *Kumpulan makalah seminar dan lokakarya pengutamaan bahasa negara. lanskap bahasa di ruang publik: dimensi bahasa, sejarah, dan hukum*, 226–238.

- Erikha, F. (2018c). *Pengubahan nama jalan di Kota Yogyakarta: Sebuah kajian sosio-onomastik* [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Indonesia.
- Erikha, F., Susanti, N., & Yulianto, K. (2018). *Toponimi. Peningkatan kompetensi untuk pemandu wisata sejarah*. Direktorat Sejarah. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Erikha, F. (2021). Application of the concept of critical toponymies to street name changes in Bandung, Yogyakarta and Surabaya. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 11(1), 25–41. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v11i1.373>
- Erikha, F., & Lauder, M. R. M. T. (t.t.). Javanese philosophy, public perception and changes to street names in Yogyakarta: A socio-onomastic study.
- Erikha, F., Wulandari, L. S., & Shomami, A. (t.t.). *Toponimi dalam lagu-lagu Didi Kempot* [Naskah tidak diterbitkan]
- Ethnologue. (t.t.). *Javanese*. Diakses pada 3 September, 2017, dari <https://www.ethnologue.com/language/jav>.
- Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. (2017). *Penyusunan data jalan beruas Kota Yogyakarta Berbasis GIS* [Laporan tidak diterbitkan]. Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada.
- Fauziah, S. M. N. (2018). Dari jalan kerajaan menjadi jalan pertokoan kolonial: Malioboro 1756-1941. *Lembaran Sejarah*, 14(2), 171–193.
- Garvin, R. T. (2010). Responses to the linguistic landscape in Memphis, Tennessee: An urban space in transition. Dalam E. Shohamy, E. Ben-Rafael, & M. Barni (Eds.), *Linguistic landscape in the city* (252–271).
- Gericke, J. F. C., & Rorda, T. (1847). *Javaansch-Nederduitsch woordenboek*. B.I.J. Johannes Muller.
- Giosa, P. De. (2011). Urban symbolism in Yogyakarta: In search of the lost symbol. Dalam P. J. M. Nas (Ed.), *Cities full symbols. A theory of urban space and culture* (85–106). Leiden University Press.
- Google. (t.t.). [Pusat Kota Yogyakarta]. Diakses pada 1 Agustus 2021 dari <https://www.google.com/maps/place/Jl.+Malioboro,+Sosromenduran,+Gedong+Tengen,+Kota+Yogyakarta,+Daerah+Istimewa+Yogyakarta/@-7.7943065,110.3555076,15z/data=!4m5!3m4!1s0x2e7a5825fa6106c5:0x3ea4c521a5ed1133!8m2!3d-7.792635>.

- Gorter, D. (2006). Introduction: The study of the linguistic landscape as a new approach to multilingualism. Dalam D. Gorter (Ed.), *Linguistic landscape a new approach to multilingualism* (1–6). Multilingual Matters.
- Gupta, D., Handayani, T., Harnoko, D., & P. Yuliani (Eds.). (2007). *Toponim Kota Yogyakarta*. Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kota Yogyakarta.
- Hadiyanta, I. E. (2000, 17 September). “Poros imajiner”: Identitas historis Kota Yogyakarta. *Kompas*, 4.
- Hadiyanta, I. E. (2012). *Menguak keagungan Tamansari*. Sumber Aksara Yogyakarta.
- Helleland, B. (2012). Place names and identities. *Oslo Studies in Language*, 4(2), 96–117.
- Hidayat, R. S. (2010). Semiotik dan bidang ilmu. Dalam T. Christomy & U. Yuwono (Ed.), *Semiotika budaya* (pp. 77–86). Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Historical City Centre of Yogyakarta. (t.t.). Diakses pada 23 Juli, 2020, dari <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6206>
- Hoed, B. H. (2014). *Semiotik dan dinamika sosial budaya* (3rd ed.). Komunitas Bambu.
- Hough, C. (2016). Introduction. Dalam C. Hough (Ed.), *The Oxford handbook of names and naming* (1–16). Oxford University Press.
- InfoJogja.com. (2017). *Pemkot Jogja larang PKL berjualan di Jalan Malioboro*. Diakses pada 1 Agustus, 2017, dari <http://www.info-jogja.com/2014/07/pemkot-jogja-larang-pkl-berjualan-di.html>.
- Jayanti, A. (2020). Toponimi Kampung Njeron Beteng dan Njaban Beteng Keraton Yogyakarta. *Deskripsi Bahasa*, 3(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.22146/db.v3i1.399>
- Dinas Kebudayaan DIY. (t.t.). *Sosialisasi Yogyakarta warisan budaya dunia*. Diakses pada 2 Agustus, 2017, dari <https://www.budaya.jogjaprov.go.id/agenda/detail/599-sosialisasi-yogyakarta-warisan-budaya-dunia->.
- Jones, R., Grijns, C. D., & de Vries, J. W. (2007). *Loan-words in Indonesian and Malay* (R. Jones, Ed.). KITLV Press.
- Kadmon, N. (2000). *Toponymy: The lore, laws, and language of geographical names*. Vantage Press.

- Kadmon, N. (2004). Toponymy and geopolitics: The political use —and misuse— of geographical names. *The Cartographic Journal*, 41(2), 85–87. <https://doi.org/10.1179/000870404X12897>
- Khairuddin. (1995). *Filsafat Kota Yogyakarta*. Liberty.
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Sepanjang Sumbu Filosofi Sebagai Struktur Cagar Budaya. (2017).
- Kostanski, L. (2009). 'What's in a name?': *Place and toponymic attachment, identity and dependence. A case study of the Grampians (Gariwerd) National Park name restoration process*. University of Ballarat.
- Kostanski, L. (2011). Toponymic dependence research and its possible contribution to the field of place branding. *Place Branding and Public Diplomacy*, 7(1), 9–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/pb.2010.35>
- Kostanski, L. (2016a). The controversy of restoring indigenous names: Lessons learnt and strategies for success. Dalam L. Kostanski & G. Puzey (Eds.), *Names and naming: People, places, perceptions and power* (129–165). Multilingual Matters.
- Kostanski, L. (2016b). Toponymic attachment. Dalam C. Hough (Ed.), *The Oxford handbook of names and naming* (Issue July 2018, 1–18). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.42>
- Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23–49. <https://doi.org/10.1177/0261927X970161002>
- Lauder, A. F., Lauder, M. R. M. T., Erikha, F., Wardany, I., & Barus, E. R. M (2017). Changing place names to reflect heritage: A case study in Javanese philosophy in Yogyakarta. *Eleventh United Nations conference on the standardization of geographical names, June*. https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_111_CRP.111_10_Indonesia_Cultural_Heritage.pdf
- Lauder, A. F., & Lauder, M. R. M. T. (2015). Ubiquitous place names standardization and study in Indonesia. *Wacana*, 16(2), 383–410.
- Lauder, M. R. M. T., & Lauder, A. F. (2017). Place names and cultural heritage in an archipelagic country. Dalam United Nations Group of

- Experts on Geographical Names (Ed.), *Toponymy training manual*. United Nations Group of Experts on Geographical Name. [https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/CHAPTER 25.pdf](https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/CHAPTER_25.pdf)
- Lauder, M. R. M. T., & Lauder, A. F. (2016). Maritime Indonesia and the archipelagic outlook: Some reflections from a multidisciplinary perspective on old port cities in Java. *Wacana*, 17(1), 97–120.
- Leeman, J., & Modan, G. (2010). Selling the city: Language, ethnicity and commodified space. Dalam E. Shohamy, R. Ben-Eliezer, & M. Barni (Eds.), *Linguistic landscape in the city* (182–198). Multilingual Matters.
- Lombard, D. (2008). *Nusa Jawa: Silang budaya. Warisan kerajaan-kerajaan konsentris*. Gramedia Pustaka Utama.
- Low, S. M., & Altman, I. (1992). Place attachment. Dalam I. Altman & S. M. Low (Eds.), *Place attachment. Human behavior and environment (Advances in theory and research)* (1–12). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-4684-8753-4_1
- Magnis-Suseno, F. (1988). *Etika Jawa. Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Gramedia.
- Marin, A. (2012). Bordering time in the cityscape. Toponymic changes as temporal boundary-making: Street renaming in Leningrad/St. Petersburg. *Geopolitics*, 17(1), 192–216. <https://doi.org/10.1080/14650045.2011.574652>
- Marten, H. F., Van Mensel, L., & Gorter, D. (2012). Studying minority languages in the linguistic landscape. Dalam D. Gorter, L. Van Mensel, & H. F. Marten (Eds.), *Minority languages in the linguistic landscape* (1–18). Palgrave Macmillan.
- Natal bersama Bung Karno pada waktu revolusi tindakan yang tepat dan benar. (1983, Desember). *Sinar Harapan*, 12.
- Neethling, B. (2016). Street names A changing urban landscape. Dalam C. Hough (Ed.), *The Oxford handbook of names and naming* (144–157). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.50>
- Negro, S.D. (2008). Local policy modeling the linguistic landscape. Dalam E. Shohamy & D. Gorter (Eds.), *Linguistic landscape. Expanding the scenery* (206–218). Routledge.

- Niedzielski, N. A., & Preston, D. R. (2000). *Folk linguistics* (De Gruyter Mouton, Ed.). <https://doi.org/10.1515/9783110803389>
- Noorduyn, J. K. (2015). Etimologi nama Yogyakarta. Dalam P. Carey (Ed.), *Asal usul nama Yogyakarta dan Malioboro* (41–84). Komunitas Bambu.
- Nöth, W. (1990). *Handbook of semiotics*. Indiana University Press.
- Nyström, S. (2016). Names and naming. Dalam C. Hough (Ed.), *The Oxford Handbook of names and naming* (39–51). Oxford University Press.
- Ogden, C. K., & Richards, I. (1923). *The meaning of meaning* (8th ed.). Harcourt, Brace & World.
- Pigeaud, T. (2003). The Northern Palace Square in Yogyakarta. Dalam S. Robson (Ed.), *The Kraton. Selected essays on Javanese court* (pp. 1–12). KITLV Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1939). *Baoesastra Djawa*. J.B. Wolters.
- Prasasti pada Tugu Golong Gilig. (2018, 9 April). *Kraton Jogja*. <https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting-wewangunan/11/tugu-golong-gilig-simbol-persatuan-raja-dan-rakyat>
- Prawiroatmodjo, S. (1981). *Bausastra Jawa-Indonesia Jilid 1–2*. Gunung Agung.
- Priyono, U., Pratiwi, D. L., Tanudirjo, D. A., Suwito, Y. S., Suyata, & Albiladiyah, I. (2015). *Buku profil Yogyakarta City of Philosophy*. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Prawiroatmojo, S. (1981). *Bausastra Jawa-Indonesia jilid 1–2*. Gunung Agung.
- Puzey, G. (2016). Linguistic landscapes. Dalam C. Hough (Ed.), *The Oxford handbook of names and naming* (395–411). Oxford University Press.
- Rachman, B. M. (1999). *Dari keseragaman menuju keberagaman wacana multikultural dalam media*. Lembaga Studi Pers & Pembangunan.
- Rahyono, F. X. (2015). *Kearifan budaya dalam kata (Edisi Kedua)*. Wedatama Widya Sastra.
- Rais, J., Lauder, M. R. M. T., Sudjiman, P., Ayatrohaedi, Sulistiyo, B., Wiryaningsih, A., Suparwati, T., & Santoso, W. E. (2008). *Toponimi Indonesia. Sejarah budaya yang panjang dari permukiman manusia dan tertib administrasi*. Pradnya Paramita.

- Raymond, C. M., Brown, G., & Weber, D. (2010). The measurement of place attachment: Personal, community, and environmental connections. *Journal of Environmental Psychology*, 30(4), 422–434. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.08.002>
- Rochkyatmo, A. (1997). *Pelestarian dan modernisasi aksara daerah: Perkembangan metode dan teknis menulis aksara Jawa*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Rose-Redwood, R. (2016). “Reclaim, rename, reoccupy”: Decolonizing place and the reclaiming of PKOLS. *ACME*, 15(1), 187–206.
- Rose-Redwood, R., Alderman, D., & Azaryahu, M. (2010). Geographies of toponymic inscription: New directions in critical place-name studies. *Progress in Human Geography*, 34(4), 453–470. <https://doi.org/10.1177/0309132509351042>
- Rose-Redwood, R., Alderman, D., & Azaryahu, M. (2018). The urban streetscape as political cosmos. Dalam R. Rose-Redwood, D. Alderman, & M. Azaryahu (Eds.), *The political life of urban streetscapes naming, politics, and place* (1–24). Routledge.
- Rose-Redwood, R. S. (2008). From number to name: Symbolic capital, places of memory and the politics of street renaming in New York City. *Social & Cultural Geography*, 9(4), 431–452. <https://doi.org/10.1080/14649360802032702>
- Salamun. (1988). *Inventarisasi dan dokumentasi nama-nama jalan di daerah Kotamadya Yogyakarta*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Salazar, N. B. (2010). *Envisioning Eden: Mobilizing imaginaries in tourism and beyond*. Berghahn Books.
- SEAlang Library Javanese. (t.t.). Diakses pada 11 November, 2017, dari <http://sealang.net/java/dictionary.htm>
- Scollon, R., & Scollon, W. S. (2003). *Discourse in place. Language in the matherial world*. Routledge.
- Shakespeare, W. (2005). *Romeo and Juliet. Webster's French thesaurus edition* (3rd ed.). Icon Classics.
- Sheldon, K. M., & Lyubomirsky, S. (2012). The challenge of staying happier: Testing the hedonic adaptation prevention model.

Personality and Social Psychology Bulletin, 38(5), 670–680. <https://doi.org/10.1177/0146167212436400>

- Shohamy, E., & Waksman, S. (2009). Linguistic landscape as an ecological arena: Modalities, meanings, negotiations, education. Dalam E. Shohamy & D. Gorter (Eds.), *Linguistic landscape. Expanding the scenery* (313–331). Routledge.
- Smith, G. W. (2016). Theoretical foundations of literary onomastics. Dalam C. Hough (Ed.), *The Oxford handbook of names and naming* (295–309). Oxford University Press.
- Smithies, M. (1986). *Yogyakarta. Cultural heart of Indonesia*. Oxford University Press.
- Stroud, C., & Mpendukana, S. (2009). Towards a material ethnography of linguistic landscape: Multilingualism, mobility and space in a South African township1. *Journal of Sociolinguistics*, 13(3), 363–386. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9841.2009.00410.x>
- Suaka dan peninggalan sejarah dan purbakala. (1999). *Laporan pendokumentasian Gereja Protestan di Indonesia bagian barat Gereja Marga Mulya Yogyakarta*.
- Sulistiyowati, N. A., & Priyatmoko, H. (2019). *Toponim Kota Yogyakarta* (T. Wulandari, Ed.). Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sunjata, I. P., Tashadi, & Astuti, S. R. (1995). *Makna simbolik tumbuh-tumbuhan dan bangunan kraton: Suatu kajian terhadap serat salokapatra*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Susanti, N., Lauder, M. R. M. T., Wuryandari, N. W., Rahayu, A., & Munawarah, S. (2016). *Rekam jejak relokasi pemukiman di Jakarta: Kajian toponimi wilayah Kalijodo, Kampung Pulo, dan Luar Batang-Pasar Ikan* [Laporan tidak diterbitkan]. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Tanpoaran. (1978). *Sangkan paraning dumadi*. Yayasan Djojo Bojo.
- Taylor, S. (2016). Methodologies in place-name research. Dalam C. Hough (Ed.), *The Oxford handbook of names and naming* (99–119). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.17>

- Tirtakoesoema, R. S. (2003). The procession with Kangjeng Kyai Tunggal Wulung at Yogyakarta. Dalam Stuart Robson (Ed.), *The Kraton. Selected essays on Javanese court* (91–106). KITLV Press.
- Topografische Dienst. (1933). *Jogjakarta [Schaal 1:25000]*. Topografische Dienst.
- Topografische Dienst in Nederland-Indie. (1925). *Djogjakarta en Omstreken 1: 10000 uit*. Topografische Dienst in Nederland-Indie.
- Toussaint, J. (2007). Processing of odonyms in Québec, Canada. *Ninth United Nations conference on the standardization of geographical names*, 1–5. https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/9th-uncsgn-docs/econf/9th_UNCSGN_e-conf-98-108-add1-en.pdf
- Trask, R. L. (2010). *Why do languages change?* Cambridge University Press.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2012). http://jdih.jogjaprovo.go.id/storage/15417_UUNomor13Tahun2012.pdf
- United Nations Group of Experts on Geographical Names. (2001). *Consistent use of place-names*. United Nations Group of Experts on Geographical Names.
- United Nations Group of Experts on Geographical Names. (2006). *Manual for the national standardization of geographical names. United Nations group of experts on geographical names*. United Nations Publication.
- Usman, S., Kristiadi, D., Pramono, W. D., R., L., Syafarudin, & Rudianto, A. (2006). *Malioboro*. Mitra Tata Persada.
- Utomo, S. S. (2009). *Kamus lengkap Jawa-Indonesia*. Kanisius.
- Valentine, T., Brennen, T., & Brédart, S. (1996). *The cognitive psychology of proper names: On the importance of being Ernest*. Taylor & Francis/Routledge.
- Van Langendonck, W., & Van de Velde, M. (2016). Names and grammar. Dalam C. Hough (Ed.), *The Oxford handbook of names and naming* (17–38). Oxford University Press.
- Van Langendonck, W. (2007). *Theory and typology of proper names*. Mouton de Gruyter.
- Wardany, I. (2015). *Toponimi nama stasiun kereta api Commuter Jabodetabek: Sebuah kajian linguistik* [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Indonesia.

- Wibowo, E., Nuri, H., & Hartadi, A. (2011). *Toponim Kotagede. Asal muasal nama tempat*. Rekompak; Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Cipta Karya; Jaya Reconstruction Fund; Forum Joglo.
- Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. *Forest Science*, 830–340.
- Yudoyono, B. (2017). *Jogja memang istimewa*. Jogja Bangkit Publisher.
- Zimmerman, V. (2003). The Kraton of Surakarta in the year 1915. Dalam S. Robson (Ed.), *The Kraton. Selected essays on Javanese court* (pp. 41–64). KITLV Press.
- Zoetmulder, P. J. (1995). *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Indeks



- Aksara, 62, 101, 127, 129, 133
- Alun-alun, 31, 37, 38, 45, 46, 47,
53, 54, 56, 58, 64, 88, 124
- Badan Informasi Geospasial, 2, 6
- Bahasa, 1, 79, 92, 120, 125, 126,
127, 129
- Belanda, 35, 36, 37, 48, 54, 68, 69,
89
- Budaya, 6, 116, 119, 127, 128, 129,
131
- Etimologi, 132
- Geografi, 35, 53, 79, 88
- Geosemiotik, 20
- Identitas, 21, 125, 129
- Jawa, 4, 7, 28, 40, 41, 42, 45, 46,
50, 51, 56, 62, 65, 66, 67,
68, 72, 75, 76, 77, 79, 81,
82, 83, 89, 92, 93, 100, 102,
103, 104, 106, 107, 111,
112, 118, 120, 125, 131,
132, 133, 135, 136
- Kebijakan, 113
- Kelekatan Toponimik, 17, 20, 21,
22, 25, 63, 86, 93, 108, 109,
110, 111
- Kerajaan, 6, 36, 37, 119, 127, 131
- Keraton, 6, 7, 13, 19, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 50, 53, 54, 55, 56, 60,
63, 64, 65, 66, 67, 79, 83,
89, 99, 100, 102, 107, 113,
114, 119, 125, 129
- Keraton Yogyakarta, 6, 7, 13, 19, 28,
30, 32, 33, 36, 37, 39, 40,
45, 46, 47, 54, 55, 56, 60,
63, 64, 65, 66, 79, 89, 99,
102, 107, 114, 119, 129

- Kota, 5, 6, 7, 8, 28, 35, 36, 37, 50,
53, 62, 66, 80, 85, 89, 99,
100, 102, 108, 113, 114,
119, 125, 127, 128, 129,
130, 134
- Lanskap, 17, 18, 62, 101, 108, 111,
125, 127
- Lanskap Linguistik, 17, 18, 62, 108,
111, 125, 127
- Linguistik, 14, 17, 22, 23
- Linguistik Setempat, 22, 23
- Malioboro, 7, 33, 48, 51, 68, 73, 74,
75, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 117, 126, 132,
135
- Manunggaling Kawula Gusti*, 28, 29,
47, 50, 120
- Margo Mulyo, 31, 33, 48, 51, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 81, 84, 103,
111, 114, 117
- Margo Utomo, 31, 33, 48, 51, 84,
88, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 100, 103, 110, 114, 117
- Masyarakat, 4, 96, 103, 104, 105,
113
- Mikrokosmos, 28
- Nama, 1, 2, 3, 7, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 23, 35, 38, 54,
59, 62, 66, 70, 72, 73, 74,
78, 80, 85, 88, 89, 90, 91,
99, 100, 101, 103, 104, 105,
107, 110, 118, 126, 127,
128, 132, 133, 136
- Odonimi, 3
- Onomastik, 14, 17, 22, 23, 25, 77,
87, 96, 97, 106, 109, 111,
112
- Onomastik Setempat, 17, 22, 23,
25, 77, 87, 96, 97, 109, 111
- Pangeran Mangkubumi, 28, 31, 37,
48, 55, 82, 88, 89, 90, 91,
96, 97, 101, 114
- Panggung Krpyak, 30, 31, 32, 33,
34, 114
- Pangurakan, 31, 33, 48, 51, 53, 54,
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 101, 103,
107, 114, 117
- Pariwisata, 6, 79
- Pemerintah, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 19,
55, 62, 63, 73, 74, 91, 99,
102, 107, 110, 113, 114,
115, 118, 119
- Penamaan, 1, 64, 68, 73, 102
- Persepsi, 101, 104, 105
- Preferensi, 101, 105, 106
- Psikologi, 53, 101
- Psikologi Sosial, 53, 101
- Rajamarga, 53
- Ruang, 19, 24, 124, 125, 126, 127
- Sangkan Paraning Dumadi*, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 66, 78, 100,
117, 119, 120, 134
- Sejarah, 69, 70, 127, 128, 132, 133,
134
- Semiotik, 11, 12, 14, 129

- Sikap, 23, 77, 78, 93, 98, 101, 103,
104, 105, 107, 111
- Simbol, 12
- Sosio-onomastik, 14, 108, 110, 128
- Sultan, 28, 29, 33, 37, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 49, 50,
53, 56, 64, 65, 68, 71, 76,
78, 79, 81, 89, 99, 100, 107,
108, 120
- Sumbu Filosofi, 8, 13, 30, 32, 47,
48, 113, 115, 117, 120
- Tanda, 18
- Toponim, 6, 9, 16, 39, 111, 129,
134, 136
- Toponimi, 1, 8, 11, 14, 53, 128,
129, 132
- Tugu, 31, 32, 33, 34, 48, 49, 50, 58,
67, 79, 80, 86, 87, 88, 91,
96, 114, 132
- United Nations Group of Experts
on Geographical Names, 1,
2, 135

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Biografi Penulis



FAJAR ERIKHA

Fajar adalah lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Namun sejak 2015, Fajar menekuni kajian toponimi dengan menggunakan dua bidang ilmu yang ia tekuni, yaitu psikologi dan linguistik bersama Komunitas Toponimi Indonesia (Kotisia). Selama bergabung di Kotisia, Fajar dibimbing langsung oleh sejumlah linguis, arkeolog, filolog, dan sejarawan senior FIB UI, serta seorang geografer senior FMIPA UI. Bersama Kotisia, Fajar terlibat dalam enam penelitian yang didanai UI pada rentang tahun 2015–2019: “Penelusuran Bangsa Maritim sebagai Identitas Bangsa Indonesia melalui Penelidikan Pelabuhan-pelabuhan Kuno di Jawa” (2015); “Rekam Jejak Relokasi Pemukiman di Jakarta: Kajian Toponimi Wilayah Kalijodo, Kampung Pulo, dan Luar Batang-Pasar Ikan” (2016); “Artikulasi Budaya Melalui Nama-nama Jalan di Kota Yogyakarta” (2017); “Revitalisasi Toponimi Sebagai Identitas Masyarakat Setempat: Sebuah Kajian Sosio-Onomastik” (2017); “Reartikulasi Landmark Sumenep sebagai Kota Garam: Kajian Toponimi dan Arkeologi” (2018); “Pemaknaan Ruang Sakral dalam Dinamika Sosial Budaya di Kawasan Depok: Tinjauan Multidisiplin Toponimi, Semiotika, dan Arkeologi” (2019), yang kesemuanya itu mengaitkan peran toponimi sebagai artefak budaya dan identitas kelo-

kalan. Selain itu, Fajar merupakan pengelola Seminar Nasional Toponimi pertama di FIB UI (2016) yang diadakan oleh PPKB FIB UI bersama Kotisia.

Buku ini berakar pada penelitian tesis S2 yang dibimbing langsung oleh Prof. Dr. Multamia RMT Lauder, SS., Mse., DEA yang merupakan pendiri Komunitas Toponimi Indonesia. Fajar menyelesaikan studi magisternya dengan predikat *cum laude*. Sebagian dari materi pada buku ini juga telah dipresentasikan oleh Delegasi Republik Indonesia pada Eleventh United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names di New York pada tahun 2017. Bahkan materi penelitian S2 ini berhasil dielaborasi, yang telah dan akan diterbitkan pula ke dalam berbagai publikasi ilmiah nasional dan internasional.

Guna meningkatkan kompetensi di dalam kajian toponimi, pada Maret 2018, Fajar dan sejumlah akademisi, termasuk Prof. Dr. Cece Sobarna dari Universitas Padjadjaran, mengikuti lokakarya “The First Regional Training in Toponymy including Marine Toponymy” di Manila, Filipina, yang diadakan oleh The UNGEGN Asia South East Division.

Saat ini, Fajar merupakan Kandidat Doktor (sejak 2018) di bawah supervisi Prof. Dr. Multamia R.M.T Lauder, S.S., Mse., DEA (Promotor) dan Dr. Frans Asisi Datang, SS., M.Hum. (Kopromotor), serta sedang mengkaji penelitian toponimi yang berjudul “Lanskap Odonim di Kota Bandung berdasarkan Kajian Sosio-onomastik”.

Selain dalam lingkup toponimi, Fajar memulai karier sebagai peneliti sejak 2011 hingga saat ini, yaitu mengkaji aspek psikologi dan bahasa pada kelompok ekstremisme di Indonesia di bawah bimbingan (alm.) Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono di Lembaga Penelitian Psikologi UI (2011–2012) dan PRIK UI (2012–2017) hingga akhirnya mendirikan lembaga riset bersama kolega lainnya, yaitu Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) pada 2017 hingga saat ini.

Sebagai Peneliti Senior dan Program di DASPR, Fajar diamanahkan menjadi Deputy Direktur oleh Dr. Phil Idamsyah Eka Putra yang merupakan Direktur DASPR. Dalam aktivitas akademik di lingkup kampus, Fajar merupakan dosen tetap di Prodi Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) dan dipercaya menjadi Ketua Kajian Keilmuan Psikologi di bawah Unit Pelayanan dan Pengembangan Psikologi (UP3 Unusia). Di saat yang

bersamaan, sejak 2019, Fajar juga berkontribusi sebagai Sekretaris Dewan Komite Etik di organisasi Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara (KPIN).

Selama berkiprah sebagai akademisi, Fajar pernah dianugerahi Sarlito Wirawan Sarwono Award (SWS Award) pada 2021. Publikasi ilmiah dan non-ilmiah milik Fajar dapat ditelusuri melalui akun Google Scholar, Sinta, Academia, Researchgate, Scopus, dan Orcid miliknya. Penulis bisa dihubungi melalui surel: fajar@unusia.ac.id dan fajarerikha@dasprui.com



MULTAMIA R.M.T. LAUDER

Multamia adalah Guru Besar Geolinguistik pada Departemen Linguistik di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (FIB UI). Multamia memperoleh gelar S-1 pada tahun 1979 berupa Sarjana Sastra di bidang linguistik dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia; gelar S-2 pertama pada tahun 1980 berupa *Maîtrise de Linguistique et Phonétique* (Mse.) dari L'Institut de Phonétique de Grenoble, Prancis; gelar S-2 kedua pada tahun 1981 berupa *Diplôme d'Études Approfondies de Géo-Linguistique* (DEA) dari Faculté des Lettres L'Université de Grenoble III, Prancis; dan memperoleh gelar doktor linguistik dengan predikat *cum laude* pada tahun 1990 dalam bidang dialektologi, dari Program Studi Sastra dan Linguistik Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Multamia dikukuhkan pada tahun 2003 sebagai Guru Besar Tetap Linguistik di Universitas Indonesia. Minat kajiannya berfokus pada geolinguistik, yaitu distribusi variasi bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia. Kajiannya mencakup isu variasi bahasa, perubahan bahasa, vitalitas bahasa, kepunahan bahasa, dan pemetaan bahasa. Bahkan hingga saat ini, Multamia masih merupakan satu-satunya linguis Indonesia yang bertugas sebagai Delegasi Republik Indonesia pada tiap Sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) di PBB. Multamia merupakan pendiri dan masih bertugas sebagai Ketua Komunitas Toponimi Indonesia (Kotisia).

Beberapa tulisan ilmiah Multamia yaitu “Merawat Budaya Bangsa melalui Pemetaan Bahasa dan Vitalitas Bahasa” (2021); “Utilization of Language

Map to Record Generic Terms from Local Languages” (2021); “Vitalitas Bahasa” (2021); “Toponymy Research in Indonesia and Language Map of South East Asia for Generic Terms in Toponym” (2021); “Daya Hidup Bahasa dan Pelindungan Bahasa” (2020); “Kaidah Penamaan Rupabumi dan Proses Penelaahan” (2020); “Vitality and Revitalization of Minority Regional Languages in the East of Indonesia” (2020); “Menjelajahi Kajian Toponimi dalam Upaya Pelindungan Bahasa” (2019); “Toponymic Perspectives on Maritime Activities” (2019); “Memahami Kajian Toponimi” (2019); “Pengelolaan Toponim” (2019); “Penelaahan Toponimi” (2019); “Upaya Penyelesaian Peta Bahasa melalui *Reverse Engineering*” (2019); “Place Names as Cultural Heritage in an Archipelagic Country” (2018); “A Real Time Geolinguistic Study of Language Change in Bekasi, West Java” (2018); “Maritime Indonesia and the Archipelagic Outlook: Some reflections from a multidisciplinary perspective on old port cities in Java” (2016); “Ubiquitous place names: Standardization and study in Indonesia” (2015). Penulis bisa dihubungi melalui surel: mia.lauder@gmail.com

TOPONIMI DI JANTUNG KOTA YOGYAKARTA

dari Perspektif Kebahasaan
hingga Psikologi Sosial

Pengubahan nama tempat dapat berdampak pada banyak hal jika tidak dipersiapkan secara paripurna. Pada 2013 Pemerintah Daerah Yogyakarta mengubah tiga nama jalan, yaitu Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora), Jalan Margo Mulyo (d.h Jalan Ahmad Yani), dan Jalan Margo Utomo (d.h Jalan Pangeran Mangkubumi). Nama jalan yang baru memuat nilai asli, kesejarahan, budaya, dan filosofi yang perlu direvitalisasi dan dilestarikan. Perubahan ini merupakan salah satu realisasi atas rencana menjadikan Yogyakarta sebagai Kota Filosofi dan Kota Warisan Dunia menurut UNESCO.

Buku *Toponimi di Jantung Kota Yogyakarta dari Perspektif Kebahasaan hingga Psikologi Sosial* ini berusaha menggali pemaknaan oleh masyarakat terhadap nama jalan yang diubah tersebut. Fungsi identitas, memori, sejarah, koneksi antarkelompok, hingga strategi sukses-tidaknya pergantian nama dijelaskan dalam buku ini melalui pendekatan ilmiah. Fenomena yang barangkali terkesan umum di mata awam, yaitu perkara pergantian nama tempat, menjadi sesuatu yang layak untuk dikaji dan diperbincangkan layaknya isu sosial lainnya.



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI Lt. 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710
Telp.: (021) 573 3465 | Whatsapp 0812 2228 485
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id | penerbit.lipi.go.id

DOI 10.14203/press.337



ISBN 978-602-496-289-0



9 786024 962890

ini tidak diperjualbelikan.